



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

HUKUM KEWARISANTIRKAH SYUBHA<T DAN RELEVANSINYA DENGAN ASAS IJBARI< PERSPEKTIF EMPAT MAZHAB

DISERTASI

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Doktor pada
Program Studi Hukum Keluarga (*ahwal al Syaksiyah*)



OLEH:

MUHAMMAD ICHSAN

NIM: 31695104853

Promotor:

Prof. Dr. Alaidin Koto, M.A

Co Promotor

Dr. Helmi Basri. Lc., M.A

**PROGRAM PASCA SARJANA (S.3)
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
SULTAN SYARIF KASIM,
PEKANBARU. RIAU
1441 H. / 2019 M**

KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PROGRAM PASCASARJANA
كلية الدراسات العليا
THE GRADUATE PROGRAMME

Alamat : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28129 PO.BOX. 1004
 Phone & Facs, (0761) 858832, Site : pps.uin-suska.ac.id E-mail : pps@uin-suska.ac.id

Lembaran Pengesahan

Nama
 Nomor Induk Mahasiswa
 Gelar Akademik
 Judul

Tim Penguji

Muhammad Ichsan

31695104853

Dr. (Doktor)

Hukum Kewarisan Tirkah Syubhat dan Relavansinya dengan
 Asas Ijbari Perspektif Empat Mazhab.

Prof. Dr. Afrizal, M. MA

Penguji I / Ketua

Dr. Hj. Andi Murniati, M.Pd

Penguji II / Sekretaris

Dr. Jumni Nelli, M. Ag

Penguji III

Prof. Dr. A. husein Ritonga, MA

Penguji IV

Prof. Dr. H. Sudirman. M. Johan, MA

Penguji V

Prof. Dr. H. Alaidin Koto, MA

Penguji VI/ Promotor

Dr. H. Helmi Basri, Lc, MA

Penguji VII/ Co-Promotor

Tanggal Ujian/Pengesahan 04 Desember 2019

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



PERSETUJUAN UJIAN TERBUKA

Kami yang bertanda tangan di bawah ini selaku pembimbing disertasi dengan ini menyetujui bahwa disertasi yang berjudul: **"Hukum kewarisan tirkah syubhat dan relevansinya dengan asas ijbari perspektif empat mazhab"** yang ditulis oleh:

Nama : Muhammad Ichsan
NIM : 31695104852
Program studi : Hukum Keluarga

Untuk diajukan dalam sidang **Ujian terbuka** pada Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Promotor

Pekanbaru,
Co. Promotor

2019

Prof. Dr. H. Alaidin Koto, MA.
NIP : 195402121981031007

Dr. H. Helmi Basri, Lc., MA
NIP : 197407042006041003

Mengetahui:

Ketua Program Studi Hukum Keluarga
(Ahwal Syakhsiyyah)

Dr. Jumni Nelli, M. Ag
NIP: 197206282005012004

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta dilindungi Undang-Undang

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta dilindungi undang-undang

Universitas of Sultan Syarif Kasim Riau

PERSETUJUAN TIM PENGUJI
SEMINAR UJIAN TERTUTUP

Disertasi yang berjudul *Hukum kewarisan tirkah syubhat dan relevansinya dengan asas ijbari perspektif empat mazhab* yang ditulis oleh Sdr. Muhammad Ichsan, NIM: 31695104853, Program Studi Hukum Keluarga (*Ahwāl al-Syakhṣiyyah*) telah diuji dan diperbaiki sesuai dengan masukan dari Tim Penguji Ujian Tertutup Disertasi pada Tanggal 31 Oktober 2019, dapat disetujui untuk diajukan dalam Sidang Ujian Terbuka pada Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

TIM PENGUJI

Penguji I/ Ketua
Prof. Dr. H. Afrizal. M, MA

Tanggal: 9 - November - 2019

Penguji II/Sekretaris
Dr. Jumni Nelli, M.Ag

Tanggal: 7 - November - 2019

Penguji III
Prof. Dr. H. Sudirman M. Johan, MA

Tanggal: 7 - November - 2019

Penguji IV
Prof. Dr. A. Husein Ritonga, MA

Tanggal: 31 - Oktober - 2019

Penguji V
Prof. Dr. H. Alaidin Koto, MA

Tanggal: 6 - November - 2019

Penguji VI (Co. Promotor)
Dr. Helmi Basri. Lc, MA

Tanggal: 6 - November - 2019

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN

Kami yang bertanda tangan di bawah ini selaku pembimbing disertasi dengan ini menyetujui bahwa disertasi yang berjudul: **"Hukum kewarisan tirkah syubhat dan relevansinya dengan asas ijbari perspektif empat mazhab"** yang ditulis oleh:

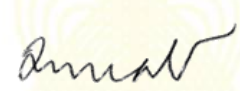
Nama : Muhammad Ichsan
 NIM : 31695104852
 Program studi : Hukum Keluarga

Untuk diajukan dalam sidang **Ujian tertutup** pada Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

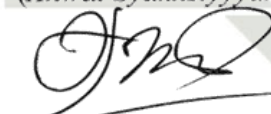
Promotor

Prof. Dr. H. Alaidin Koto, MA.
 NIP : 195402121981031007

Pekanbaru, ¹⁰ Oktober 2019
 Co. Promotor


Dr. H. Helmi Basri, Lc., MA
 NIP : 197407042006041003

Mengetahui:
 Ketua Program Studi Hukum Keluarga
 (Ahwal Syakhsiyyah)


Dr. Jumni Nelli, M. Ag
 NIP: 197206282005012004

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**PERSETUJUAN TIM PENGUJI
SEMINAR HASIL DISERTASI**

Disertasi yang berjudul *Hukum kewarisan tirkah syubhat dan relevansinya dengan asas ijbari perspektif empat mazhab* yang ditulis oleh Sdr. Muhammad Ichsan, NIM: 31695104852, Program Studi Hukum Keluarga (*Ahwāl Syakhsyiyah*) telah diuji dan diperbaiki sesuai dengan masukan dari Tim Penguji Seminar Hasil Disertasi pada Tanggal 29 Agustus 2019, dapat disetujui untuk diajukan dalam Sidang Ujian Tertutup pada Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

TIM PENGUJI

Ketua
Prof. Dr. H. Afrizal, M.A

Tanggal: 14 - Oktober - 2019

Sekretaris
Dr. Jumni Neli, M.Ag

Tanggal:

Penguji I
Prof. Dr. H. Sudirman M. Johan, M.A

Tanggal: 14 - Oktober 2019

Penguji II (Promotor)
Prof. Dr. H. Aliddin Koto, M.A

Tanggal: 09 - Oktober - 2019

Penguji III (Co. Promotor)
Dr. Helmi Basri, Lc, M.A

Tanggal: 10 - Oktober 2019



PERSETUJUAN UJIAN SEMINAR HASIL

Kami yang bertandatangan di bawah ini selaku pembimbing Disertasi, dengan ini menyetujui bahwa disertasi yang berjudul "*Tirkah Syubhāt dan Relevansinya dengan Asas Ijbari dalam Kewarisan Islam Perspektif Empat Mazhab*" yang ditulis oleh:

Nama : M.Ichsan
NIM : 31695104853
Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsyah)

Untuk diajukan dalam ujian Seminar Hasil Disertasi pada Program Pasca Sarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

Tanggal,
Promotor,

2018

Tanggal,
Co. Promotor,

2018

Prof. Dr. Alaidin Koto, M.A
NIP. 19402121981031007

Dr. Helmi Basri, M.A
NIP. 197407042006041003

Mengetahui,
Ketua Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsyah)

Dr. Jumni Nelli, M.Ag
NIP. 197206282005012004

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan mempernyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Ichsan
 Nim : 31695104852
 Tempat / Tanggal Lahir : Keutapang /05- November-1986
 Program Study : Hukum Keluarga (*ahwal al syakhsiyah*)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa disertasi yang saya tulis dengan judul: **"hukum kewarisan *tirkah syubhat* dan relevansinya dengan *asas ijbari* perspektif empat mazhab"** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Doktor pada Program Pascasarjana UIN Sulthan Syarif Kasim Riau. Disertasi yang telah saya susun ini, merupakan hasil karya saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu yang saya kutip, saya cantumkan refrensi berdasarkan aturan kaidah dan etika penulisan ilmiah.

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian disertasi ini bukan hasil karya saya sendiri atau adanya plagiasi dalam bagian-bagian tertentu. Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Pekanbaru, 20 November 2019



Muhammad Ichsan

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGATAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا فِي الْبِدَايَةِ لِمَعْرِفَةِ الْهَدَايَةِ، وَرَعَانَا بِعَيْنِ الْعِنَايَةِ فِي النِّهَايَةِ عَنْ الْجَهْلِ وَالْغَوَايَةِ، وَجَعَلَنَا مِمَّنْ آمَنَ بِمَا أُنْزِلَ وَاتَّبَعَ الرُّسُلَ وَوُفَّقَ لِلدَّرَايَةِ، وَخَصَّنَا بِأَهْلِيَّةِ الشَّهَادَةِ عَلَى الْأُمَمِ بِفَضْلِ مِنْهُ وَكَمَالِ الرَّحَايَةِ. أَحْمَدُهُ عَلَى إِفَاضَةِ حُكْمِهِ، وَأَشْكُرُهُ عَلَى سَوَابِغِ نِعَمِهِ، وَأُصَلِّي عَلَى مَنْ اصْطَفَاهُ اللَّهُ لِلرَّسَالَةِ، فَكَانَ خَازِنًا عَلَى وَحْيِهِ حَامِيًا أَمِينًا، وَحِبَاهُ بِمَعْرِفَةِ أُمَّ الْكِتَابِ مَعْدِنِ الْأَنْوَارِ وَالْأَسْرَارِ فَكَانَ إِمَامًا حَاوِيًا مُبِينًا، مُحَمَّدٍ الْمُبْعُوثِ إِلَى الْأَسْوَدِ وَالْأَحْمَرِ بِالْكِتَابِ الْعَرَبِيِّ الْمُعْجَزِ الْمُنَوَّرِ، وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ الْقَائِمِينَ بِنُصْرَةِ الدِّينِ الْقَوِيمِ الْأَزْهَرِ، وَالصَّفْوَةِ الْمُجْتَهِدِينَ مِنْ أُمَّتِهِ الْوَارِثِينَ لِعِلْمِهِ الْغَزِيرِ الْأَنْوَرِ

Sudah menjadi kelaziman dan suatu keharusan bagi seorang mahasiswa/i untuk memperoleh gelar Doktor (Dr) di lingkungan Program Pascasarjana UIN Sulthan Syarif Kasim (SUSKA) wajib menyelesaikan disertasi, sebagai tugas akhir untuk mahasiswa. Oleh karena itu penulis sebagai mahasiswa Program Pascasarjana UIN Sulthan Syarif Kasim Riau, juga berkewajiban menyelesaikan disertasi dan penulis memilih judul **“HUKUM KEWARISANTIRKAH SYUBHA<<><<<<T DAN RELEVANSINYA DENGAN ASAS IJBARI< PERSPEKTIF EMPAT MAZHAB”**.

Keberhasilan dalam penyusunan proposal disertasi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan setinggi-tingginya. Secara khusus dan *ta'zim* penulis ucapkan terimakasih setulus-tulusnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya penulis haturkan kepada yang tercinta Ibunda Wardah binti Abdullah dan Ayahanda



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Abdurrahman bin Ahmad, yang telah mendidik dan membesarkan ananda, serta selalu memberikan motivasi-motivasi yang sangat berarti untuk ananda.

Berikutnya, ucapan terima kasih yang mendalam kepada Istri tercinta, Era Dewi. Lc., MA atas cinta dan kasih sayangNya, yang selalu memotivasi penulis untuk menyelesaikan karya tulis ini. Juga kepada buah hati tersayang Arissa Zhufairah (8 tahun) dan M. Zahid al-Kautsar (6 tahun) yang dengan keluguan, senyuman, dan keceriaan kalian telah menghilangkan keletihan dan kepekuan hati serta pikiran. Terima kasih ananda sudah merelakan waktunya terbagi. Semoga ananda menjadi anak yang shaleh dan shalehah yang selalu berada di jalanNya yang lurus. *Ihdinā al-ṣirāṭa al-mustaqīm*. Kemudian kepada kakak, abang ipar dan adik-adik penulis, (Nur Fida, Mulyana. S. Pd, Nur Hasanah, S. P.d.I, Rahmatun Nufus, Ismalia, yang selalu menjadi penyejuk mata dan pemotivasi dalam menyelesaikan penulisan karya ilmiah ini.

Penghargaan dan penghormatan kepada Bapak Prof. Dr. K.H Akhmad Mahidin, M. Ag selaku Rektor UIN SUSKA , dan Bapak Prof. Dr. H. Afrizal M. A selaku Direktur Pasca UIN SUSKA. Terimakasih penulis sampaikan kepada Bapak Allah yarhamhu Prof. Dr. Mahdini, MA selaku Penasehat Akademik (PA) dari semester pertama sampai akhir menyelesaikan kuliah. Tidak lupa penulis ucapkan terimakasih kepada Prof. Dr. H. Alaidin Koto. MA, selaku Promotor Disertasi ini, dan juga penulis sampaikan terimakasih kepada Co. Promotor Dr. H. Helmi Basri. Lc., MA. Rasa terimakasih juga penulis sampaikan kepada Dr. Jumni Nelli. M. Ag, selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga (*Ahwal Al Syahsiyah*) Di mana di tengah-tengah kesibukan masing-masing, mereka masih



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menyempatkan diri untuk meluangkan waktunya membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan penulisan disertasi ini, sehingga dapat diselesaikan dalam waktu yang telah ditargetkan. Mudah-udahan kebaikan beliau menjadi amal kebaikan dan mendapatkan imbalan yang setimpal disisi Allâh Swt.

Rasa persahabatan dan terima kasih penulis ucapkan sedalam-dalamnya kepada teman-teman seperjuangan, khususnya kepada teman-teman Konsentrasi Hukum Keluarga Program 5000 Doktor angkatan 2016/2017 yang telah memberikan semangat dan motivasi yang kuat dalam perjalanan studi penulis selama di Pekanbaru, Provinsi Riau.

Ucapan terimakasih juga kepada karyawan perpustakaan UIN SUSKA, Pustaka Pascasarjana UIN SUSKA, Pustaka Induk UIN SUSKA, Pustaka Pondok Pesantren Al-Mujtahadah dan Pustaka Wilayah Provinsi Riau (PUSWIL). Walaupun banyak pihak yang telah memberikan bantuan dan pemikiran, namun sebagai manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan, penulis menyadari masih banyak kekurangan di sana sini, oleh karena itu kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan karya ilmiah ini.

Akhirnya penulis hanya dapat menyerahkan diri kepada Allâh subhanahu wa ta'ala, semoga disertasi ini bermanfa'at bagi semua pihak terutama bagi penulis sendiri, dan amal kebaikan semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian disertasi ini mendapat imbalan yang setimpal di sisi Allâh Swt. *Amîn*

Yâ Rabbal'âlam



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta dilindungi Undang-Undang UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

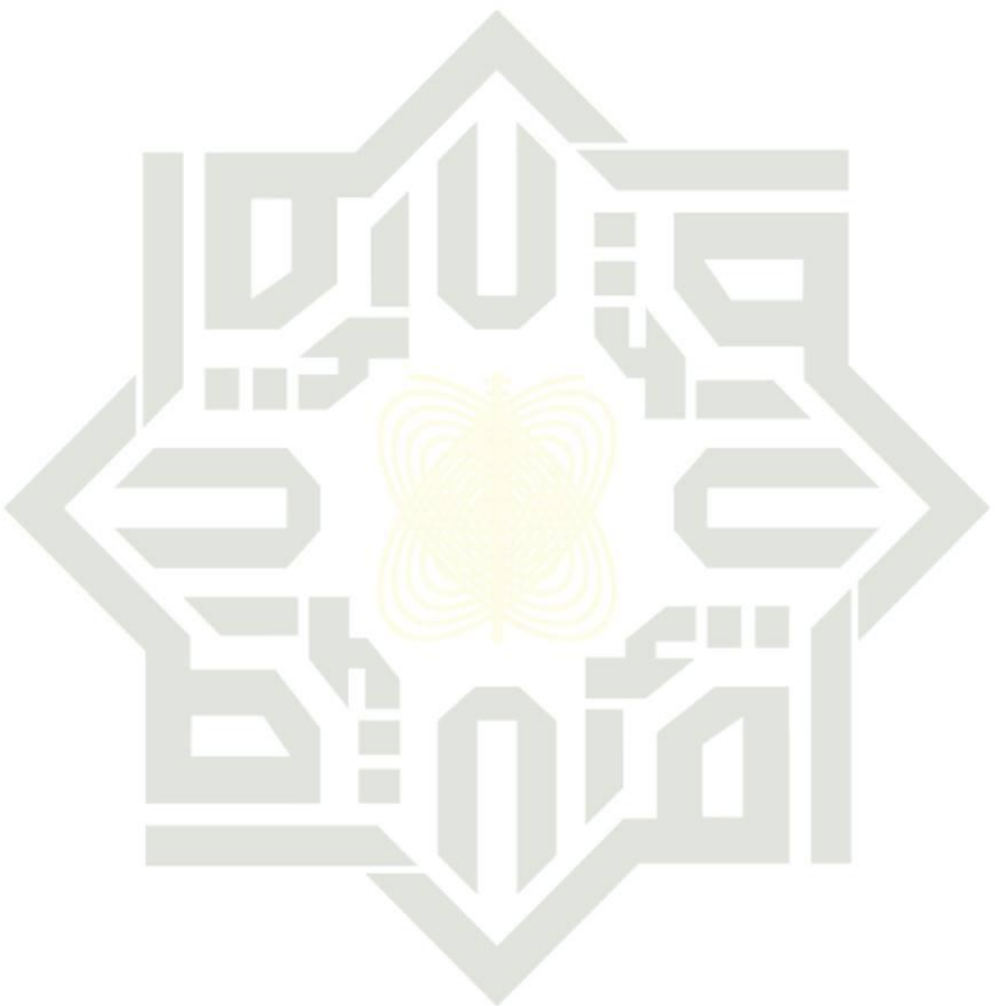
Halaman Judul	
Nota Dinas	
Persetujuan Pembimbing	
Surat Pernyataan	
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	iv
Pedoman Transliterasi	vi
Abstrak	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Definisi Istilah	11
C. Kerangka Pikir	17
D. Rumusan Masalah	20
E. Tujuan dan Manfaat Penelitian	20
F. Tinjauan Kepustakaan/Tinjauan penelitian yang relevan	22
G. Sistematika Pembahasan	28
BAB II LANDASAN TEORETIS	30
A. Kerangka Teori	30
B. Kewarisan dalam Islam	51
C. Tirkah Syubhat dalam Pandangan Ulama	118
D. Penyebab Terjadinya Syubhat dalam Pandangan Ulama	136
E. Asas-asas Dalam Hukum Kewarisan	145
BAB III METODE PENELITIAN	171
A. Jenis Penelitian	171
B. Metode Pengumpulan Data	174
C. Sumber Data	175
D. Pengolahan Data	176
E. Teknik Analisa Data	177
BAB IV HUKUM KEWARISAN <i>TIRKAH SYUBHAT</i> PERSPEKTIF EMPAT MAZHAB	178
A. Biografi singkat Ulama Madzhab Empat	178
B. Subtansi <i>Tirkah Syubhat</i> dalam Kewarisan Islam	259
C. Kewarisan <i>tirkah Syubhat</i> dalam pandanga Ulama Empat Madzhab	282
D. Identifikasi <i>Tirkah Syubhat</i> dalam Praktek Pembagian Harta Warisan	303
BAB V PENUTUP	308
A. Kesimpulan	308

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Saran 309

DAFTAR PUSTAKA 311



UIN SUSKA RIAU



PEDOMAN TRANSLITERASI DARI HURUF ARAB KE LATIN

Pedoman Transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penulisan disertasi ini adalah Pedoman transliterasi yang merupakan hasil Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor : 0543b/U/1987.

Di bawah ini daftar huruf-huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin.

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṣa	Ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	Ja	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Kadan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sa	S	Es
ش	Sya	SY	Esdan Ye
ص	Ṣa	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ذ	Ḍat	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te(dengantitik di bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Apostrof Terbalik
غ	Ga	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qa	Q	Qi
ك	Ka	K	Ka
ل	La	L	El
م	Ma	M	Em
ن	Na	N	En
و	Wa	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vocal bahasa Indonesia, terdiri atas vocal tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Fatḥah	A	A
إ	Kasrah	I	I
و	Ḍamah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَي	Fatḥah dan ya	Ai	Adan I
أَو	Fatḥah dan wau	Iu	A dan U

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *hauula*

3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Tanda	Nama
آ	Fatḥah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
إِ	Kasrah dan ya	ī	I dan garis di atas
وُ	Ḍamah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

يَمُوتُ : *yamūtu*

4. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al-serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-aṭfāl*
 الْمَدِينَةُ الْفَضِيلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah*
 الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

5. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberitanda *syaddah*. Contoh:

: *rabbana*
 : *najjainā*
 : *al-ḥaqq*
 : *al-ḥajj*
 : *nu''ima*
 : *'aduwwun*

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Jika huruf **ع** ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf berharakat kasrah (-), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī). Contoh:

عَلِيّ : 'Alī (bukan 'Aliyya tau 'Al'y)

عَرَبِيّ : 'Arabī (bukan 'Arabiyya tau 'Araby)

Kata Sandang

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf **ال** (alif lam ma'arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشَّمْسُ : al-syamsu (bukan asy-syamsu)

الزَّلْزَلَةُ : al-zalزالah (bukan az-zalزالah)

الفَلْسَفَةُ : al-falsafah

الْبِلَادُ : al-bilādu

Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya:

تَأْمُرُونَ : ta'murūna

النَّوْءُ : al-nau'



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

شَيْءٌ : *syai'un*

أَمْرٌ : *umirtu*

Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-quran (dari *al-Qur'ān*), sunnah, hadis, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fīzilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

Al-'Ibārāt Fī 'Umūm al-Lafẓ lā bi khusūṣ al-sabab

Lafẓ al-Jalālah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jar* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دَيْنُ اللَّهِ : *dīnullāh*

Adapun *tamarbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafẓ al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fī raḥmatillāh*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

10. Huruf Kapital

Walau system tulisan Arab tidak mengenal huruf capital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf capital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al- baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadunillārasūl

Inna awwala baitin wuḍi‘alinnāsilallaḥi bi Bakkatamubārakan

Syahru Ramaḍān al-laḥiunzila fih al-Qur‘ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī

Abū Naṣr al-Farābī

UIN SUSKA RIAU

MUHAMAD ICHSAN: HUKUM KEWARISANTIRKAH SYUBHĀT DAN RELEVANSINYA DENGAN ASAS IJBARĪ PERSPEKTIF EMPAT MAZHAB

Rumusan masalah dalam penelitian adalah Bagaimana substansi *tirkah syubhāt*? Bagaimana relevansi *tirkah syubhāt* dengan asas *ijbari* dalam kewarisan Islam? Bagaimana pandangan ulama empat mazhab terhadap kewarisan *tirkah syubhāt*. penelitian ini kepustakaan *research* dengan deskriptif analisis.

Hasil dari penelitian, bahwa Esensi *tirkah syubhat*: segala sesuatu yang menjadi milik seseorang pada masa hidupnya dan menjadi peninggalanya setelah ia meninggal dunia, yang status hukum harta peninggalan tersebut tidak jelas atau samar-samar, karena sebab percampuran unsur halal dan haram, sehingga memunculkan keragaman konsekwensi hukum terhadap penggunaan harta peninggalan tersebut. *Asas ijbari* dalam kewarisan adalah paksaan untuk menerima bagian harta warisan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh syari'at, hal ini membuktikan bahwa paksaan *asas ijbari* tidak mencakup *tirkah syubhat* pada pembagian warisan. Pendapat mazhab Hanafiyah terkait kewarisan *tirkah syubhat* dilihat dari kadar percampuran, apabila mayoritas harta haram, maka statusnya haram, berbeda halnya apabila mayoritas harta halal, maka hukumnya makruh. Madzhab Syafi'iyah: *tirkah syubhat* penggunaannya adalah makruh. Madzhab Maliki: harta *syubhat* dihakimi makruh. Hanabilah: pandangannya terbagi menjadi empat: *Pertama* apabila diketahui bahwa dalam harta tersebut terdapat harta halal dan haram, maka konsekwensi hukumnya haram secara keseluruhan. *Kedua*, apabila percampuran melebihi 1/3 (sepertiga), maka, dianggap haram semuanya, akan tetapi setelah identifikasi diketahui percampurannya kurang dari sepertiga maka halal. *Ketiga*, apabila harta haram lebih banyak, maka hukumnya haram, apabila harta yang halal lebih banyak, maka hartanya halal. karena yang sedikit mengikuti yang dominan. *Keempat*, makruh. kemakruhannya meningkat atau menurun menurut kadar banyak atau sedikitnya harta yang haram.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Saran dalam tulisan ini bahwa kepada ahli waris agar kiranya meninjau ulang harta yang akan didistribusikan kepada ahli waris. Kepada penegak hukum atau *stakeholder* agar kiranya meninjau ulang terkait aturan yang telah ada mengenai pembagian harta warisan, karena aturan yang telah ada belum mampu mengkaver *tirkah syubhat*. Perlu aturan mengikat yang mengatur pemisahan harta *syubhat* pra pendistribusiannya kepada ahli waris, agar tidak terjadi penerusan estafet kesalahan pewaris kepada ahli waris. Untuk memudahkan identifikasi status harta *syubhat* perlu pencatatan pemasukan individu dan pengeluaran setiap individu penduduk. Konsekwensi dari pemberlakuan peraturan tersebut tentunya akan meminimalisir terjadi keraguan dalam penggunaan harta terutama bagi ahli waris yang melanjutkan estafet kepemilikan harta dari pewarisnya.

Kata kunci: *Tirkah Syubhat*, Kewarisan Islam, Empat Mazhab

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

الملخص

محمد إحسان: حكم الميراث تركة الشبهة و علاقتها با الأساس الإجبار عند المذاهب الأربعة.

الأختلاط بين التركة الشبهة فيها و غير الشبهة فيها ظاهرة. ومع ذلك نادرا ما يوجد ان الطرف يجري مراجعة لحالة هذه الاموال. بينما، إذا كانت تستند النظرية نادي بعدم استهلاك الممتلكات التي ليست ملكنا، ثم اقترح ان هناك حاجة ضمنية لفرز خلط الأموال الشبهة. من المفهوم تطبيق الأساس الإجباري بنظام الميراث انه في حالة وفاة شخص ما، يمكن توزيع الميراث مباشرة على الورثة، على الرغم انه في المراحل التي سيتم توزيعها هناك اعمال تحتوي على عناصر من الشبهة. يحدث هذا الان مبداء الإجباري في نظام الميراث الإسلامي يري ان وضع ملكية الارض يصبح حق الورثة تلقائيا إذا مات المورث. وهذا يعني ان حالة ملكية العقارستتحول تلقائيا الى الورثة دون الحاجة الى الإنتباه الى المكان الذي تم فيه الحصول على الميراث بواسطة الملك السابق. الواقع الموصوف اعلاه مخوف بالمخاطرلانه يقسم الشبهة دون تتبع من اين جاء الاموال. من المحتمل ايضا تقسيمهن العناصرالشبهة لموجودة فيها. هذا اهتمامات المؤلف لإجراء البحوث على حكم الميراث تركة الشبهة و علاقت با الأساس الإجبار عند المذاهب الأربعة.

صياغة المشكلة في البحث هو كيف الموقف الحقيقية الشبهة؟ ما مدى صلة الموقف الصادق الأساس الإجبارى في الميراث الإسلامي؟ ما وجهة اراء العلماء عن ميراث الشبهة؟ الطريقة البحثية باستخدام طريقة التحليل الوصفي التي تشرح موقف تركة الشبهة في توزيع الميراث المرتبط بمبداء الإجباري الذي يفرض لقيام بتوزيع الميراث بعد وفاة المورث في اراء العلماء المذاهب الأربعة.

نتائج هذه الدراسة هي العلماء المذاهب الأربعة مختلفة من الفكر في تقييم حالة التركة الشبهة. التركة الشبهة هي كلا ما ينتمي الشخص ما في حيات و يبقى بعد وفات هو المركز القانوني للميراث غير واضحا وغامض. بسبب الخلط بين عناصر الحلال و الحرام بحيث يكون هناك مجموعة من الآثارالقانونية لإستخدام الميراث. الأساس الإجبارى بالميراث هو الإكراه على الحصول على الجزء الميراث وقف الأحكام المنصوص عليهم في الشريعة الإسلامية. هذا يثبت ان الإكراه فيتطبيق مبدأ الإجباري لا يشمل إعطاء التركة في ممارسة الميراث. مذهب الحنفية يقول ذات الصلة الميراث بالتركة

الشبهة فيه اذا نظرنا اليها من مستوي خلط الأصول فإذا كانت غالبية الاصول حرام وحكمه حرام،
و مختلفة اذا كانت غالبية الممتلكات حلالا و حكمه مكروه. الشافعي اذا كانت ممتلكات محرمة
بالحلال و الحرام فحكمه مكروه و قد ذكر الملكي نفس وجهات نظر الشافعية.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta © UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

ABSTRACT

MUHAMMAD. ICHSAN, THE VIEW OF THE SCHOLARS OF THE FOUR SCHOOLS ON THE DOUBTFUL INHERITANCE AND ITS RELEVANCE TO IJBARI PRINCIPLE.

A conglomeration between doubtful and non-doubtful properties has become a phenomenon. However, rarely has a review of the assets' status been conducted. Indeed, based on the theory that discourages consuming someone else's property, it is implicitly suggested that the doubtful properties be singled out. The application of the ijbari principle in the inheritance system promotes a direct distribution of an heirloom to its legitimate heir when a predecessor dies even though the heirloom might contain an element of doubtfulness. This happens because the principle of ijbari in the Islamic inheritance system views that the ownership of a property automatically becomes the right of its heir if the predecessor dies regardless of the predecessor's means of acquiring it. This reality is highly precarious since distributing doubtful heirloom without tracing where it comes from will risk distributing the undesired elements of doubtfulness. This fact interested the author to conduct research on the views of the scholars of the four schools of thought on the inheritance of doubtful heirloom and its relevance to the principle of ijbari. Problem formulation in research includes what a doubtful heirloom is essentially, how is it relevant to the principle of ijbari in Islamic inheritance system, and what are the views of the four Islamic schools of thought on the doubtful inheritance. This research employed descriptive analysis method through which the position of doubtful inheritance in the distribution of inheritance is explained in relation with the principle of ijbari which propagates the uninterrupted distribution of inheritance after the death of a predecessor from the perspectives of the four Islamic schools of thought. The result of this study is that the four schools maintain different thoughts in assessing the status of doubtful heirloom. Essentially, a doubtful heirloom is any property owned by someone in their lifetime which becomes their legacy after he or she dies, and with unclear or vague legal status due to the conglomeration of halal and haram elements, which results in varied legal consequences for the use of the



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
UIN SUSKA RIAU
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

inheritance. The principle of *ijbari* in inheritance is a compulsion to receive a portion of the inheritance in accordance with the provisions stipulated by the Sharia. This proves that the compulsion in the application of *ijbari* principle does not comprise the distribution of doubtful heirloom in the inheritance practice. Hanafiya school of thought views the inheritance of doubtful heirloom based on the degree of asset conglomeration; if the majority of the inheritance is haram, it is haram. On the contrary, if the majority of the property is halal, it is makruh (discouraged or detested). Syafi'i school views that if halal and haram properties are mixed up, their use is makruh. Maliki school maintains the same views as Syafi'i's, that is if halal and haram properties are mixed up, they are makruh. Hanabali school of thought maintains four views on mixed-up assets. *First*, if the inheritance clearly consists of halal and haram properties, it is haram. *Secondly*, if haram properties make up more than a third of the inheritance, the asset is considered haram. If they make up less than one third of the inheritance, the asset is halal. *Third*, if illegitimate properties outweigh halal ones, they are haram, and if halal properties outweigh the haram ones, the wealth is lawful since the minority is superseded by the more dominant. *Fourth*, the inheritance is not absolutely haram whether illegitimate wealth is more dominant or not, but it is considered makruh. An inheritance's detestability increases or decreases according to the amount of illicit properties it contains.

UIN SUSKA RIAU



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum Islam¹ merupakan petunjuk yang mengatur berbagai sisi kehidupan masyarakat. Hampir setiap permasalahan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat diatur oleh hukum Islam. Salah satu praktek dalam kehidupan masyarakat yang diatur dalam hukum Islam adalah hukum kewarisan, yakni hukum yang mengatur tentang persoalan pendistribusian harta kekayaan dari orang yang meninggal kepada ahli warisnya.²

¹Hukum Islam terdiri dari rakain kata “hukum” dan kata Islam. Kedua kata tersebut secara terpisah merupakan kata yang digunakan dalam bahasa Arab dan terdapat dalam al-Qur’an, juga berlaku dalam bahasa Indonesia. “Hukum Islam” sebagai suatu rangkaian kata telah menjadi bahasa Indonesia yang hidup dan terpakai, namun bukan kata yang terpakai dalam bahasa Arab, dan tidak ditemukan dalam al-Qur’an, dan juga tidak ditemukan dalam literatur yang berbahasa Arab. Oleh karena demikian kita akan menemukan artinya secara definitif. Untuk memahami pengertian hukum Islam, perlu diketahui terlebih dahulu kata “hukum” dalam bahasa Indonesia, kemudian, kata “hukum” tersebut digabungkan dengan kata “Islam”. Kata “hukum” secara sederhana adalah *“seperangkat peraturan tentang tingkah laku manusia yang diakui sekelompok masyarakat, disusun orang yang diberi wewenang oleh masyarakat, berlaku dan mengikat untuk seluruh anggotanya*. Definisi ini tentu masih mengandung kelemahan, namun dapat memberikan pengertian yang mudah dipahami. Maka apabila kata “hukum” menurut definisi di atas dihubungkan kepada “Islam” atau “syara’” maka Hukum Islam dapat diartikan dengan *“seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Rasullullah tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini mengikat untuk semua yang beragama Islam*. Lihat Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup), Hlm. 5-6. Hasbi ash-Shadieqy mendefinisikan hukum Islam sebagai hasil daya upaya yang dipergunakan *fuqahā* dalam menerapkan syari’at Islam sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pengertian ini lebih dekat pada pengertian fiqh sebagaimana pengertian yang diberikan Paydar. Berbeda dengan Hasbi, Joseph schacht, menyatakan bahwa hukum Islam adalah lambang pemikiran Islam, manifestasi paling tipikal dari pandangan hidup Islam serta merupakan inti dan titik sentral. Namun dalam kapan sejarah hukum Islam, pengertian hukum Islam lebih diarahkan kepada *fiqh*, karena fiqhlah yang memiliki karakter dinamis sebagai refleksi dari dinamika sejarah Islam itu sendiri. Pengertian ini lebih dekat kepada syari’ah.

² Suhrawardi & Komisa Simanjuntak, *Hukum Waris Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 1-3.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Aturan tentang distribusi harta kekayaan erat kaitannya dengan cara memperoleh harta kekayaan yang merupakan sumber harta yang akan diwariskan. Pembahasan mengenai hal ini dinilai penting karena fenomena masyarakat menggambarkan bahwa harta telah menjadi salah satu penyebab terjadinya kerusakan dan persengketaan di muka bumi. Oleh sebab itu hukum Islam mengatur bagaimana memperoleh dan menggunakan harta kekayaan termasuk *tirkah* dengan cara yang baik dan benar agar kerusakan dan persengketaan di antara manusia yang terjadi dapat diminimalisir.³

Sebagaimana diketahui manusia cenderung senang dan gembira apabila memiliki harta kekayaan yang banyak. Sikap manusia yang seperti ini menjadi fitrah agar mereka termotivasi untuk mencari rezeki yang telah disediakan oleh Allah di muka bumi ini. Kecenderungan terhadap harta kekayaan perlu kewaspadaan, karena terkadang orang rela melakukan perbuatan yang dilarang oleh penetap hukum (*syāri'i*) untuk mengumpulkan harta yang sebanyak-banyaknya.

Harta yang diperoleh oleh manusia pada dasarnya harus dibedakan menjadi tiga kategori utama, yakni: harta halal, harta haram dan harta *syubhat*. Harta halal adalah semua jenis baik itu hak atau kewajiban yang diperoleh dengan cara-cara yang diridhai oleh Allah. Sebaliknya harta haram adalah benda atau barang yang diperoleh dengan jalan batil, sedangkan harta *syubhat* merupakan harta yang telah bercampur antara halal dan haram di

³ M. Muhyidin Abdul Hamid, *Panduan Waris Empat Mazhab*, (Jakarta: al-Kausar, 2009), hlm. 3.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saif Kasim Riau

dalamnya.⁴ Tiga jenis kategori harta di atas sangat penting untuk diidentifikasi atau dipilah-pilah, karena pada akhirnya harta ini akan dimanfaatkan baik untuk dikonsumsi maupun didistribusikan.

Konteks harta yang halal dalam proses pengumpulan maupun zatnya tidak memunculkan problem apabila dikonsumsi maupun didistribusikan kepada pihak lain.⁵ Namun apabila harta tersebut diperoleh dengan jalan yang batil atau zat dari harta tersebut dinilai haram maka akan menimbulkan efek buruk apabila dikonsumsi dan didistribusikan,⁶ sedangkan untuk harta *syubhat* terdapat perbedaan pendapat ulama terutama ulama mazhab empat dalam menentukan kadar kebolehan mengonsumsi harta tersebut, sebagian ulama menetapkan bahwa kebolehan atau tidaknya mempergunakan harta yang mengandung unsur *syubhat* tergantung kepada percampurannya. Apabila melebihi dari sepertiga percampuran antara zat haram dengan zat halal, maka harta tersebut dikategorikan haram untuk dipergunakan atau didistribusikan. Hal ini disebabkan percampuran zat haram sudah melebihi ukuran atau patokan yang ditetapkan oleh ulama yang berpandangan seperti yang telah disebutkan. Berbeda dengan sebagian ulama lain yang mengatakan bahwa percampuran antara harta halal dengan harta haram baik sedikit maupun banyak percampurannya, memanfaatkan *tirkah syuhat* tersebut tidak

⁴ Ahmad Abdul Ghaffar, *Agar Harta Tidak Menjadi Fitnah*, (Yogyakarta, Gema Insani, 2008), hlm. 32.

⁵ Muhammad bin Ahmad al-Qurthubi, *Tafsir al-Qurthubi*, Jilid V, (Riyadh: Dar al-'alam al-Kutubi, 2003), hlm. 27.

⁶ Ibnu Hajar al-Asqalani, *Fath al-Bari*, Jilid XI, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2002), hlm. 246-247.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

dibolehkan, artinya harta yang telah bercampur tersebut haram untuk dipergunakan.⁷

Tirkah secara definitif adalah segala jenis benda atau kepemilikan yang ditinggalkan oleh pewaris, baik berupa uang, tanah dan sebagainya.⁸

Tirkah dapat dibagikan kepada ahli waris yang berhak dengan ketentuan ilmu *faraidh* atau dengan ketentuan lainnya semisal pembagian kewarisan berdasarkan kesepakatan bersama masing-masing ahli waris. Apabila harta yang ditinggalkan oleh si mayyit ingin didistribusikan berdasarkan kesepakatan bersama, maka masing-masing ahli waris disyaratkan sudah mengetahui bagian atau *nashib* tertentu yang ditetapkan Al-Qur'an.

Hasil tinjauan penulis, ditemukan asas yang dianut hukum kewarisan Islam yaitu asas *ijbari*, asas *ijbari* tersebut adalah kepemilikan harta kekayaan berpindah tangan kepemilikan kepada ahli waris dengan sendirinya ketika seseorang meninggal dunia sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh *syari'*. Asas ini bersifat memaksa dan tidak dapat diubah sesuai dengan kehendak masing-masing ahli waris. Peralihan hak kepemilikan ini terjadi dengan sendirinya berdasarkan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah dalam ayat-ayat tentang kewarisan.⁹

⁷Pembahasan perselisihan pandangan para ulama ini akan dijelaskan penulis secara komprehensif dalam bab inti penulisan disertasi, yaitu bab empat. pada bab ini, penulis hanya memaparkan sebagian pendapatnya saja. agar terlihat dalam tulisan ini, bahwa perselisihan pandangan terkait masalah yang ingin diteliti betul nyata dikalangan para ulama mazhab empat.

⁸Muhammad 'Ali al-Shabuny, *Pembagian Waris menurut Islam*, (Jakarta: Gema Insani, 1995), hlm. 33.

⁹Suhrawardi K. Lubis dan Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 39.

State Islamic University of Sumatra Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU

Terapan asas *ijbari* dalam sistem kewarisan dipahami, bahwa apabila seseorang meninggal dunia, harta warisan dapat langsung dibagi kepada ahli waris walaupun pada *tirkah* yang akan didistribusikan tersebut terdapat *tirkah* yang mengandung unsur *syubhāt*. Hal ini terjadi karena asas *ijbari* yang dianut dalam sistem kewarisan Islam memandang bahwa status kepemilikan *tirkah* dengan sendirinya menjadi hak ahli waris apabila pewaris meninggal dunia. Artinya, secara otomatis status kepemilikan harta akan beralih tangan kepada ahli waris, tanpa harus memperhatikan dari mana harta peninggalan tersebut diperoleh pemilik sebelumnya.

Kenyataan yang digambarkan di atas sangat beresiko karena membagi *tirkah syubhāt* tanpa menelusuri dari mana harta tersebut berasal, besar kemungkinan unsur *syubhāt* yang terkandung dalam *tirkah* tersebut juga akan ikut terbagi kepada ahli waris. Padahal *tirkah syubhāt* dapat dikenali dengan cara menelusuri bagaimana pewaris memperoleh harta ketika masih hidup. Sebagai contoh seorang pemilik harta yang bekerja sebagai pegawai pajak mewariskan harta sebesar 10 milyar, sementara diketahui, semasa hidupnya ia tidak bekerja ditempat lain selain tempat kerjanya tersebut. Hal ini menunjukkan ketidak seimbangan antara pekerjaan dengan harta yang diperoleh. Contoh lain, seorang petani yang mewariskan harta milyaran, tetapi semasa hidupnya diketahui bahwa ia dekat dengan dunia perjudian. Hal ini menjadi salah satu indikasi adanya *syubhāt* dalam *tirkah* tersebut, hal ini dikarenakan karena sebab usahnya dalam mengumpulkan harta, yang satu dari sisi hasil pertanian dan satu sisi lainnya dari hasil

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

perjudian. Percampuran antara kedua hasil usaha yang telah disebut di atas, yang dianggap penulis sebagai harta syubhat, yang apabila meninggal pemiliknya akan menjadi *tirkah syubhāt*. Contoh lain, yang juga termasuk dalam *tirkah syubhāt* adalah apabila seseorang meninggal dunia, ia meninggalkan lima belas hektar tanah (15 Hektar) yang lengkap dengan surat jual beli tanahnya. Akan tetapi, dalam kenyataannya harta yang didistribusikan ahli warisnya sudah mencapai dua puluh hektar tanah. Tambahan lima hektar selanjutnya, ahli waris tidak mempunyai surat jual beli dari peninggalan pewarisnya.

Contoh pengumpulan harta yang disampaikan di atas, dalam kenyataannya apabila mengikuti aturan yang telah ada baik dalam kitab fikih, maupun aturan yang sudah ada di Indonesia semisal KHI, maka pada saat pembagian harta warisan ikut serta dibagikan kepada ahli waris harta yang mengandung unsur *syubhāt*. mengingat aturan yang berlaku dewasa ini belum mengatur tentang penelusuran ulang harta yang ditinggalkan oleh pemiliknya atau pewaris. Hal ini dianggap berbahaya bagi ahli waris yang akan meneruskan estafet kepelikan harta warisan tersebut, karena harta yang akan diterima ahli waris masih mengandung unsur *syubhāt* yang tentunya dalam kacamata hukum memiliki status yang tidak dapat dipastikan kehalalan atau keharamannya.

Gambaran yang telah disebutkan, menjadi titik utama letak permasalahan yang ingin diteliti lebih spesifik dalam tulisan ini. Kerena pada dasarnya tidak semua harta peninggalan di mana *tirkah* yang ditinggalkan

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saif Kasim Riau

Oleh pewaris dalam kondisi boleh didistribusikan secara langsung kepada ahli waris, didapati di antara *tirkah* yang mengandung unsur *syubhāt* atau status harta yang diperoleh oleh pewaris ketika ia masih hidup tidak dapat dipastikan kehalalannya karena kandungan *syubhāt* dalam *tirkah* tersebut.

Tirkah syubhāt merupakan harta yang diragukan statusnya halal atau haram. *Tirkah syubhāt* juga berarti harta yang ditinggalkan si mayyit bercampur antara yang halal dan yang haram.¹⁰ Oleh sebab demikian, dalam konteks *tirkah* yang diduga mengandung *syubhāt*, mengidentifikasi *tirkah* tersebut sebelum dibagikan kepada ahli waris dinilai sangat penting karena apabila *tirkah* yang diduga memiliki unsur *syubhāt* tersebut terbukti mengandung unsur haram, maka akan berpengaruh buruk bagi setiap individu yang akan menerima harta warisan tersebut. Seperti tidak terkabulnya do'a, lebih mudah terjebak ke dalam kemaksiatan dan efek buruk lainnya.¹¹ Hal ini terjadi karena harta yang ditinggalkan oleh orang yang sudah meninggal, apabila diketahui sumbernya haram dan atau *syubhat*, maka ia tetap pada hukum asalnya, yaitu haram.

Pernyataan di atas didukung oleh pendapat mayoritas ulama dari mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali, serta pendapat yang dipilih oleh Ibnu Taimiyyah yang menyebutkan bahwa kematian tidaklah menyebabkan

¹⁰ Al-Ghazali, *Mutiara Ihya 'Ulumuddin*, (terj. Irwan Kurniawan), (Bandung: Mizan, 2004), hlm. 149.

¹¹ Ibnu Taimiyah, *Majmū' al-Fatawā*, (Madinah: Muja'mma' al-malik Fahd, 1995), hlm. 26.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

harta yang haram berubah status menjadi halal.¹² Konsekuensi dari pendapat tersebut adalah apabila harta yang ditinggalkan oleh si mayit diperoleh dengan usaha pewaris mencampur adukkan harta halal dan haram yang menjadi satu kesatuan harta peninggalan, maka harta tersebut tetap berstatus *syubhāt*. Selanjutnya ketika harta tersebut diwariskan kepada ahli warisnya, tentu unsur *syubhāt* yang terkandung didalamnya tetap memiliki status yang sama, selama belum dipisahkan dari harta tersebut.

Penjelasan yang sama terkait penelusuran ulang harta *syubhāt* dapat dipahami dari keterangan dalam surat al-Nisa' ayat 11. Allah memerintahkan bahwa sebelum harta warisan dibagi, terlebih dahulu diselesaikan persoalan hutang piutang dan wasiat. Secara umum dapat dikatakan bahwa kedua hal tersebut harus diselesaikan sebelum pembagian harta warisan agar harta yang dibagikan kepada ahli waris bebas dari hak-hak orang lain.¹³ Memakan hak orang lain dengan jalan yang batil merupakan perbuatan yang diharamkan oleh Allah. Hal ini sekaligus menegaskan bahwa pentingnya membersihkan harta warisan yang mengandung unsur *syubhāt* sebelum dibagikan.

Allah memerintahkan kepada setiap orang yang beriman untuk mengkonsumsi harta yang diperoleh dengan jalan halal. Banyak hikmah dan faedah yang terkandung dalam perintah tersebut, salah satunya adalah untuk ketertiban dan kesejahteraan umat manusia di dunia. Mengkonsumsi harta yang baik akan lebih memberikan ketenangan dibandingkan dengan

¹² Al-Nawawi, *Majmu' Syarah Muḥadzab*, Juz IX, (Jeddah: Maktabat al-Irsyad, tt), hlm. 42.

¹³ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 207.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

mengkonsumsi harta yang diperoleh dengan jalan yang batil. Hasil dari mengkonsumsi harta yang baik akan memberikan efek yang baik bagi jiwa dan raga, sehingga cita-cita untuk mendapatkan generasi muslim yang unggul dapat diwujudkan.¹⁴

Penelitian ini, dengan memperhatikan bahwa aturan untuk melakukan praktek pembagian kewarisan baik yang ada dalam kitab-kitab fikih *turāst*, maupun yang ada dalam Kompilasi Hukum Islam¹⁵ (KHI) di Indonesia, belum

¹⁴ Ibnu Katsir, *Tafsīr Al Qur'ān Al 'Azhīm*, (Madinah: Mujaḥma' Malik Fahd, 1999), hlm. 126

¹⁵ Gagasan penyusunan kompilasi hukum Islam sebagai hukum materil di Peradilan Agama telah berlangsung sejak lama. Namun, cita-cita tersebut mulai mendapatkan respon serius sejak keluarnya SKB Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama No. 07/KMA/1985 dan Nomor 25 Tahun 1985 tanggal 25 Maret 1985 yang berisi tentang Penunjukan Pelaksanaan Proyek Pembangunan Hukum Islam melalui yurisprudensi. Atas dasar SKB tersebut dilakukan pengumpulan bahan kompilasi melalui tiga jalur: pertama, pengumpulan data melalui penelaahan dan pengkajian kitab-kitab standar hukum Islam yang dilakukan oleh tujuh IAIN, yaitu IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, IAIN, Sunan Ampel Surabaya, IAIN Ar-Raniry Banda Aceh, IAIN Antasari Banjarmasin, IAIN Alauddin Ujung Pandang, IAIN Imam Bonjol Padang, Kedua pengumpulan data melalui wawancara dengan para ulama yang pelaksanaannya dilakukan oleh 10 Pengadilan Tinggi Agama, ketiga, Pengumpulan data melalui perbandingan dengan beberapa Negara Islam seperti Maroko, Turki, dan Mesir, dan diakhiri dengan lokakarya tingkat nasional pada tanggal 2-5 Februari 1988 yang diikuti oleh para ulama, ahli hukum, kaum cendekiawan, dan para tokoh masyarakat. Setelah proses pengumpulan data kemudian data diolah oleh tim dan menghasilkan konsep/draf KHI. Selanjutnya, diadakan lokakarya nasional pada tanggal 2–6 Februari 1988 yang dihadiri para ulama dan cendekiawan muslim untuk membahas draf KHI. Hasil lokakarya kemudian disampaikan menteri Agama kepada Presiden untuk memperoleh bentuk yuridis. Pada awalnya KHI akan diperjuangkan menjadi Undang-Undang Hukum materiil di Peradilan Agama. Akan tetapi karena kondisi politik yang belum memungkinkan akhirnya KHI disahkan dengan inpres Nomor 1 Tahun 1991 pada tanggal 10 Juni 1991. Melalui Inpres ini presiden mengintruksikan kepada menteri Agama untuk menyebarluaskan KHI tersebut untuk dipergunakan oleh instansi pemerintah dan masyarakat luas yang membutuhkan. Kemudian menteri Agama melalui keputusan Nomor 154 tahun 1991 menetapkan tentang pelaksanaan inpres Nomor 1 Tahun 1991 dan menunjuk Dirjen Kelembagaan Agama Islam dan Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji untuk mengkoordinasikan pelaksanaan keputusan Menteri ini dalam bidang tugasnya masing-masing. Sejak saat itu, sosialisasi intens dilakukan kedua lembaga tersebut. Di samping itu Peradilan Agama pun ikut mensosialisasikan dan bahkan kemudian menjadikan KHI sebagai sumber rujukan dalam menangani perkara-perkara yang diterimanya hingga saat ini. Munculnya Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak terlepas dari peradilan agama, karena pengadilan agama merupakan lembaga sosial yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

mengikat untuk melakukan pemeriksaan satu harta yang haram dan atau harta yang bercampur antara yang halal dan haram yang telah ditinggalkan oleh pewaris, karena pembiaran ini dinilai peneliti tentu berakibat sangat fatal kepada ahli waris.

Islam menganjurkan penganutnya untuk memperhatikan harta yang akan dikonsumsi dan harta yang akan menjadi simpanannya, yang tentunya akan pindah kepemilikan, fungsikan atau dipindahkan kepemilikannya tatkala ia meninggal dunia kepada ahli warisnya. Oleh karena demikian, maka usaha untuk mengidentifikasi atau menelusuri harta peninggalan atau *tirkah* yang mengandung unsur haram dan atau *syubhāt* perlu dilakukan, sebagai upaya preventif atau pencegahan terhadap harta yang akan didistribusikan kepada ahli warisnya, agar tidak terjadi kesalahan yang kedua kalinya dan penerusan estafet kesalahan pewaris kepada ahli warisnya. Artinya kesalahan pewaris dalam usahanya untuk mencari harta atau menyimpan harta yang

bertujuan memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara yang diajukan oleh orang yang merasa dirugikan haknya oleh orang lain kepadanya (Pasal 49 UU No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama). Sebelum terbentuknya Kompilasi Hukum Indonesia terjadi perubahan penting dan mendasar yang telah terjadi dalam lingkungan Pengadilan Agama dengan disahkannya RUU-PA menjadi UU No 7 Tahun 1989, yang diajukan oleh menteri Agama Munawir Sjadzali ke sidang Dewan Perwakilan Rakyat. Diantara isinya sebagai berikut: Peradilan Agama telah menjadi peradilan mandiri, kedudukannya benar-benar telah sejajar dan sederajat dengan peradilan umum, peradilan militer, dan peradilan tata usaha Negara, nama, susunan, wewenang (kekuasaan) dan hukum acaranya telah sama dan seragam di seluruh Indonesia. Terciptanya unifikasi hukum acara Peradilan Agama akan memudahkan terwujudnya ketertiban dan kepastian hukum yang berintikan keadilan dalam lingkungan peradilan agama, Perlindungan kepada wanita telah ditingkatkan dengan jalan antara lain, memberikan hak yang sama kepada istri dalam proses dan membela kepentingannya di muka Peradilan Agama, lebih memantapkan upaya penggalian berbagai asas dan kaidah hukum Islam sebagai salah satu bahan baku dalam penyusunan dan pembinaan hukum nasional melalui yurispondensi, terlaksananya ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang pokok kekuasaan kehakiman, terselenggaranya pembangunan hukum nasional berwawasan nusantara yang sekaligus berwawasan Bhineka Tunggal Ika dalam bentuk Undang-undang Peradilan Agama.

Statistik Universitas Islam Sumatera Utara

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

mengandung unsur *syubhāt* yang status hukumnya belum jelas, tidak turun-temurun kepada ahli warisnya.

Bertolak dari uraian dan fenomena yang telah digambarkan di atas, maka menarik minat penulis untuk meneliti hal ini secara lebih spesifik. Penulis berusaha meninjau, menelaah dan menganalisis permasalahan ini untuk kemudian dirangkum dalam sebuah penelitian dalam bentuk disertasi dengan judul “**Hukum Kewarisan *Tirkah Syubhāt* dan Relevansinya dengan *Asas Ijbarī* Perspektif empat Mazhab**”

B. Definisi Istilah

Tulisan disertasi ini agar dapat dipahami oleh oleh pembaca secara menyeluruh, maka perlu adanya penjelasan beberapa istilah yang mampu membimbing pembaca untuk mengetahui maksud dari istilah yang digunakan dalam tulisan ini.

1. *Tirkah*

Tirkah secara definitif adalah segala jenis benda atau kepemilikan yang ditinggalkan oleh pewaris baik berupa uang, tanah dan sebagainya.¹⁶ *Tirkah* dapat berupa harta maupun hak yang telah ditinggalkan oleh pewaris setelah proses pelunasan kewajiban yang harus diselaikan oleh ahli waris. *Tirkah* merupakan istilah yang digunakan oleh *farādhīyūn* (pakar kewarisan) untuk menyebutkan istilah terhadap harta warisan. *Tirkah* mencakup beberapa hal berikut:

¹⁶ Al-Bujairimi, *Hasyiyah al-Bujairimi ‘Alā Syahrhi Minhaj al-Thālibin* (Mesir: Musthafa al-Halabi wa auladuhu, 1345 H), hlm. 24.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Kebendaan dan sifat-sifat yang mempunyai nilai kebendaan. Misalnya benda-benda tetap, benda-benda bergerak dan hutang-piutang si mayit yang menjadi tanggungan orang lain, semua hal yang telah disebutkan dapat dikategorikan *tirkah*.
- b. Hak-hak kebendaan, seperti hak monopoli untuk mendayagunakan dan menarik hasil dari suatu jalan, sumber air minum, irigasi pertanian, perkebunan, dll.
- c. Hak-hak yang bukan kebendaan, seperti hak *khiyar* yakni hak untuk memilih barang yang akan dibeli, dan hak *syuf'ah* yakni hak beli yang diutamakan dari salah seorang anggota serikat atau tetangga atas tanah, pekarangan atau lain sebagainya.¹⁷

2. Kewarisan

Waris berasal dari kata *waratsa* dengan bentuk *madhi* (kata kerja yang menunjukkan waktu yang telah laupau). Dalam kamus *lisān al-‘Arab* kata *warasa* diterjemahkan dengan *warisahu malahu* (mewariskan sesuatu yang dimilikinya).¹⁸ Ahmad Warshan dalam kamusnya juga menterjemahkan kata *waratsa* dengan arti mendatangkan, menyebabkan dan memberikan.¹⁹ Secara etimologi kata *waratsa* berarti perpindahan sesuatu dari satu orang ke orang lain, satu kelompok ke kelompok yang lainnya, baik berupa harta warisan, ilmu, maupun karisma. Kata *waratsa*

¹⁷M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Fiqh Mawaris*, (Semarang: Pustaka Riski Putra, 1999), hlm. 23-27.

¹⁸Ibnu Mandhur, *Lisān al-‘Arab*, (kairo: Dar Al-Ma’arif, t.th), hlm. 4808.

¹⁹Muhammad Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah/ Penafsiran Al-Qur’an, 1972), hlm. 496.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

asal kata kewarisan digunakan dalam Al-Qur'an. Makna kedua dari kata *waratsa* adalah: memberi, hal ini sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'ansurah al-Zumar ayat 74:

Artinya: *dan mereka mengucapkan: "Segala puji bagi Allah yang telah memenuhi janji-Nya kepada kami dan telah (memberi) kepada kami tempat ini sedang kami (diperkenankan) menempati tempat dalam syurga di mana saja yang kami kehendaki; Maka syurga Itulah Sebaik-baik balasan bagi orang-orang yang beramal".*

Makna ketiga kata *waratsa* adalah: mewarisi,²⁰ makna mewarisi sebagaimana disebutkan Al-Qur'anpada surah Maryam ayat 6. Dari ketiga makna yang dipaparkan penulis sebelumnya maka, yang dipandang paling relevan dengan pembahasan adalah makna yang ketiga yaitu mewarisi yang dalam konteks permasalahan yang diangkat penulis adalah mewarisi harta yang ditinggalkan pewaris.

Pengertian kewarisan secara terminologi mempunyai definisi yang beragam, diantaranya seperti yang akan disebutkan berikut: al-Qalyubi dan al-'Umairah mendefinisikan, kewarisan atau *faraidh* adalah *jama'* (*flural*) dari kata *farīdhah* yang memiliki makna suatu bagian yang telah ditentukan.²¹ Ali al-Shabuni mendefinisikan kewarisan:

²⁰ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islama di Indonesia*, cet. 1. Edisi Revisi (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 283.

²¹ Al-Qalyubi dan Al-'Umairah, *Hasyiatani 'ala Minhaj Al-Thalabin* (Bairut: Dar al-Fikr, Juz 3, T.tt), hlm. 134.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berpindahannya hak kepemilikan dari orang yang meninggal kepada ahli warisnya yang masih hidup, baik yang ditinggalkan itu berupa harta (uang), tanah atau apa saja yang berupa hak milik legal secara *syar'i*.²²

Wahbah al-Zuhaili mendefinisikan waris atau warisan (*mîrâts*) sama dengan makna *tirkah* yaitu ما خلفه الميت من الاموال والحقوق التي يستحقها بموته. Artinya: segala sesuatu yang ditinggalkan oleh seseorang sesudah wafat, baik berupa harta yang bersifat materi dan nonmateri.²³ Menurut Wirjono Prodjodikoro, kewarisan adalah soal apakah dan bagaimanakah pelbagai hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang pengelolaan kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang yang masih hidup.²⁴

Keterangan definisi yang telah dikemukakan oleh penulis di atas, dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan kewarisan adalah proses pendistribusian harta yang dimiliki pewaris baik yang berbentuk materil maupun non materil, kepada ahli warisnya pada saat pemiliknya meninggal dunia, dengan memperhatikan bahagian masing-masing ahli waris sesuai dengan apa yang telah ditetapkan oleh ayat Al-Qur'an.

3. *Syubhāt*

²²Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Pembagian Waris Menurut Islam*, Terj. Basalamah, (Jakarta: Gema Insani Pres, 1995), hlm. 33.

²³ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqhu al-Islami Wa Adillatuh*, (Bairut: Dar-al-Fikri, 2002), hlm. 76.

²⁴Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Warisan di Indonesia*, (Bandung: Sumur Bandung, 2006), hlm. 13.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Syubhāt adalah perkara yang masih samar-samar status hukum kehalalan maupun keharamannya sehingga orang menjadi ragu untuk menentukan halal dan haramnya konsekuensi hukum penggunaannya. Dari penjelasan di atas diketahui bahwa yang dimaksud dengan *tirkah syubhāt* adalah harta warisan yang diragukan apakah statusnya halal atau haram. Keraguan tersebut berasal dari ketidak tahuan ahli waris dari mana dan bagaimana harta tersebut didapatkan oleh pewarisnya.²⁵

Pemilihan *tirkah syubhāt* sebagai objek penelitian dilakukan, karena penulis menilai bahwa *tirkah syubhāt* merupakan sesuatu yang perlu untuk dikaji lebih spesifik. Hal ini disebabkan status hukum menggunakan *tirkah syubhāt* tersebut yang masih diperselisihkan oleh kalangan ulama terutama mazhab empat. Berbeda halnya, dengan *tirkah* yang kehalalan atau keharamannya sudah jelas dimata hukum. Terlebih pada zaman sekarang ini, terdapat kasus di mana orang memiliki sumber pendapatan yang bercampur aduk antara halal dan haram, berupa menerima uang suap, memakan riba, atau semisalnya, namun di sisi lain dia memiliki sumber pendapatan yang halal. Hal ini sangat urgen untuk dikaji karena pemisahan harta tersebut harus dilakukan agar jelas bagian mana yang boleh dikonsumsi.

Mazhab Empat

²⁵Al-Nawawi, *Terjemahan Riyadus Shalihin*, (Jakarta: Pustaka Amani,1999), hlm. 558.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Mazhab²⁶ dalam bahasa Arab berasal dari kata: **مذهب** (mazhab) adalah istilah dari bahasa Arab, yang berarti jalan yang dilalui dan dilewati, sesuatu yang menjadi tujuan seseorang baik konkrit maupun abstrak. Sesuatu dikatakan mazhab bagi seseorang jika cara atau jalan tersebut menjadi ciri khasnya. Menurut para ulama yang dinamakan mazhab adalah metode (*manhaj*) yang dibentuk setelah melalui pemikiran dan penelitian, kemudian orang yang menerapkan menjadikannya sebagai pedoman yang jelas batasan-batasannya, bagian-bagiannya, dibangun di atas prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah. Mazhab menurut ulama fikih, adalah sebuah metodologi fikih khusus yang dijalani oleh seorang ahli fikih mujtahid, yang berbeda dengan ahli fikih lain, yang menyebabkan memilih sejumlah hukum dalam kawasan ilmu furu' (ilmu cabang). Pengertian mazhab seperti yang telah disebutkan merupakan pengertian mazhab secara umum, bukan suatu mazhab khusus. Mazhab yang

²⁶ “mazhab” menurut bahasa Arab, berasal dari *shighat masdar mimy* (kata sifat) dan isim makan (kata yang menunjukkan keterangan tempat) dari akar kata *fi’il madhy* “*dzahaba*” (ذهب) yang bermakna pergi. Jadi, mazhab secara bahasa artinya, “tempat pergi”, yaitu jalan (*ath-tharīq*). Sedangkan menurut istilah terdapat beberapa pengertian mengenai mazhab, di antaranya adalah: Menurut M. Husain Abdullah, mazhab adalah kumpulan pendapat mujtahid yang berupa hukum-hukum Islam, yang digali dari dalil-dalil syariat yang rinci serta berbagai kaidah (*qawa’id*) dan landasan (*ushul*) yang mendasari pendapat tersebut, yang saling terkait satu sama lain sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh. Menurut A. Hasan, mazhab adalah mengikuti hasil ijtihad seorang mujtahid tentang hukum suatu masalah atau tentang hukum suatu masalah atau tentang kaidah kaidah *istinbathnya*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

digunakan secara luas saat ini antara lain mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali dari kalangan Sunni. Sementara kalangan Syi'ah memiliki mazhab Ja'fari, Ismailiyah dan Zaidiyah. Dalam hal ini yang dimaksud oleh penulis mazhab empat adalah apa saja yang disandarkan kepada mazhab empat. Artinya pandangan-pandangan atau pendapat yang telah mereka tuangkan dalam kitab atau buku yang telah ditulis oleh empat mazhab yang menjadi pijakan penulis dalam membahas permasalahan yang akan diteliti.

C. Kerangka Pikir

Islam menganjurkan ummatnya untuk mencari harta halal. Mencari harta yang halal hukumnya adalah wajib, hal ini seperti yang telah disampaikan oleh Allah pada surah al-Baqarah ayat 47:

Larangan untuk mencampur adukkan antara harta halal dengan haram, pada surah yang telah penulis sebutkan terdapat pada kalimat *walā talbisu al haqqa bi al-bāthilili wa taktumū na al-haqqa wa antum ta'lamūn*.

Larang pada ayat di atas, bersifat umum, artinya mencakup seluruh aspek kehidupan. Keterangan larangan yang bersifat umum sebelumnya tentunya juga termasuk aspek menerima harta yang telah dicampur adukkan oleh pewaris pada saat ia masih hidup. Oleh karena demikian, ahli waris dengan maksud menjaga darinya dari mengkonsumsi harta yang samar-samar, perlu mengidentifikasi harta peninggalan sebelum prosesi pembagian harta warisan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saifuddin Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penjelasan di atas, juga sama keterangannya sebagaimana yang disabdakan Rasulullah dalam hadistnya yang diriwayatkan oleh Ibn Mas'ud yang berbunyi:

طلب الحلال فريضة على كل مسلم²⁷

Artinya: *bahwa mencari yang halal atau mencari sesuatu yang halal adalah wajib bagi setiap muslim.*

Beranjak dari hadist tersebut, maka dalam proses pembagian harta warisan, kepada ahli warisnya lanyaknya harus lebih utama dilakukan pemeriksaan atau pengidentifikasian harta yang ditinggalkan oleh pewarisnya sebelum didistribusikan kepada ahli waris yang berhak. Hal ini dianggap perlu agar tidak terjadinya kesalahan yang berkelanjutan. Secara teori yang telah dijelaskan oleh para ulama ada tiga hal yang harus dilakukan sebelum pelaksanan pembagian harta warisan,²⁸ diantaranya adalah: pengurusan jenazah (*tajhiz al-mayyit*) yang telah wafat, dimulai dari pemandiannya, mengkafaninya, hingga menguburkannya Setelah prosesi ini dilakukan, maka hal kedua yang harus dilaksanakan oleh ahli waris adalah melunasi utang piutang, baik utang yang berkaitan dengan Allah atau utang berkenan dengan manusia. Setelah hal kedua diselasaikan hak yang ketiga yang harus dilaksanakan adalah memberikan wasiat apabila pewaris meninggalkan wasiat. Apabila ketiga hal ini telah dilaksanakan maka baru akan dapat dilakasakan pembagian harta warisan.

²⁷ Jalaluddin al Suyuthi (911 H), *'ijazu al-Qur'an wa mu'taraku al-aqrān*, (Bairut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1988), hlm. 476. Lihat juga Abi Bakar al-'Iraqi (806 H), *Al-Ma'na fi hamala al-asfar fi al-asfar fi thakhrij ma fihi min al-akhbar*, (Bairut: Dar Ibnu Hazmen, 2005), hlm. 535.

²⁸ Muhibbin dan Abdul Wahid, *hukum kewarisan Islam Sebagai Pembaharuan Hukum Positif di Indonesia*, hlm. 125.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Mencermati ketiga hak-hak yang harus dipenuhi oleh ahli waris sebelum pelaksanaan pembagian harta warisan yang telah digambarkan di atas, dapat dipahami bahwa: apabila harta peninggalan pewaris yang ingin dibagikan masih terkandung unsur *syubhāt*, tentu tidak perlu untuk dipilah-pilah atau dipisahkan dari harta yang ingin dibagikan kepada ahli warisnya. Sebagai contoh. Harta yang diusahakan oleh pewaris dengan cara korupsi atau lain sebagainya, oleh pewaris dicampur adukkan dengan hasil penghasilan dari usaha atau kerjanya yang sesuai dengan ketentuan syar'i atau ketetapan hukum.

Paparan penjelasan yang digambarkan di atas tentu akan memunculkan problematika, di antaranya adalah anggapan bahwa kesalah pewaris dalam mencari harta yang mengandung unsur *syubhāt* atau unsur yang haram, status *syubhāt*nya atau status tidak tentu (halal atau haram) harta peninggalan tersebut dianggap hilang ketika pewaris meninggal dunia merupakan anggapan yang tidak tepat. Hemat penulis, agar status harta *syubhāt* seperti yang telah digambarkan di atas tidak menimbulkan polemik yang berlarut-larut kepada ahli waris, Maka, perlu adanya suatu ketetapan hukum yang bersifat tegas, bahwa dalam prosesi pembagian warisan perlu peninjauan ulang terhadap harta yang akan dibagikan kepada ahli waris, sehingga harta yang akan didistribusikan kepada ahli waris benar-benar terjaga dari unsur haram atau unsur *syubhāt*.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Rumusan Masalah

Sebagaimana telah dijelaskan bahwa asas *ijbari* yang terdapat dalam hukum waris Islam menentukan peralihan harta warisan kepada ahli waris berlaku secara *ijbari* (memaksa). Hal ini berimbas pada kelalaian untuk menelusuri sumber harta tersebut sehingga untuk pendistribusian antara harta yang halal dan haram besar kemungkinan terjadi pada saat prosesi pembagian harta warisan. Hal ini urgen untuk dikaji, karena seorang muslim hanya dibolehkan untuk mengkonsumsi sesuatu yang diperoleh dengan cara yang halal.

Penelitian ini ingin mencoba menjawab persoalan yang telah digambarkan sebelumnya melalui beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana substansi *tirkah syubhāt*?
2. Bagaimana relevansi *tirkah syubhāt* dengan asas *ijbari* dalam kewarisan Islam?
3. Bagaimana hukum mewarisi *tirkah syubhāt* perspektif empat mazhab?

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Sejalan dengan pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui substansi *tirkah syubhāt*.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa relevansi *tirkah syubhāt* dengan asas *ijbari* dalam kewarisan Islam.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

3. Untuk menganalisa hukum mewarisi *tirkah syubahāt* dalam perspektif ulama empat mazhab.

Suatu penelitian yang dilakukan harus mempunyai hasil yang bermanfaat, baik manfaat akademis maupun manfaat yang dapat dirasakan oleh masyarakat. Adapun manfaat penelitian tentang kedudukan harta *syubhāt* dalam kewarisan Islam ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat akademis

Secara akademis, penelitian ini mempunyai manfaat sebagai pengembangan ilmu pengetahuan. Selama ini pembicaraan mengenai halal dan haram hanya mengakomodasi harta yang dikonsumsi oleh seseorang ketika masih hidup, sangat jarang didapati tulisan yang membicarakan mengenai status harta peninggalan yang ditinggalkan pewaris. Tulisan ini mencoba untuk memberikan suatu terobosan baru terkait harta peninggalan: bahwa harta warisan yang diduga mengandung unsur *syubhāt* perlu diidentifikasi dan atau ditelusuri ulang sebelum proses pendistribusiannya kepada ahli waris, agar terbebas dari unsur *syubhāt*.

2. Manfaat untuk masyarakat

Sebagai penelitian sosial, penelitian ini tentu memiliki manfaat terhadap masyarakat yakni:

- a. Masyarakat bisa mengetahui perihal kewajiban untuk membersihkan harta warisan *syubhāt* sehingga setiap harta warisan yang akan diwarisi memberikan efek yang baik bagi jiwa dan raga.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Terciptanya sifat *wara'* pada masyarakat muslim agar terbebas dari perkara-perkara *syubhāt* yang dapat menjerumuskan kepada sesuatu yang diharamkan oleh Allah.
- c. Terciptanya masyarakat muslim yang sehat jasmani dan rohani sehingga cita-cita untuk mendapatkan generasi muslim dan muslimah yang unggul dalam segala bidang dapat diwujudkan.
- d. Masyarakat yang berstatus sebagai ahli waris bisa mengetahui bagaimana membersihkan harta warisan yang akan diwarisi untuk menghindari keharaman dalam harta warisan.

F. Tinjauan Kepustakaan/Tinjauan Penelitian yang Relevan

Suatu penelitian yang dilakukan harus mempunyai tempat di antara penelitian lainnya yang membahas permasalahan yang sama. Begitu juga dengan penelitian ini, secara umum penelitian ini berbicara seputar harta warisan yang dikaitkan dengan unsur *syubhat* dalam harta tersebut. Banyak buku, tesis, jurnal, dan berbagai jenis karya tulis lain yang juga berbicara seputar permasalahan ini antara lain buku Ali al-Shabuni tentang Hukum Waris dalam Islam. Buku ini menjadi rujukan terbanyak dalam bidang ilmu waris. Bahan rujukan yang dapat diambil dalam buku ini berkenaan dengan masalah yang diteliti adalah tentang *tirkah* dalam hukum kewarisan Islam.

Buku Hukum Kewarisan karya Amin Husein yang secara garis besar membahas mengenai kewarisan pada umumnya. Begitu juga dengan buku Amir Syarifuddin dengan judul Hukum Kewarisan Islam, sesuai dengan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Judulnya buku ini juga membahas tentang kewarisan yang fokus pada kewarisan dalam Islam.

Kitab yang dikarang oleh al-Ghazali dengan judul *Ihya'Ulumuddin* juga berkaitan dengan masalah yang diteliti. Dalam kitab ini didapati pembahasan mengenai kedudukan harta *syubhat*. Selain itu kitab *al-Halal wa al-Haram Fi al-Islam* yang tulis oleh Yusuf Al-Qardhawi juga menjadi rujukan karena dalam kitab tersebut juga terdapat pembahasan mengenai kategorisasi *syubhat*.

Selain itu terdapat beberapa karya ilmiah yang berbicara seputar harta warisan. Salah satunya tesis karya Ria Desviantanti dengan judul *Perlindungan Hukum terhadap Harta*. Dalam tesis ini ada beberapa hal yang berkaitan dengan tulisan ini yakni mengenai status harta dalam Islam. Kendati demikian, terdapat perbedaan yang sangat signifikan antara tulisan di atas dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti dalam disertasi ini. Perbedaannya adalah Ria Desviantanti hanya memaparkan tentang harta secara umum yang kemudian dikaitkan dengan perlindungan hukum, sedangkan penelitian yang dilakukan penulis lebih memfokuskan untuk mengungkapkan tentang kewarisan *tirkah* yang mengandung unsur *syubhāt* yang penulis kaitkan dengan pandangan mazhab empat.

Beberapa literatur yang telah disebutkan memang terdapat pembahasan mengenai harta warisan (*tirkah*), namun pembahasan mengenai *tirkah* dalam buku-buku tersebut hanya fokus kepada *tirkah* sebagai salah satu rukun dan tata cara pembagian harta warisan dan bentuk harta warisan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Adapun tulisan yang ingin penulis kembangkan mencoba untuk memunculkan wacana baru yang dinilai urgen yakni mengenai pemisahan *tirkah syubhāt* dan relevansinya terhadap asas *ijbari* dalam kewarisan Islam yang ditinjau dalam perspektif mazhab empat.

Salain dari karya ilmiah yang telah disebutkan sebelumnya, terdapat beberapa karya ilmiah yang membahas tentang kewarisan, seperti halnya jurnal yang ditulis oleh Tedi Supriadi dengan judul *reinterpretasi kewarisan Islam bagi perempuan*.²⁹ Tulisan Tedi ini, hanya membahas tentang keadilan bahagian anak perempuan dalam kewarisan yang dikaitkan antara intepretasi ulama klasik dengan konteks zaman modren. Artinya karya ilmiah tersebut sangat berbeda dengan penelitian yang akan penulis lakukan. Penulis dalam disertasi ini lebih memfokuskan terhadap harta *syubhat* dan relevansinya terhadap asas *ijbari* dalam kewarisan Islam.

Pembaharuan pemikiran dalam kewarisan Islam, disertasi yang sudah dibukukan oleh kencana putra ditulis oleh. Syamsul Bahri memunculan pembahasan dalam disertasi sebagai berikut:

- a. Penulis dalam bukunya ini hanya menyebutkan pembaharuan pemikiran dalam hal kewarisan yang dikaitkan dengan putusan pengadilan dalam ruang lingkup pengadilan Agama.

²⁹Tedi Supriadi, *reinterpretasi kewarisan Islam bagi perempuan*, (Jurnal sosiorelegi, Vol 14 No. 2, Edisi September 2016)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- b. Pembaruan yang dimaksud dalam tulisan tersebut adalah hanya berkuat pada pembahasan tertentu seperti permasalahan bahagian antara kewarisan anak perempuan dan laki.

Apabila mencermati tulisan yang telah ditulis oleh Syamsul Bahri di atas, tentunya sangat berbeda dengan apa yang akan penulis kemukakan dalam tulisan disertasi ini, memang sama-sama ingin mencari pembaharuan dalam kewarisan, akan tetapi penulis lebih kepada pembaharuan sebelum harta warisan didistribusikan kepada ahli waris. berbeda halnya dengan Syamsul Bahri yang mencari pembaharuan kewarisan dalam proses pembagian harta warisan yang bertitik tumpu pada tiga permasalahan bagian kewarisan: bagian anak perempuan dalam kewarisan, kedudukan anak angkat dalam kewarisan, dan kewarisan ahli waris yang berlainan agama dengan pewarisnya.

Jurnal dengan Judul *Eksistensi harta Haram Dalam Islam* (Suatu kajian Analisi Teoritis), oleh: Rizal³⁰.

Rezal dalam jurnalnya ini menyimpulkan beberapa hal diantaranya: bahwa para ulama fikih juga membagi harta milik masyarakat sebagai berikut: (a) harta yang khusus untuk diperuntukkan bagi kemaslahatan bersama, seperti tempat-tempat ibadah, pemakaman, jembatan, jalan umum dan sarana-sarana pendidikan; (b) harta yang khusus untuk digunakan bagi kepentingan umum, seperti harta wakaf atau harta yang termasuk ke dalam

³⁰Rizal, *Eksistensi harta Haram Dalam Islam* (Suatu kajian Analisi Teoritis) Vol, 9. No. I Februari, 2015.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

milik negara; (c) harta seseorang yang manfaatnya diperuntukkan bagi kepentingan umum, seperti tanah wakaf yang diwakafkan seseorang untuk diambil hasilnya, serta tanah-tanah negara yang boleh dipergunakan masyarakat.

Walaupun dalam jurnal di atas menyebutkan tentang pembahasan harta, akan tetapi belum disebutkan secara spesifik mengenai *tirkah* yang mengandung unsur *syubhāt* yang kemudian dikaitannya dengan kewarisan harta tersebut. Oleh karena demikian, tentu terdapat perbedaan yang sangat signifikan antara tulisan di atas dengan penelitian yang akan dilakukan penulis dalam disertasi ini.

Jurnal yang ditulis oleh Tedi Supriadi, dengan Judul *reinterpretasi kewarisan Islam bagi perempuan*.³¹

Adapun kesimpulan dalam jurnal ini adalah:

1. Hukum waris merupakan persoalan yang sangat penting dalam kehidupan manusia sebab ia merupakan urusan yang menempati posisi setengah urusan kehidupan jika hukum yang lain mengatur urusan manusia pada waktu hidup urusan warisan mengatur masalah harta setelah kematian yang ruang lingkup kajiannya adalah, harta, porsi atau bagian masing masing, kapan dan bagaimana harta tersebut didistribusikan.

³¹ Tedi Supriadi, *reinterpretasi kewarisan Islam bagi perempuan*, (Sosiorelgi: Vol, 14, No. 2), Edisi September 2016

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Hukum waris pada dasarnya adalah respon social atas bangunan social yang terjadi pada masa diturunkannya ayat waris yang bertujuan menciptakan kemashlahatan ditengah-tengah masyarakat tersebut dengan mengintegrasikan nilai-nilai *maqashid al-syariah*.
3. Sebagai suatu disiplin Ilmu, hukum waris dibangun atas asas-asas yang penuh dengan muatan filosofis sehingga satu sama lain saling berkaitan,
4. Terdapat perbedaan persepsi mengenai keadilan dalam hukum waris antara ulama klasik dan kontemporer khususnya para pejuang gender. Konstruksi sudut pandang interpretasi ulama klasik khususnya terhadap hak waris perempuan sangat tekstual. Ketentuan-ketentuan yang ada pada Al-Qur'an dianggap sebagai *hudud* Allah yang baku, sehingga tidak bias dirubah. Hal ini menjadikan ketentuan hukum kewarisan 2:1 terus dilestarikan sampai sekarang, meskipun konteksnya sudah berbeda. Bagian lelaki tetap dua kali bagian perempuan, berbeda dengan misionaris gender yang menginterpretasikan Al-Qur'an dengan menyelaraskan teks dengan konteks sehingga Al-Qur'an tetap respon akan setiap perubahan konstruksi social berdasarkan hal itu, dalam pandangan ulama kontemporer dengan paham genderisme memandang bahwa metode *istinbath* hukum klasik yang kurang memperhatikan konteks historis teks terbukti tidak mampu berdialektika dengan dunia kontemporer.
5. Persamaan antara laki-laki dan perempuan dalam hak waris dapat diterapkan dengan catatan khusus yakni perempuan dalam tatanan ekonomi menjadi tulang punggung keluarga, penerapan 1:1 dapat

diterapkan dalam kondisi-kondisi tertentu atau dalam kondisi darurat atau kesempatan dan adanya kesepakatan diantara ahli waris setelah masing-masing sadar akan bagiannya masing-masing.

penelitian di atas, yang sangat mendasar dibahas dalam penelitiannya adalah mengenai hibah dan posibilitas pembatalannya. Artinya walaupun dalam kedua tulisan tersebut didapati pembahasan tentang praktek pembagian harta warisan, akan tetapi belum menyentuh pembahasan mengenai *tirkah syubhāt* dan relevansinya terhadap asas *ijbari* dalam kewarisan Islam perspektif empat mazhab. Oleh karena demikian, penulis barkeinginan untuk menelaah dan meneliti lebih lanjut mengenai pembahasan terkait *tirkah syubhāt* dan relevansinya terhadap asas *ijbari* dalam kewarisan Islam perpektif mazhab empat.

G. Sistematika Pembahasan

Pembahasan proposal disertasi ini dibagi ke dalam lima bab yang saling berkaitan satu sama lain. Bab pertama merupakan pendahuluan yang berisi pembahasan tentang latar belakang masalah, definisi Istilah yang terdapat dalam tulisan, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan kepuskakaan, kajian teoritik sebagai landasan penelitian dalam membangun ide dan prediksi hasil yang ingin dicapai, metode yang digunakan dalam meneliti permasalahan, dan sistematika yang diaplikasikan dalam pembahasan.

Bab dua membicarakan tentang *ijbari* dalam kewarisan Islam. Pembahasan ini dipisahkan menjadi tiga sub bab yakni; asas-asas kewarisan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

dalam Islam, *ijbari* sebagai bahagian dari asas kewarisan Islam, dan penerpan asas *ijbari* dalam pembagian harta warisan.

Bab tiga dalam disertasi ini akan membahas seputar permasalahan kedudukan *tirkah syubhat* dalam kewarisan Islam yang meliputi *tirkah* dalam kewarisan Islam yang mempunyai anak sub bab, yaitu; pengertian *tirkah*, bentuk-bentuk *tirkah*, dan tata cara pembagian *tirkah*. Kemudian bab ini juga membahas tentang *tirkah syubhat* dan pandangan ulama mazhab empat tentang *tirkah* yang mengandung unsur *syubhat*.

Sebagaimana yang telah dijelaskan bahwa tulisan ini mencoba menjelaskan kedudukan harta *syubhat* sebagai *tirkah* dan pengaruhnya terhadap asas *ijbari*. Oleh sebab itu dalam bab empat dibahas mengenai kewarisan *tirkah syubhat* dalam perspektif empat mazhab yang meliputi sub bab; biografi ulama mazhab empat, esensi, substansi dan kedudukan *tirkah syubhat* dalam kewarisan, kewarisan *tirkah syubhat* dalam perspektif ulama empat mazhab dan identifikasi *tirkah syubhat* dalam praktek kewarisan Islam

Bab lima yang menjadi akhir pembahasan ini ditutup dengan bab penutup yang terdiri dari kesimpulan sebagai hasil dari penelitian ini, serta rekomendasi dari hasil penelitian yang ditujukan ke berbagai pihak terkait dan pengambil kebijakan yang bersifat konstruktif.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



BAB II LANDASAN TEORETIS

A Kerangka Teori

Keberadaan peraturan perundang-undangan dalam masyarakat hukum merupakan sebuah keniscayaan. Fungsinya untuk mengatur, memberikan jaminan, dan kepastian hukum kepada masyarakat sebagai suatu ikatan hukum. Keberadaan hukum yang dimaksud dalam penelitian ini adalah ketentuan hukum yang mengatur tentang peralihan harta dari orang yang meninggal dunia (pewaris) kepada ahliwarisnya yang dalam Islam dikenal dengan fikih mawaris, sedangkan permasalahan dewasa ini dalam hukum positif dikenal sebagai hukum kewarisan.

Penerapan fikih mawaris dalam masyarakat Islam merupakan *sunnatullah* dalam menyelesaikan sengketa waris dalam ranah keluarga.

Adapun penerapan hukum kewarisan di pengadilan merupakan bagian dari penerapan tata hukum positif di Indonesia, yang dapat dibedakan dalam dua tahap, yaitu tahap pemaparan (yang berintikan interpretasi) dan tahap sistematisasi. Mochtar Kusumatmadja mengatakan bahwa “Tugas ilmu pengetahuan hukum positif adalah untuk menyusun fakta-fakta mengenai kaidah hukum menjadi suatu kesatuan yang sistematis yang dijadikan pedoman dalam mengambil keputusan”.¹

¹Mochtar Kusumatmadja, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Unpublished draft, 1996), hlm. 11.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Value hukum Islam yang termaktub dalam al-Qur'an dan sunnah yang bersifat universal dan abadi adalah sumber utama legislasi hukum Islam, agar mempunyai kekuatan hukum memaksa. Fikih mawaris yang disusun oleh para fuqaha yang berlandaskan pada al-quran dan hadist, kemudian diundangkan oleh pemerintah dalam bentuk aturan tertulis yang digolongkan dalam aturan negara yang dikenal dengan Kompilasi Hukum Islam. Dengan cara inilah fiqh Islam dimasukkan dalam sebuah perundang-undangan, sehingga mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Untuk memperoleh daya ikat hukum, maka dalam suatu negara, norma hukum senantiasa tersusun secara hirarkis, berjenjang, berlapis dan berkelompok, sebagaimana teori yang dinyatakan oleh Hans Nawiansky yaitu:

1. *Staats fundamental norm* (norma fundamental negara) ialah norma tertinggi suatu negara yang tidak dibentuk berdasarkan norma lain yang lebih tinggi, melainkan ditetapkan lebih dahulu oleh masyarakat.
2. *Staats grund gesetz* (aturan dasar/aturan pokok negara) ialah aturan-aturan yang bersifat pokok, umum, mengatur hal-hal dalam garis besarnya dan masih merupakan norma tunggal yang belum disertai norma sekunder.
3. *Formell Gesetz* (Undang-undang Formal) ialah norma-norma hukum yang terdapat dalam undang-undang yang sudah merupakan norma konkrit, terperinci dan langsung berlaku bagi masyarakat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saifur Razi

4. *Verordnung dan autonome satzung* (aturan pelaksana dan aturan oronom) merupakan peraturan-peraturan pelaksanaan yang berfungsi untuk menyelenggarakan ketentuan-ketentuan undang-undang.²

Penegakan hukum pada prinsipnya harus dapat memberi manfaat atau berdaya guna (*utility*) bagi masyarakat, namun di samping itu masyarakat juga mengharapkan adanya penegakan hukum untuk mencapai suatu keadilan. Kendatipun demikian tidak dapat dipungkiri, bahwa apa yang dianggap berguna (secara sosiologis) belum tentu adil, begitu juga sebaliknya apa yang dirasakan adil (secara filosofis), belum tentu berguna bagi masyarakat.

Dalam kondisi yang demikian ini, masyarakat hanya menginginkan adanya suatu kepastian hukum, yaitu adanya suatu peraturan yang dapat mengisi kekosongan hukum. Kekosongan hukum atau *rechtvakum* yang dimaksud dalam penelitian ini adalah mengenai kedudukan harta yang mengandung unsur *syubhāt*, apakah boleh diwarisi dan mewariskan? Pengaturan yang rinci seputar kedudukan harta atau *tirkah* yang mengandung unsur *syubhāt* ini dalam sistem hukum Indonesia tidak ditemukan secara jelas. Kenyataan masalah hukum seperti ini memaksa pemerintah untuk segera membuat peraturan yang bersifat mengikat dan memiliki daya tahan yang utuh dalam masyarakat.

²Sirajuddin, dkk, *Legislative Drafting: Pelaksanaan Metode Partisipatif dalam Pembuatan Peraturan Perundang-undangan*, (Malang: Malang Corruption Watch dan YAPPIKA, 2006), hlm. 30.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Oleh karena demikian, untuk menjelaskan hukum kewarisan *tirkah syubhāt* dan relevansinya dengan asas *ijbari* dalam kewarisan Islam perpektif empat mazhab, penulis memilih kerangka teori: teori perubahan hukum, teori efektifitas hukum, teori aplikasi, teori kemaslahatan dan teori tujuan hukum. Keselurun teori yang telah dipaparkan sebelumnya akan diuraikan satu persatu pada pembahasan berikut ini.

1. Teori Perubahan Hukum

Teori perubahan hukum (*nadzariyyah taghayyar al-ahkām*). Perubahan hukum dan perubahan sosial adalah fenomena yang saling mempengaruhi satu dengan lainnya. Perubahan hukum dalam suatu negara dapat mempengaruhi perubahan sosial di masyarakat. Demikian pula sebaliknya, perubahan sosial di masyarakat dapat membawa kepada perubahan hukum dalam suatu masyarakat bahkan sampai kepada negara.

Teori perubahan hukum yang dikemukakan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyyah. Ia dikenal sebagai salah seorang ulama besar di abad pertengahan dan juga pemikir hukum Islam yang banyak menjelaskan teori perubahan hukum Islam dalam karyanya, *I'lam al-muwāqī'ien*. Menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, aplikasi prinsip-prinsip dan asas-asas hukum Islam di masyarakat hendaknya koheren dengan perubahan hukum Islam sesuai dengan situasi dan kondisi dalam masyarakat muslim itu sendiri.

Logika yang dikemukakan ini tentunya sesuai dengan kaidah hukum Islam yang menyatakan: *berubahnya suatu hukum hendaknya*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

disesuaikan dengan situasi, kondisi, waktu dan tempatnya (تغير الاحكام بتغير (الازمنة و الامكنة).³ Melihat sikon dan kondisi waktu sekarang ini, sangat diperlukan adanya pergantian hukum terkait aturan untuk melakukan pembagian harta warisan. hemat penulis, perubahan tatacara dalam tatanan sosial masyarakat Indonesia yang berusaha mencari harta dan atau mengumpulkan harta dengan tidak memperhatikan ketentuan syari'at yang telah ada, seperti tidak boleh mencuri, merampas hak orang lain dan sebagainya yang kerab terjadi sekarang ini. Maka, terkait model pengumpulan harta yang telah disebutkan, untuk mencegah terjadinya pencucian harta kepada generasi selanjutnya, diperlukan adanya perubahan hukum, yaitu aturan mengenai pemilahan harta pra praktek pembagian harta warisan. Merujuk kepada tujuan hukum Islam yang bersifat umum yaitu meniadakan kemudharatan dan mendahulukan kemaslahatan umum (دفع المفساد مقدم على جلب المصالح).⁴ Bukti terapan kaidah ini, maka sebagai upaya menolak kemafsadatan dan mendapatkan manfaat dalam kehidupan terutama kehidupan berkeluarga adalah menjauhi generasi selanjutnya dari hal yang meragukan. Aplikasinya

³Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *I'lam al-Muwaqi'in*, Vol. III, (Kairo: Maktabah al-Kulliyat al-Azhariyyah, 1980) hlm. 3.

⁴Mukhlis Usman, *Kaidah-kaidah Ushuliyyah dan Fiqhiyyah*, (Jakarta: Gema Insani Press, 200), hlm. 14.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

adalah dengan usaha pewaris dalam mengumpulkan harta dan atau meninggalkan harta warisan yang benar-benar terjaga dari unsur meragukan atau unsur *syubhāt*, serta dibaringi oleh kewajiban kepada ahli waris untuk membersihkan harta peninggalan tersebut sebelum pembagian kepada ahli waris.

Teori perubahan hukum lainnya yang dapat mendukung terhadap perlunya identifikasi harta dan atau pemisahan *tirkah syubhāt* dalam praktek pembagian harta warisan adalah teori perubahan sosial yang dikemukakan oleh Roscoe Pound.⁵ Pound menjelaskan bahwa hukum dapat diperankan sebagai alat untuk mengubah masyarakat (*law as a tool of social engeneering*).

Hukum-hukum yang dibuat oleh kekuasaan dapat berakibat langsung atau tidak langsung terhadap perubahan masyarakat.⁶ untuk menggambarkan perubahan sosial dalam masyarakat Indonesia yang membutuhkan perubahan penetapan hukum, terutama dalam hal kewarisan. Secara fakta, dewasa ini, perhatian dan kesadaran untuk mencari harta secara murni halal sangat sulit dan susah, hal ini tentunya menyebabkan manusia mencari harta diluar garis haluan ketetapan syari'at, maka oleh karena demikain perlu adanya perubahan penetapan

⁵Roscoe, *The Law Theory of Social Engeneering*, dalam Tom Cambell, *Tujuh Teori Sosial*, Sketsa, Penilaian, Perbandingan, (Yogyakarta: Kanisius, 1994). hlm. 13.

⁶Lihat Satjipto, *Hukum dan Masyarakat*, (Bandung: Angkasa, 1980), hlm. 112.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hukum dalam proses pendistribusian harta yang ditinggalkan oleh pemilik sebelumnya.

Penulis menilai, teori perubahan hukum perlu dicantumkan dalam tulisan ini. Karena dianggap relevan dengan pembahasan mengenai *tirkah syuhāt* yang dalam kajiannya ingin mencari pembaharuan hukum. Pembaharuan yang penulis maksud adalah perlunya pembersihan harta pewaris oleh ahli waris sebelum didistribusikan kepada seluruh ahli waris yang berhak menerimanya. Artinya, terkait identifikasi harta sebagai upaya pembersihan harta merupakan pembaharuan kebijakan hukum yang perlu dibuat pemerintah, mengingat hingga saat ini kebijakan tersebut belum pernah dilakukan dalam proses pembagian harta warisan.

2. Teori Efektifitas Hukum

Untuk mengetahui apakah suatu aturan hukum tersebut efektif atau tidak, maka harus dilihat dari dua sudut pandang, yaitu:

- a. Optik normatif yang memandang hukum sebagai seperangkat kaidah yang bersifat idialistik. Hukum tidak lain hanya seperangkat patokan mengenai sikap tindak prilaku yang pantas dilakukan oleh obyek hukum, yaitu manusia.
- b. Optik sosiologis, yang memandang hukum sebagai gejala sosial, gejala kemasyarakatan.⁷

⁷Rusli Efendi dan Achamad Ali, *Teori Hukum*, (Ujung Pandang: Hasanuddin Universitas, 1991), hlm. 75

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tinjauan mengenai apakah suatu aturan hukum tersebut berlaku secara efektif atau tidak, akan lebih banyak menggunakan pendekatan sosiologis dari pada pendekatan normatif, kendati demikian dalam penelitian ini, pendekatan normatif lebih diutamakan penggunaannya dibandingkan dengan pendekatan sosiologis.

Untuk dapat mengetahui efektivitas hukum, maka terlebih dahulu harus mengetahui kaidah-kaidah-kaidah hukum, kemudian selanjutnya harus mengetahui tujuan hukum tersebut. Setelah kedua hal tersebut dilakukan, maka baru akan dapat diukur efektivitas atau tindaknya suatu hukum.

Sehubungan dengan pengaruh hukum, Lawrence M. Friedman dalam bukunya Rusli Effendi, dkk, menjelaskan bahwa adanya dua tindakan yang dapat diklasifikasikan sebagai berikut: *pertama*, terhadap kaidah hukum yang berisikan larangan atau suruhan. Hal ini, ada tiga kemungkinan sikap yang harus dimiliki warga terhadap kaidah hukum tersebut.

- a. Ketaatan (*compliance*)
- b. Ketidaktaatan atau penyimpangan (*deviance*)
- c. Penggelakan (*evasion*)

Kedua, terhadap kaidah hukum yang berisikan kebolehan, hal ini pula ada tiga kemungkinan sikap yang harus ada pada warga masyarakat, yaitu

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Penggunaan (*use*)
- b. Tidak menggunakan (*nonuse*)
- c. Penyalahgunaan (*misuse*).⁸

Kaidah hukum yang berisikan larangan atau suruhan pada umumnya terdapat dibidang hukum publik, termasuk hukum kewarisan, sedangkan kaidah-kaidah hukum yang berisikan kebolehan pada umumnya terdapat pada hukum privat, khususnya dibidang hukum perikatan.

Kaidah hukum apabila ditaati atau dikerjakan, maka kaidah hukum tersebut mempunyai pengaruh positif. Adapun jika kaidah hukum tersebut tidak ditaati, maka akan membawa pengaruh negatif. Dengan demikian, dapat diketahui bahwa pengaruh positif itulah yang di istilahkan atau disebut dengan evektivitas hukum.⁹

Sehubungan dengan tujuan hukum tersebut, bahwa sikap warga masyarakat yang sesuai dengan tujuan hukum berarti pula terwujud pengaruh positif, maka dengan demikian dapat dikatakan bahwa hukum tersebut telah efektif. Terdapat keterkaitan erat antara kesadaran hukum dengan ketaatan hukum. Hal ini seperti halnya yang telah disampaikan oleh B. Kurchinsky dalam bukanya Rusli Effendy¹⁰, dkk, bahwa terdapat

⁸ *Ibid*, hlm. 76.

⁹ Syamsulbahri salihima, *Perkembangan Pemikiran pembagian Warisan dalam Hukum Islam dan Implimentasinya pada Pengadilan Agama*, hlm. 20.

¹⁰ Rusli Efendi dan Achamad Ali, *Teori Hukum*, hlm. 77.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

empat faktor yang sangat erat kaitannya dengan kepatuhan warga masyarakat, empat faktor tersebut sebagai berikut:

- a. Pengetahuan tentang peraturan (*law awareness*)
- b. Pengetahuan tentang isi peraturan (*law acquaintance*)
- c. Sikap terhadap kaidah hukum tertentu (*legal attitude*)
- d. Perilaku hukum (*legal behavior*)

Adapun yang dimaksud dengan pengetahuan tentang peraturan hukum adalah apakah seseorang mengetahui adanya pasal 175 ayat 1 dan ayat 2 tentang kewajiban kepada ahli waris terhadap pewarisnya. Sedangkan yang dimaksud dengan pengetahuan tentang isi peraturan adalah apakah objek hukum dalam hal ini adalah masyarakat mengetahui bahwa pemisahan harta yang bercampur antara halal dan haram tidak mempunyai kepastian hukum yang dapat menyebabkan kerugian psikis ahli waris apabila membagi harta warisan tersebut. Namun ada kemungkinan seseorang mengetahui tentang isi peraturan, tapi tidak mengetahui tentang peraturannya.

Berbeda halnya dengan A. Podgoresky yang juga dituangkan dalam bukunya Rusli Effendi, ia mengatakan bahwa sikap seseorang terhadap kaidah hukum tertentu (*legal attitude*), seseorang bereaksi secara serta-merta tanpa memperhitungkan untung ruginya bagi dirinya sendiri, hal ini disebut *fundamental attitudes*. Adapun seseorang yang melahirkan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

reaksinya setelah memperhitungkan baik buruknya sesuatu kaidah hukum secara matang dan mantap disebut dengan *instrumental attitudes*.¹¹

Keterangan di atas membuktikan bahwa: seseorang yang patuh terhadap suatu kaidah hukum, ada dua kemungkinan, *pertama*: kepatuhan yang merupakan sikap fundamental, tetapi mungkin juga kepatuhan yang disebabkan karena sikap instrumental, sudah tentu dari segi kualitas diharapkan kepatuhan warga masyarakat merupakan kepatuhan berdasarkan sikap instrumental. Perlakuan hukum merupakan setiap kelakuan teratur yang bertujuan untuk mencapai keserasian antara ketertiban dan kebebasan. Setiap perilaku yang sesuai dengan hukum merupakan suatu ciri atau pertanda akan adanya kepatuhan atau ketaatan hukum yang tinggi¹² kepatuhan seseorang terhadap hukum didasarkan pada harapan akan suatu imbalan dan usaha untuk menghindarkan diri dari sanksi yang mungkin dikenakan. Bukan berdasarkan pada suatu keyakinan terhadap tujuan hukum yang bersangkutan. Kepatuhan ini kemudian muncul jika pengawasan dari pihak yang memegang jabatan atau pengambil kebijakan difilter dengan ketat.

Adapun kepatuhan seseorang terhadap suatu kaidah hukum yang timbul tidak disebabkan oleh nilai intrinsiknya, tetapi hanya agar hubungan baiknya dengan sesama kelompok dan dengan orang yang berwenang

¹¹ *Ibid*

¹² Soerjono Sockanto dan Mustafa Abdullah, *Sosiologi Hukum Terhadap Masyarakat*, (Jakarta: Rajawali Press, 1982), hlm. 247. Lihat juga: Syamsulbahri salihima, *Perkembangan Pemikiran pembagian Warisan dalam Hukum Islam dan Implimentasinya pada Pengadilan Agama*, hlm. 22.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menerapkan hukum tersebut tetap terjaga. Kepatuhan yang semacam ini tergantung pada baik buruknya interaksi pelaku dengan anggota kelompok dan orang yang mempunyai kewenangan menerapkan kaidah hukum itu.

Faktor *internalization*, yakni kepatuhan seseorang terhadap kaidah hukum tertentu disebabkan karena secara intrinsik. Konsekwensi dari kepatuan ini tentu mempunyai imbalan. Sehingga isi dari kaidah-kaidah hukum tersebut sesuai dengan nilai-nilai yang dianutnya. Oleh karena yakin dan sadar bahwa kaidah hukum itu baik dan ditaatinya bukan kerana adanya pengawasan atau karena sekedar menjaga hubungan baik dengan anggota kelompoknya.

Penulis mempergunakan teori efektivitas hukum dalam membahas disertasi ini untuk melihat apakah proses pembagian harta warisan dalam masyarakat Indonesia sudah efektif sudah taat hukum, kemudian dengan teori ini penulis mencoba mengukur tingkat kesadaran pelaku hukum dalam menerapkan aturan-aturan hukum kewarisan dalam kesehariannya.

3. Teori Kemaslahatan

Untuk menjamin proses penegakan hukum pendistribusian harta secara benar dikalangan umat manusia, teori *masalahah dan maqāshid al-syari'ah* dapat digunakan sebagai teori aplikasi, terutama kaitannya dengan *tirkah* yang mengandung unsur *syubhāt* yang akan didistribusikan kepada ahli waris, dengan tidak mengabaikan penggunaan teori hukum

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Islam yang juga telah digunakan oleh kalangan pemikir sebelumnya. Di antara tokoh-tokoh ulama dan pemikir muslim yang telah memperkenalkan teori *maslahah* adalah imam al-Ghazali, dan al-Syathibiy.

Teori *mashlahah* atau *maqāshid al-syari'ah* dikemukakan oleh Imam al-Ghazali. Ia dikenal ulama pemikir yang memiliki suatu kesadaran yang tinggi bahwa teks-teks al-Qur'an dan sunnah Nabi sengaja dihadirkan untuk tujuan menciptakan kemaslahatan bagi seluruh umat manusia. Kemaslahatan adalah tujuan dari aturan-aturan Islam. Imam al-Ghazali (w. 111 M) menyebutnya dengan istilah *maqashid al-syari'ah*.¹³ Imam al-Ghazali juga merumuskan bahwa kemaslahatan terbagi kedalam lima prinsip dasar (*al-Kulliyah al-Khamsah*) yaitu *hifzh al-dīn* yang dimaksud dalam hal ini adalah menjaga atau memelihara keyakinan/agama, *hifzh al-nafs* (memelihara jiwa), *hifzh al-'aqli* atau memelihara akal pikiran, *hifzh al-'irdh* atau memelihara kehormatan/keturunan atau alat-alat reproduksi, dan *hifzh al-māl* (memelihara kekayaan atau properti). Menurutnya, istilah *mashlahah* makna asalnya merupakan menarik manfaat atau menolak *mudharat*. Akan tetapi, yang dimaksud *mashlahah* dalam hukum Islam adalah setiap hal yang dimaksudkan untuk memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Setiap permasalahan baik hukum maupun praktek yang berlaku

¹³ Al-Ghazali, *Al-Mustashfa min 'Ilmi al-Ushul*, (Bairut: Dar Ihya al-Turast al-Arabi, tt), vol. I, hal. 281.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam masyarakat yang mengandung tujuan memelihara kelima prinsip tersebut disebutkan *mashlahah*.

Oleh karena demikian, al-Ghazali menyatakan bahwa setiap *mashlahah* yang bertentangan dengan al-Qur'an, Sunnah, atau ijma' adalah batal dan harus dibuang jauh-jauh. Setiap kemaslahatan yang sejalan dengan tindakan *syara'* harus diterima untuk dijadikan pertimbangan dalam penetapan hukum Islam. Melalui pernyataannya ini, al-Ghazali ingin menegaskan bahwa tidak ada satupun hukum Islam yang kontraversi dengan kemaslahatan, atau dengan kata lain tidak akan ditemukan hukum Islam yang menyengsarakan dan memudharatkan ummat manusia.

Teori *maslahah* atau yang didalamnya mencakup *maqāshid al-Syari'ah* yang selanjutnya digunakan oleh Imam al-Syathibiy, ia dikenal sebagai salah seorang pemikir hukum Islam yang banyak menjelaskan teori *maslahah* dalam karyanya *al-muwafaqat* melalui konsep tujuan hukum *syara'* (*maqashid al-syari'ah*). Perumusan tujuan syariat Islam berfungsi untuk mewujudkan kemaslahatan umum (*maslahah al-'amah*) dengan cara menjadikan aturan hukum syariah yang paling utama dan sekaligus menjadi kompetibel dengan kebutuhan ruang dan waktu (*shalihah li kulli zaman wa makan*) untuk menjamin kehidupan manusia yang adil, bermartabat, dan bermaslahat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan teori tersebut pelaksanaan pendistribusian harta warisan hendaknya diaplikasikan sesuai dengan prinsip-prinsip, asas-asas dan tujuan hukum syara'. Imam syathibiy memberikan rambu-rambu untuk mencapai tujuan syariat yang bersifat *dharuriyyah*, *hājiyyah*, dan *tahsiniyyah*. Ketiga hal yang harus diperhatikan agar tercapainya tujuan syariat tersebut tentu berisikan lima asas hukum *syara'*, yakni: memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara keturunan, memelihara akal pikiran dan memelihara harta.¹⁴ Praktek pembagian harta warisan atau pendistribusian harta kepada ahli waris dengan memperhatikan dan mengeluarkan atau memisahkan harta yang masih mengandung unsur *syubhāt* dalam prosesi pembagian harta warisan kepada ahli waris diharapkan mampu menjamin tercapainya tujuan-tujuan hukum *syara'*, yang telah disebutkan di atas. Artinya pembagian harta warisan yang mampu melahirkan penjagaan terhadap nilai-nilai agama, muru'ah dan lain sebagainya yang terkandung dalam lima prinsip utama adalah ketika ahli waris berusaha untuk memisahkan harta *syubhāt* dan non *syubhāt* pra pembagian harta warisan. hemat penulis, salah satu cara mempraktek *hifzh al dīn* dalam prosesi pembagian harta warisan adalah dengan memperhatikan unsur harta yang terkandung dalam harta peninggalan tersebut. Apabila status harta dipastikan kehalalannya, maka pendistribusian harta kepada ahli waris sesuai dengan keinginan yang

¹⁴Al-Syathibiy, *al-muwafaqat*,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ingin dicapai oleh syari'at, namun apabila status harta peninggalan tidak dapat dipastikan kehalalannya, maka perlu pemisahan ulang terhadap harta tersebut pra pendistribusian kepada ahli waris. agar apa yang dicitakan syar'at tercapat dalam proses pembagian harta warisan.

Teori kemaslahatan yang kedua pernah dipakai oleh al-Syathibiy dalam konsep *maqashid al-syari'ah* ini tampaknya masih relevan untuk menjawab segala persolan hukum di masa depan dan masa sekarang. Termasuk pula permasalahan pendistribusian harta kepada ahli warisnya, yang mempertimbangkan asas kemaslahatan dalam pengalihan harta peninggalan tersebut. Artinya, supaya kesalahan yang dilakukan pewaris selama ia mengumpulkan harta benda terhapus dengan adanya upaya dari pihak ahli waris untuk memisahkan harta tersebut pada saat pembagian harta warisan.

Berdasarkan teori di atas, penulis berpendangan bahwa pemeriksaan ulang harta warisan atau *tirkah* pra pembagian harta warisan yang masih mengandung unsur *syubhāt* sangat bersifat krusial untuk dilakukan. Hal ini dikarenakan penjangaan ahli warisan dari mengkonsumsi harta yang bukan miliknya, tentunya pada akhir dari tujuan ini adalah agar tertolaknya kemudharatan dan munculnya kemaslahatan terhadap ahli waris. Pemisahan harta yang mengandung unsur *syubhāt* ini juga bertujuan untuk menjaga agama terhadap penganutnya, terutama ummat Islam yang aturan agamanya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memerintahkan pemeluknya untuk mengkonsumsi harta yang bersumber dari hal-hal yang baik. Salah satu upaya penjagaan terhadap agamanya adalah dengan membersihkan harta kewarisan dari hal-hal yang syubhāt pada saat proses pembagian harta warisan.

4. Teori Tujuan Hukum

Teori tujuan hukum bertujuan untuk mengetahui yang menjadi tujuan hukum di dalam masyarakat, dalam ilmu hukum tujuan hukum tersebut dibagi menjadi tiga sudut pandang:

- a. Sudut pandang filsafat hukum, maka tujuan hukum dititik beratkan pada segi keadilan
- b. Sudut pandang sosiologi hukum, maka tujuan hukum dititik beratkan pada segi kemanfaatannya,
- c. Sudut pandang ilmu hukum normatif, maka tujuan hukum dititik beratkan pada segi kepastian hukum¹⁵

Adapun tujuan hukum menitikberatkan pada segi keadilan disebut aliran etis¹⁶ aliran ini mengatakan bahwa pada dasarnya tujuan hukum adalah semata-mata untuk mencapai keadilan. Adapun yang menitikberatkan pada segi kemanfaatan disebut aliran utilistis. Aliran utilistis ini mengatakan bahwa pada dasarnya tujuan hukum adalah semata-mata untuk menciptakan kemanfaatan tau kebahagiaan. Teori

¹⁵ Rusli Efendi dan Achamad Ali, *Teori Hukum...*, hlm. 79.

¹⁶ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, cet II, (Jakarta: PT Toko Gunung Agung 2002), hlm. 73

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang menitik beratkan pada segi kepastian hukum disebut aliran normatif dogmatik, yang menganggap bahwa pada azasnya tujuan hukum adalah semata-mata untuk menciptakan kepastian hukum.¹⁷

Aliran etis yang memandang tujuan hukum adalah semata-mata untuk menciptakan keadilan. Teori ini berasal dari Aristoteles yang bersifat distributif dan keadilan yang bersifat komutatif, namun pada dasarnya bahwa keadilan itu adalah untuk memberikan kepada seseorang yang menjadi haknya.¹⁸

Konsep keadilan sebenarnya juga sudah disampaikan didalam al-Qur'andalam surah al-Nisa', sebagaimana terdapat dalam firman Allah berikut ini:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ
النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ
كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: *Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat*.¹⁹

¹⁷ Ibid

¹⁸ Ibid

¹⁹ Departemen Agama RI, al-Qur'an dan Terjemahannya, (Surabaya: Pustaka As-Salam, 2010), hlm 113.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kata بِالْعَدْلِ menunjukkan suatu alat. Sama halnya jika kita mengatakan apabila kamu menimbang sesuatu, maka timbanglah dengan “dacin” suatu alat untuk mengukur berat suatu benda. Adapun keadilan menurut ayat tersebut adalah sama dengan prinsip *equality before the law*, yaitu mempersembahkan kedudukan semua orang di hadapan hukum, hal itu dapat dipahami dari kata (diantara manusia). Pada dasarnya tujuan hukum itu adalah semata-mata untuk memberikan kemanfaatan atau kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi segenap warga masyarakat.

Teori di atas memberi gambaran mengenai prinsip kebahagiaan yang semaksimal mungkin (*the greatest happiness principle*). Tentunya dengan konsep yang telah ada pada teori ini mendapatkan kritikan, bahwa apakah ukuran suatu kebahagiaan, sesuatu yang menyenangkan seseorang belum tentu menyenangkan orang lain. kebahagiaan tidak dapat diukur dan didefinisikan.²⁰

Sehubungan dengan rumusan pengertian teori tersebut, yang mengatakan kemanfaatan atau kebahagiaan yang sebesar-besarnya kepada segenap warga masyarakat. Di sini tersirat pengertian yakni sebagian kecil warga masyarakat yang tidak diberikan kebahagiaan yang sebesar-besarnya walaupun jumlahnya sangat kecil, tetapi ada. Berarti hukum itu

²⁰ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum, Cet.II*, (Jakarta: PT Toko Gunung Agung 2002), hlm. 73.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ada manfaatnya bagi sebagiannya saja. padahal hukum tersebut harusnya berlaku secara menyeluruh dan melindungi semua orang.

Panjelasan sebelumnya memberikan pemahaman bahwa tujuan hukum adalah mewujudkan aturan (*order*), tujuan tersebut sejalan dengan fungsi utama hukum yaitu mengatur. Oleh karena ketertiban sebagai syarat dasar untuk dapat melahirkan suatu masyarakat yang ideal, maka kebutuhan akan ketertiban adalah sebagai fakta dan kebutuhan objektif bagi setiap manusia yang hidup dalam masyarakat.²¹

Penganut aliran yuridis dokmatik yang lebih dikenal dengan penganut teori hukum positif menyatakan “kepastian hukum” sebagai tujuan hukum. Menurut anggapan penganut aliran ini, ketertiban dan keteraturan tidak mungkin terwujud tanpa adanya kaidah-kaidah atau norma-norma perilaku kehidupan yang pasti. Keteraturan hanya akan ada jika adanya kepastian hukum, dan untuk adanya kepastian hukum harus dituangkan dalam bentuk yang pasti, dalam hal ini adalah tercantum dalam suatu teks atau tertulis.

Anggapan di atas dibenarkan oleh banyak pakar hukum karena faktanya memang demikian, namun kritikan yang dilontarkan terhadap aliran legisme ini, bahwa hukum yang dalam bentuk tertulis acapkali

²¹Lili Rasyidi, *Hukum sebagai Suatu Sistem*, (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 1993), hlm. 127.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terjebak oleh sifatnya yang kaku sehingga sulit mengikuti perkembangan zaman. Oleh karena demikian sering sekali kita mendengarkan ungkapan pepatah yang menyebutkan bahwa hukum tertatih-tatih mengikuti perkembangan zaman.

Tujuan hukum sebagai mana di uraikan tersebut, sering diungkapkan secara terpisah, namun saling melengkapi antara satu dengan yang lainnya, yaitu kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan serta keteraturan (ketertiban) oleh sebab kemanfaatan dan ketertiban tidak mungkin dapat terwujud tanpa adanya kepastian, dan pihak objek hukum (orang yang melakukan hukum) tidak mungkin mempermasalahkan kepastian hukum dan keadilan tanpa adanya keteraturan.²²

Perkembangan dan kenyataan, pada suatu negara yang berbentuk hukum, maka tujuan hukum adalah untuk mewujudkan kesejahteraan yang sebesar-besarnya untuk masyarakat negara tersebut. Tujuan hukum ini pada mulanya diintroduksi oleh para penganut aliran teori *utilistis* (teori kemanfaatan) dan sejalan dengan tujuan perkembangan negara Republik Indonesia yang secara Konstitusional ditetapkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 pada alinea keempat, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa dan mewujudkan kesejahteraan umum.

²²Syamsul Bahri Salihima, *Perkembangan Pemikiran Pembagian Warisan*, hlm. 16.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pernyataan di atas tentunya memberikan suatu pemikiran yang mengharuskan pemerintah untuk mengatur sedemikian rupa dan tertata dengan sangat teratur proses yang sudah dipraktek oleh masyarakat yaitu mengenai praktek pembagian harta warisan. dengan tujuan untuk mewujudkan kesejahteraan bagi khalayak umum. Kendati permasalahan kewarisan tersebut berkaitan erat dengan keluarga, akan tetapi pemerintah sebagai pemegang peran hukum berhak untuk mengatur permasalahan kewarisan tersebut.

B. Kewarisan dalam Islam

1. Pengertian Kewarisan Islam

Hukum kewarisan sering dikenal dengan istilah *faraidh*. Hal ini karena dalam Islam, bagian-bagian warisan yang menjadi hak ahli waris telah ditentukan dalam al Qur'an. Hukum kewarisan dalam Islam mendapat perhatian besar, karena praktek pembagian warisan sering menimbulkan akibat-akibat yang tidak menguntungkan sebagian ahli waris.²³ Oleh karena demikian, penjelasan tentang perihal kewarisan diterangkan secara detil oleh Allah. dalam al-Qur'an.

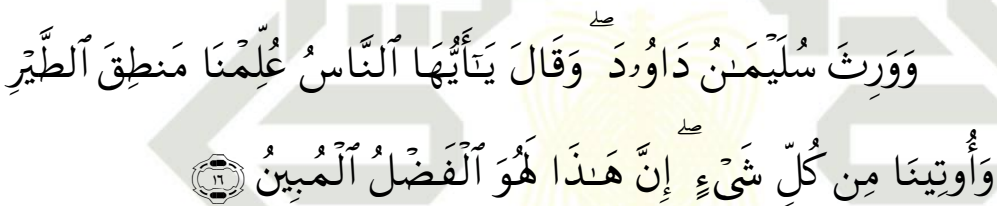
Kata waris berasal dari kata *waratsa* dengan bentuk *madhī* (kata kerja yang menunjukkan waktu yang telah laupau) *waratsa-yarisu-mīrāsan-irisan*. Dalam kamus *lisān al-'Arab* kata warisa diterjemahkan dengan

²³ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995), hlm.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

warisahu malahu (mewariskan sesuatu yang dimilikinya).²⁴ Ahmad Warshan dalam kamusnya juga menterjemahkan kata *waratsa* dengan arti mendatangkan, menyebabkan dan memberikan.²⁵ Secara etimologi kata *waratsa* berarti perpindahan sesuatu dari satu orang ke orang lain, satu kelompok ke kelompok yang lainnya, baik berupa harta warisan, ilmu, maupun karisma. Kata *waratsa* asal kata kewarisan digunakan dalam Al-Qur'an. Kata *waratsa* dalam pengertain bahasa memiliki beberapa pengertian: Pertama, menggantikan, hal ini sebagaimana disebutkan al-Qur'andalam surah al-Naml Ayat 16



artinya: *Sulaiman menggantikan²⁶ Daud dan ia berkata: "Hai manusia, Kami telah diberi pengertian tentang suara burung dan Kami diberi segala sesuatu. Sesungguhnya (semua) ini benar-benar suatu kurnia yang nyata".*

Makna kedua dari kata *waratsa* adalah: memberi, hal ini sebagaimana disebutkan dalam al-Qur'ansurah al-Zumar ayat 74:

Artinya dan mereka mengucapkan: "Segala puji bagi Allah yang telah memenuhi janji-Nya kepada kami dan telah (memberi) kepada kami tempat ini sedang kami (diperkenankan) menempati tempat dalam syurga di mana saja yang kami kehendaki; Maka syurga itulah sebaik-baik balasan bagi orang-orang yang beramal".

²⁴ Ibnu Mandhur, *Lisān al-‘Arab*, (kairo: Dar Al-Ma’arif, t.th), hlm. 4808.

²⁵ Muhammad Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/ Penafsiran Al-Qur'an, 1972), hlm. 496.

²⁶ Maksudnya Nabi Sulaiman menggantikan kenabian dan kerajaan Nabi Daud Alaihi wa salam . serta mewarisi ilmu pengetahuannya dan kitab Zabur yang diturunkan kepadanya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Makna ketiga kata *waratsa* adalah: mewarisi,²⁷ makna mewarisi sebagaimana disebutkan al-Qur'an pada surah Maryam ayat 6. Dari ketiga makna yang dipaparkan penulis sebelumnya, maka yang paling relevan dengan pembahasan adalah makna yang ketiga yaitu mewarisi karena relevan dengan konteks permasalahan yang diangkat.

Kewarisan secara terminologi memiliki definisi yang beragam, diantaranya seperti yang akan disebutkan berikut ini: Qalyubi dan 'Umairah mendefinisikan, kewarisan atau *farā'idh* adalah *jama'* (*plural*) dari kata *farīdhah* yang memiliki makna suatu bagian yang telah ditentukan.²⁸ Ali al-Shabuni mendefinisikan kewarisan ialah berpindahnya hak kepemilikan dari orang yang meninggal kepada ahli warisnya yang masih hidup, baik yang ditinggalkan itu berupa harta (uang), tanah atau apa saja yang merupakan hak milik legal secara syar'i.²⁹ Wahbah al-Zuhaili mendefinisikan warisan (*mīrāts*) sama dengan makna *tirkah* yaitu ما خلفه artinya: segala sesuatu yang ditinggalkan oleh seseorang sesudah wafat, baik berupa harta maupun hak-hak yang bersifat materi dan nonmateri.³⁰ Menurut Wirjono Prodjodikoro, kewarisan adalah soal apakah dan bagaimanakah pelbagai

²⁷ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islama di Indonesia*, cet. 1. Edisi Revisi (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 283.

²⁸ Al-Qalyubi dan Al-'Umairah, *Hasyiatani 'ala Minhaj Al-Thalabin*, Juz III, (Bairut: Dar al-Fikr, T.tt), hlm. 134.

²⁹ Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Pembagian Waris Menurut Islam*, Terj. Basalamah, (Jakarta: Gema Insani Pres, 1995), hlm. 33.

³⁰ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqhu al-Islami Wa Adillatuh*, (Bairut: Dar-al-Fikri, 2002), hlm. 7697.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang yang masih hidup.³¹

Muhammad Amin Suma, dalam bukunya mendefinisikan kewarisan adalah hukum yang mengatur pemindahan kepemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menetapkan siapa saja yang berhak menjadi ahli waris, menentukan berapa bagian masing-masing ahli waris, dan mengatur kapan pembagian harta kekayaan pewaris dilaksanakan.³² Menurut M. Idris Rumulyo, *wirasah* atau hukum waris adalah hukum yang mengatur segala masalah yang berhubungan dengan pewaris, ahli waris, harta peninggalan, serta pembagian yang lazim disebut hukum *faraidh*.³³

Definisi yang telah dikemukakan oleh penulis di atas, dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan kewarisan adalah proses pendistribusian harta yang dimiliki pewaris baik yang berbentuk materil maupun non materil, kepada ahli warisnya pada saat pemiliknya meninggal dunia, dengan memperhatikan ketentuan yang telah ditetapkan serta membagi bahagian masing-masing ahli waris sesuai dengan apa yang telah ditetapkan oleh ayat al-Qur'an dan hadist Rasulullah dan pendapat para ulama baik dikalangan sahabat dan seterusnya. Mengingat Indonesia, juga sudah mengamandemenkan peraturan proses pembagian kewarisan dalam

³¹Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Warisan di Indonesia*, (Bandung: Sumur Bandung, 2006), hlm. 13.

³²Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2004) hlm, 108.

³³M. Idris Ramulyo, *Beberapa Masalah Tentang Hukum Acara Perdata Peradilan Agama*, (Jakarta: In Hill Co, 1991), hlm. 42

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bentuk undang-undang baik dalam KHI dan UUD, maka sangat berkemungkinan dalam praktek pembagian harta warisan juga dapat mengikuti ketentuan yang telah ada dalam undang-undang tersebut.

Dasar Hukum Pembagian Harta Warisan

Hukum waris sebagai bahagian dari hukum Islam di bidang mu'amalah tidak bisa dipisahkan dari aspek-aspek lain dari ajaran agama Islam. Karena itu, penyusunan kaedah-kaedahnya harus berdasarkan pada sumber hukum yang sama. Sumber hukum kewarisan umumnya terdapat dalam al-Qur'an, hadits Rasulullah, ijma' sahabat dan ulama baik salaf maupun khalaf.³⁴ Dari ke empat sumber tersebut akan diuraikan satu persatu secara sistematis.

a. Al-Qur'an

Untuk melihat ayat kewarisan maka akan diinventarisir dalil-dalil yang tercantum dalam beberapa buku fikih mawaris yang dapat dijangkau, di antaranya: Ali al-Shabuni mencantumkan tiga ayat pokok kewarisan, yaitu surah an-Nisa' ayat 11, 12, dan 176 al-Shabuni juga mencantumkan ayat-ayat pendukung kewarisan yaitu surah al-Anfal ayat 75, al-Ahzab ayat 6 dan an-Nisa' ayat 7.³⁵

Yasin Ahmad Ibrahim Dardakah membagi sumber hukum kewarisan (ayat-ayat kewarisan) menjadi dua bagian yaitu ayat-ayat

³⁴Yasin Ahmad Ibrahim Dardakah, *al-Mirāts fi al-Syari'ati al-Islamiyyah*, hlm. 60.

³⁵Muhammad Ali as-Shabuni, *Hukum Waris dalam Syari'at Islam*, alih bahasa M. Samhuji Yasya, (Bandung: Dipenogoro, 1988), hlm. 15-17.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mujmal (bersifat umum) dan ayat-ayat *mufashāl* (bersifat terperinci). Ayat-ayat *mujmāl* adalah surah al-Nisā' ayat 7, 8, dan surah al-Anfal ayat 75. Sedangkan ayat-ayat kewarisan yang bersifat *mufashāl* adalah surah al-Nisā' ayat 11, 12, dan ayat 176.³⁶

Muhamamd 'Abdu al-Rahim al-Kasykiy, membagi ayat-ayat kewarisan dalam dua kelompok. Kelompok pertama adalah ayat-ayat al-Qur'anyang menjelaskan tentang kewarisan secara *mujmāl*. Ayat-ayatnya terdapat dalam surah al-Nisā' ayat 7, al-Anfāl ayat 175 dan al-Ahzāb ayat 6. Kelompok yang kedua adalah ayat-ayat al-Qur'an yang menjelaskan tentang kewarisan secara *tafshīliyyah*, ayat tersebut adalah surah al-Nisā' ayat 11, 12 dan 176. Ia juga mencantumkan surah al-Nisā' ayat 33 yang menjelaskan secara *tafshiliyah* tentang pembahasan *wala'maulah* (budak yang telah dimerdekakan).³⁷

Beberapa ayat yang dibahas oleh ulama yang berkecimpung dalam kewarisan dan penulis kitab fikih mawaris, maka yang menjadi sumber hukum utama ayat-ayat *faraidh* adalah surah al-Nisā' ayat 11, 12, dan 176, yang di dalam keseluruhannya secara ringkas dapat terangkum sumber-sumber hukum kewarisan Islam. Sedangkan surah al-Anfal ayat 75, surah al-Ahzab ayat 6 dan surah al-Nisā' ayat 7, merupakan ayat-

³⁶Yasin Ahmad Ibrahim Dardakah, *al-Mīrats fi al-Syari'ati al-Islamiyyah* (tt,tp), hlm. 60.

³⁷Muhamamd 'Abdu al-Rahim al-Kasykiy, *al-Mīrats al-Muqran*, bab *Daur al-Taurts fi al-Islam*, (Baghdad: Dar al-Nadzir Lithaba' wa al-Nasyir, 1998), hlm. 127.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ayat pendukung yang hanya secara global menjelaskan tentang hak-hak ahli waris tanpa disertai penjelasan yang terperinci.

Pada sisi lain, pengarang kitab fikih kewarisan tidak membahas surah al-Nisa' ayat 33 sebagai sumber hukum kewarisan. Karena menurut mereka, ayat tersebut kedudukannya telah *dinasakh* (dihapus) oleh surah al-Anfal ayat 75. Akan tetapi sebahagian ulama dari golongan Hanafiyah mencantumkan ayat 33 ini ke dalam sumber-sumber hukum kewarisan karena dalam pandangan mereka tidak terdapat ayat lain yang bisa untuk *menasakh* ayat tersebut.³⁸

Beberapa ayat kewarisan yang tercantum dalam buku-buku fikih kewarisan yang telah dijelaskan di atas tersebut, penulis mencantumkan surah al-Nisa' ayat 7, 11, 12, 13, 14 dan ayat 176 sebagai sumber hukum kewarisan dalam penulisan disertasi ini. Karena ayat-ayat yang telah disebutkan terdapat keterkaitannya dengan pembahasan yang akan dipaparkan. Maka oleh karena demikian, sangat layak penulis cantumkan sebagai landasan untuk menguatkan teori yang dibangun penulis untuk mendukung teori tentang kewarisan.

- 1) Al-Qur'ansurat al-Nisa' ayat 7

³⁸Lihat tesisnya Syarkoni, *Penundaan Pembagian Harta Warisan dalam Perspektif Hukum Islam*, (Banda Aceh: IAIN Ar-Raniry, 2005), hlm. 43.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ
نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ
نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Artinya: “Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.”³⁹

Sebab turun ayat 7 surah al-Nisā ini bahwasanya Imam al-Qurthubi menukilkan dalam kitabnya sebab turun surah al-Nisā’ ayat 7 dikarenakan seseorang yang bernama Aus Ibn Tsabit meninggal dunia, ia meninggalkan seorang istri bernama Ummu Kujjah, Aus juga meninggalkan tiga orang anak perempuan, akan tetapi Ibn Katsir menyebutkan bahwa anak yang ditinggalkan bersama Ummu Kujjah adalah dua orang anak perempuan bukan tiga orang.⁴⁰ Pada saat Aus meninggal dunia dua orang anak laki-laki saudara Aus mengambil semua harta yang ditinggalkan dan tidak diberikan sedikitpun harta tersebut kepada istri dan anak-anak Aus.

Pemuka kaum Quraisy tidak memberikan harta peninggalan kepada anak kecil karena mereka beralasan bahwa pada masa Jahiliyah pihaknya tidak memberikan harta warisan kepada

³⁹Departemen Agama RI, *al-Qur’an dan Terjemahannya*, (Surabaya: Pustaka As-salam, 2000), hlm. 101.

⁴⁰Abi Al-Fidaa’ Isma’il Ibn Kasir Al-Damasyik, *Tafsir al-Qur’an al-A’dhim*, (Kairo: al-Maktabah al-Taufiqiyah, t.t), hlm. 156.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perempuan yang ditinggalkan suaminya dan tidak pula memberikan harta peninggalan kepada anak kecil baik perempuan maupun laki-laki.

Hal di atas menyebabkan kaum Quraisy hanya memberikan harta warisan kepada orang yang ikut berperang, dan ikut membunuh musuh kabilahnya, dan orang-orang yang dapat membawa pulang harta rampasan perang. Ummu Kujjah melaporkan perlakuan saudara kandung suaminya tersebut kepada Rasulullah kemudian beliau memanggil keduanya. Kedua anak dari paman suaminya tersebut juga menyebutkan alasan yang sama kepada Rasulullah yaitu anaknya belum bisa menunggangi kuda untuk berperang, belum bisa membawa pulang harta rampasan perang dan sebagainya. Lalu Rasulullah bersabda: pulanglah ke rumah masing-masing kalian, hingga aku mendapatkan wahyu dari Allah. Maka sebagai jawaban dari peristiwa di atas turunlah surah al-Nisa' ayat 7 ini.⁴¹

Al-Qur'ansurat al-Nisa' ayat 7 mengandung beberapa garis hukum kewarisan, yaitu anak laki-laki akan memperoleh bagian harta warisan dari harta peninggalan ibu bapaknya, untuk keluarga dekat baik laki-laki maupun perempuan juga akan memperoleh bagian dari harta yang ditinggalkan keluarga dekatnya. Ayat tersebut juga

⁴¹ Ahmad al-Anshari al-Qurthubi, *Tafsiral-Jami' Li al-Ahkam al-Qur'an*, (Kairo: Dar al-Hadist, 2002), hlm. 45. Lihat juga, Syuti Thalib, *Hukum kewarisan Islam Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 15-17.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menjelaskan bahwa porsi atau bagian yang diperoleh ahli waris baik kecil maupun besar semua ketentuan tersebut ditetapkan Allah untuk dibagikan kepada ahli warisnya setelah pewaris meninggal dunia.⁴² Bahagian yang diperoleh ahli waris sesuai dengan porsi masing-masing ahli waris atau orang yang akan menerima harta warisan seperti apa yang telah ditetapkan Allah dalam ayat selanjutnya, yang akan dipaparkan berikutnya.

2) Al-Qur'ansurah an-Nisa' ayat 11 dan ayat 12

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِنْ لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبُوَاهُ فَلِلْأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِلْأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ أَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۚ إِنْ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya: "Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu bahagian seorang anak laki-laki sama

⁴²Sajuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Bina Akasara, 1981), hal. 7.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan bagian dua orang anak perempuan, dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan, jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separuh harta, dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.⁴³

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوَصِّينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوَصُّونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتُ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ خَلِيمٌ ﴿١٢﴾

⁴³Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, hlm. 101.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: “*Bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, maka istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam bagian sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). Allah menetapkan yang demikian itu sebagai syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun*”.⁴⁴

Sebab turunnya ayat 11 dan 12 surah al Nisā, Imam al-Qurtubi menuliskan bahwa terdapat beberapa riwayat yang menyebutkan tentang sebab turunnya ayat *farā'idh* ini. Salah satu riwayat dari Imam al-Turmuzi, Abu Daud dan Ibn Majah meriwayatkan dari Imam Jabir bahwasanya istrinya Sa'ad bin Rabi' pernah berkata kepada Rasulullah: Ya Rasulullah, Sa'ad Ibn Rabi' telah meninggal dunia. Ia meninggalkan saya sebagai isterinya, dua orang anak perempuan dan saudara laki-lakinya. Saudara laki-lakinya dengan sengaja mengambil semua harta yang ditinggalkan oleh Sa'ad sedangkan kedua anak perempuannya tersebut tidak mungkin untuk dinikahi kecuali mereka mempunyai harta. Kemudian Rasulullah

⁴⁴ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, hlm. 102.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memerintahkan agar saudara Sa'ad datang kepada beliau, lalu Rasulullah bersabda: berilah kepada dua orang anak perempuan Sa'ad $\frac{2}{3}$ (duapertiga), berikan kepada istrinya $\frac{1}{8}$ (seperdelapan) dan sisinya untuk kamu.⁴⁵ Hal ini disampaikan Rasulullah sesuai dengan ayat yang telah turun sebelumnya. Riwayat lain dari Imam al-Turmuzi di dalamnya disebutkan bahwa: “Wahai Rasulullah, bagaimana aku bagikan hartaku di antara anak-anakku. Rasulullah tidak menjawab apa-apa, hanya diam saja, sehingga turunlah surat al-Nisa' ayat 11 dan 12.”⁴⁶

Ayat sebelumnya dan ayat ke-12 surah al-Nisa' serta ayat penutup surat al-Nisa' merupakan bahagian dasar dari ilmu *farā'idh* (ilmu yang membahas tentang pembagian harta warisan).⁴⁷ Dalam ayat 11 ini Allah mensyari'atkan pembagian harta warisan secara *farā'idh*. Bila ditelusuri lebih lanjut surah al-Nisa' ayat 11 di atas, mengandung beberapa garis hukum kewarisan Islam, di antaranya: Allah mensyari'atkan pembagian harta warisan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkanNya. Ayat ini juga mengatur tentang perbandingan perolehan antara seorang anak laki-laki dan seorang anak perempuan, serta mengatur tentang perolehan dua orang anak perempuan atau lebih, dalam ayat ini juga disebutkan bagian yang

⁴⁵ Ahmad al-Anshari al-Qurthubi, *Tafsiral-Jami' Li al-Ahkam al-Qur'an*, hlm. 56.

⁴⁶ *Ibid*

⁴⁷ Abi al-Fidaa' Isma'il Ibn Kasirt al-Damsyik, *Tafsir al-Qur'an al-A'dhim*, (Kairo: al-Maktabah al-Taufiqiyah, t.t), hlm. 159.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

akan diperoleh seorang anak perempuan, yaitu seperdua dari harta peninggalan.⁴⁸

Ayat 11 surah al-Nisa' di dalam pembahasannya juga disebutkan tentang waktu pelaksanaan pembagian harta warisan baru akan dilakukan setelah pembayaran wasiat dan utang piutang pewaris, hal ini dijelaskan oleh Allah dalam ayat tersebut pada kalimat (*mimba'di washiyatin yushi nabihā au daīn*) para ulama tafsir seperti Sa'id Hawa dalam tafsirnya menjelaskan kalimat tersebut dapat dipahami bahwa pembagian harta warisan baru akan dilakukan setelah meninggalnya pewaris dan setelah pelunasan hutang piutang yang berkenaan dengan harta yang ditinggalkan.⁴⁹ Hal ini dipahami bahwa secara terpaksa atau *ijbari* ahli waris yang ditinggalkan mewarisi apa saja yang ditinggalkan oleh pewarisnya pada saat pemiliknya meninggal dunia, kendati harta yang ditinggalkan tersebut masih bercampur baur antara harta halal dan haram, tidak perlu ada upaya untuk memeriksa harta yang ditinggalkan harta tersebut.

Pernyataan yang sama juga disebutkan oleh penulis buku *tafsif Ayat al-Ahkam* ketika menafsirkan kata "*mimba'di washi yati yushinabiha au dain*" Ia menyebutkan Imam Zamakhsyari pernah menyatakan bahwa maksud dari kata "*mimba'di washi yushi biha au*

⁴⁸Umar Syihab, *Hukum Kewarisan Islam dan Pelaksanaannya di Wajo (Disertasi doktor Universitas Hasanuddin, Ujung Pandang, 1998)*, hlm. 55. Lihat juga: Amir Syarifuddin, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dalam Lingkungan Adat Mingangkabau*, (Jakarta: Gunung Agung, 1994), hlm. 12.

⁴⁹Sa'id Hawa, *Asas fi Tafsir*, jilid 2, (Kairo: Dar Al-Salam, 1999), hlm. 1011.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dain”tersebut adalah pemberian porsi atau jatah yang akan diperoleh ahli waris dari harta yang ditinggalkan oleh pewaris, baru akan ditunaikan setelah pemberian wasiat dan pelunasan hutang piutang.⁵⁰

Ali as-Shabuni dalam tafsirnya menegaskan bahwa hak dari harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris tidak boleh dibagikan kepada ahli waris sebelum pelunasan wasiat dan utang piutang ditunaikan.⁵¹ Hal ini dilakukan agar mencegah terjadinya pendistribusian harta yang tidak halal kepada ahli waris. Karena apabila harta proses pembagian harta warisan dilakukan sebelum pelunasan utang piutang dan wasiat, maka akan terjadinya penerimaan hak yang bukan miliknya, hal ini dikarenakan harta tersebut masih mengandung hak orang lain yaitu hutang dan atau atau wasiat yang belum dilunasi pembayarannya. Oleh karena demikian, upaya pencegahan pendistribusian harta haram dan atau *syubhāt* yang belum diketahui status kehalalannya kepada ahli waris lebih utama harus dilaksanakan sebelum pelaksanaan pembagian harta warisan.

Hal di atas, dianggap penting agar harta warisan yang akan didistribusikan kepada ahli waris tidak mengandung unsur *syubhāt* ataupun unsur haram, disisi lain juga untuk mencegah terjadinya

⁵⁰Muhammad A’li Saais, *Tafsir Ayat Al-Ahkam*, (ttp, tp, tt), hlm. 47.

⁵¹Muhamamad A’li al-Ashabuni, *Shafwatu al-Tafasir*, Jilid I, (Kairo: Dar al-Shabuni, tt), hlm. 263.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pelimpahan kesalahan atau dosa yang dilakukan oleh pewaris kepada ahli warisnya. Artinya dengan usaha menelusuri asal muasal harta peninggalan tersebut dari mana bersumber, maka pergantian estafet kepemilikan bersih dari unsur *syubhāt*.

- 3) Al-Qur'an surah an-Nisa' ayat: 13

تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ
جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ
الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

Artinya: Itulah hukum-hukum Allah dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasul-Nya maka Allah akan memasukkannya ke dalam jannah-jannah yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Dia di dalamnya dalam keadaan kekal dan itulah kemenangan yang besar

- 4) Al-Qur'an surah al-Nisa' ayat: 14

وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ
نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ

Artinya: Dan barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar hukum-hukum-Nya, maka Allah akan memasukkannya ke dalam neraka. Ia di dalamnya dalam keadaan kekal dan baginya adzab yang hina.

Allah menegaskan dalam dua ayat al-Qur'an yang telah disebutkan sebelumnya bahwa ketentuan yang telah ditetapkan pada ayat sebelumnya menyangkut tatacara pembagian harta warisan, siapa saja yang berhak untuk memperoleh harta warisan, bagian ahli waris yang telah ditetapkan baik itu seperdua (1/2) seperempat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(1/4) dan lain-lainnya, pelaksanaan pembagian harta warisan setelah pelunasan hutang, melaksanakan wasiat si pewaris. Hal tersebut adalah ketetapan dari Allah yang telah ditetapkan untuk hambanya agar dipatuhi dan ditaati. Karena Allah pada penghujung ayat tersebut memberikan *wa'dun* (janji) dan *wa'id* (ancaman) bahwa barangsiapa yang tunduk patuh terhadap ketetapan Allah tersebut maka syurga baginya, begitu juga dengan kebalikannya terhadap orang yang mengingkari perintah tersebut, Allah juga mempersiapkan neraka bagi mereka.

5) Al-Qur'ansurah al-Nisa' ayat 176

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ ۚ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتُ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ۚ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِّجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّوا ۚ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya: *inggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah) katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang men udara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara laki-laki dan perempuan, maka bahagian seorang saudara*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.*⁵²

Penjelasan atau paparan ayat 11, ayat 12 dan ayat 13 dan 14 surah al-Nisa' di atas dapat dipahami bahwa Allah mensyariatkan pembagian harta warisan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan olehNya. Hal lain yang dapat dipahami bahwa pembagian harta warisan baru akan dilakukan setelah meninggalnya seseorang, hingga menyelesaikan urusan yang berkenaan dengan utang piutang yang bersangkutan dengan orang yang telah meninggal dunia. Artinya, pelaksanaan pembagian harta warisan menurut para ulama tafsir adalah mulai setelah meninggalnya pewaris hingga selesai pengurusan jenazah, pelunasan wasiat yang ditinggalkan pewaris dan pembayaran hutang piutang yang masih ada sangkutpautnya dengan harta yang ditinggalkan pewaris.

Pernyataan sebelumnya memberikan indikasi kuat untuk dipahami bahwa pemisahan harta yang status kehalalannya masih dipertanyakan atau dengan istilah lain harta yang masih mengandung unsur haram dan atau *syubhāt* harus lebih utama dilaksanakan sebelum prosesi pembagian harta warisan dilaksanakan, kerana untuk mencegah terjadi pendistribusian harta yang statusnya tidak baik

⁵² Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, hlm. 108.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kepada ahli waris yang akan menerima estavet kepemilikan harta dari pemilik sebelumnya.

b. Hadits⁵³ Rasulullah

Hadits-hadits Rasulullah yang berkaitan dengan warisan sangat banyak, hal ini terbukti apabila ditinjau dalam buku hadits dijumpai banyaknya hadits yang menyebutkan tentang kewarisan. Seperti yang telah disebutkan oleh Imam Abu Dawud dalam kitab haditsnya, bahwa terdapat delapan belas bab yang membahas tentang pembahasan *faraidh*. Adapun hadits yang disebutkan oleh Imam Abu Dawud di dalam kitabnya tersebut kurang lebih empat puluh lima hadits yang membahas tentang *faraidh*.⁵⁴ Imam Abi Bakar Muhammad bin ‘Abdullah atau yang masyhur dengan Ibnu Arabi dalam kitabnya menyebutkan bahwa terdapat dua puluh tiga bab yang meyebutkan hadits-hadits tentang

⁵³Kata Hadits atau dalam istilah lain disebut dengan sunah. “sunnah” berasal dari kata *sanna*. Secara etimologi berarti cara yang biasa dilakukan, apakah cara itu sesuatu yang baik, atau buruk. Ulama Islam mengutip kata *sunnah* dari al-Qur’an dan bahasa Arab yang mereka gunakan dalam artian khusus, yaitu: cara yang biasa dilakukan dalam pengamalan agama. Kata *sunnah* dalam priode awal Islam dikenal dalam artian seperti ini. *Sunnah* berfungsi sebagai penjelas terhadap hukum-hukum yang terdapat dalam al-Qur’an. *Sunnah* dalam kandungannya sebagai penjelas, kadang-kadang memperluas hukum dalam al-Qur’an atau menetapkan sendiri hukum di luar dari apa yang telah Allah tetapkan dalam al-Qur’an. Kedudukan *sunnah* sebagai bayani atau menjelaskan hukum al-Qur’an, tidak diragukan lagi dan dapat diterima oleh semua pihak, karena memang untuk itulah nabi ditugaskan Allah. Namun dalam kedudukan *sunnah* sebagai dalil yang berdiri sendiri dan sebagai sumber hukum kedua setelah al-Qur’an menjadi bahan perbincangan dikalangan ulama. Perbincangan ini muncul disebabkan oleh keterangan Allah sendiri yang menjelaskan bahwa al-Qur’an atau ajaran Islam itu telah sempurna (al-Maidah [5]: 4; oleh karenanya tidak perlu lagi ditambahkan oleh sumber lain, termasuk oleh *sunnah*. Terkait kedudukan *sunnah* sebagai sumber hukum, Jumhur ulama berpendapat bahwa *sunnah* berkedudukan sebagai sumber atau dalil hukum kedua setelah al-Qu’ran dan mempunyai kedudukan untuk ditaati serta mengikat untuk semua ummat Islam.

⁵⁴Abi Daud Sulaiman, *sunan Abi Daud* (Bairut: Daru al-Fikri, 1994), hlm. 10.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

faraidh di dalam kitabnya tersebut.⁵⁵ Akan tetapi, hadits yang dapat disebutkan oleh penulis dalam penelitian ini yang berkenaan dengan pembahasan yang ingin dikaji adalah sebagai berikut:

1) Hadits dari Ibnu Abbas

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :
الْحَقُّوْا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرَ⁵⁶

Artinya: *Dari Ibnu Abbās ra. dari Nabi saw. ia bersabda, “serahkanlah bagian kewarisan itu kepada yang berhak, kemudian sisanya adalah untuk laki-laki yang lebih dekat (kepada mayit).”* (HR. Ahmad, Bukhari dan Muslim).⁵⁷

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقسموا المال بين أهل الفرائض
على كتاب الله فما تركت الفرائض فلاولى رجل ذكر.⁵⁸

Artinya: *Rasulullah saw bersabda: Bagikanlah harta warisan kepada ahli waris (ashabu al-furudh) sesuai dengan ketentuan Kitabullah, sedang sisanya kepada laki-laki yang terdekat (‘ashabah)*

Hadits yang telah disebutkan di atas dapat dipahami beberapa indikasi, di antaranya harta peninggalan yang ditinggalkan oleh pewaris diberikan kepada ahli waris yang berhak, bukan kepada orang yang tidak berhak.⁵⁹ Pemahaman lain yang mungkin dipahami dari hadits di atas adalah pembagian harta warisan dilakukan dalam waktu

⁵⁵Abi Bakar Muhammad bin’Abdullah, *A’ridhah al-Ahwazi syarah kitab shahih al-Tumuzi*, Jilid IV, (Bairut: Darul al-Kutub al-Ilmiyah, 1997), hlm. 182.

⁵⁶Muhyiddin An Nawawi, *Shahih Muslim Syarhul Shahih Muslim*, Juz II, (Bairut-Libanon Dar El-Marifah, 1997), hlm. 54. Lihat Juga Abdul Kadir Muhammad Ali, *Fathul Mubdi bi Syarhi Mukhtashir Az-Zaidi*, Juz III, Cet III (Bairut-Libanon: Dar al-Katab al-Ilmiyah, 2009), hlm. 601.

⁵⁷Ma’mun Daud, *Terjemahan Hadist Sahih Muslim*, Jilid. 3, Cet III (Jakarta: Widjaya, 1993), hlm. 194.

⁵⁸Muhyiddin an Nawawi, *Shahih Muslim Syarhul Shahih Muslim*, Juz II, (Bairut-Libanon Dar El-Ma’rifah, 1997), hlm. 55.

⁵⁹al-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim*, hlm. 60.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang sesegera mungkin, karena kata pertama yang digunakan oleh Rasulullah dalam menyebutkan hadist di atas adalah kata *lahāqa*, kata tersebut dalam kamus lisan al-Arab diartikan dengan *adrakahu* yang berarti menjumpai, menemukannya atau melaksanakan. Pelaksanaan yang dimaksud dari kata tersebut adalah dengan segera bukan menunda-nunda⁶⁰, artinya dalam proses pembagian harta warisan harus diperhatikan dengan benar masa untuk melaksanakan pembagian harta yang akan didistribusikan kepada ahli waris. Didalam pendistribusiannya tidak diperkenankan adanya kaitan hak orang lain atau sangkutpaut dengan hak orang lain dalam harta warisan tersebut. Oleh karena demikian, harta yang terutang dan atau jenis lainnya yang tentunya masih adanya keterkaitanya dengan hak orang lain tidak diikutsertakan dalam pembagian harta warisan. maka, pemahaman yang dapat dimunculkan dari paparan di atas bahwa harta masih mengandung unsur *syubhāt* juga harus dielemenirkan dari pembagian harta warisan kepada ahli waris, agar tidak terjadinya pengalihan hak yang tidak benar kepada ahli waris yang akan melanjutkan pemamfaatan harta warisan tersebut.

2) Hadits dari Jabir. ra.

عَنْ جَابِرٍ قَالَ: جَاءَتْ امْرَأَةٌ سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَابْتِئِهَا مِنْ سَعْدٍ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ هَاتَانِ ابْنَتَا سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ قُتِلَ أَبُوهُمَا مَعَكَ فِي أَحَدٍ شَهِيدًا وَإِنَّ عَمَّهُمَا أَخَذَ مَالَهُمَا. فَلَمْ يَدْعُ لَهُمَا مَالًا وَلَا يُنْكَحَانِ إِلَّا

⁶⁰Ibnu Manzur, *Lisan al-‘Arab*, Juz 8, hlm. 49.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

بِمَالٍ فَقَالَ يَقْضِي اللَّهُ فِي ذَلِكَ فَتَزَلَّتْ آيَةُ الْمِيرَاثِ فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللَّهِ ص م إِلَى عَمَّهَ فَقَالَ : أَعْطِ ابْنَتِي سَعْدَ الثَّلَاثِينَ وَ أُمَّهُمَا الثَّمَنَ وَمَا بَقِيَ فَهُوَ لَكَ.⁶¹

Artinya: Dari Jabir, ia berkata: Istri Sa'ad bin Rabi' pernah datang ke tempat Rasulullah saw. dengan membawa dua orang anak putrinya yang diperoleh dari perkawinannya dengan Sa'ad, lalu ia berkata: Ya Rasulullah dua anakperempuan ini adalah anaknya Sa'ad bin Rabi' di mana ayahnya telah wafat dalam peperangan Uhud bersamamu, sedang pamannya telah mengambil semua harta milik ayah mereka, tidak sedikitpun harta ayah mereka ditinggalkan oleh paman mereka, padahal anak-anak ini tidak bakal dikawini (orang lain) melainkan karena mereka mempunyai uang. Maka Rasulullah bersabda, "Allah akan memutuskan hal itu". Begitu kemudian turun ayat waris. Lalu Rasulullah saw. kirim utusan (untuk menyampaikan berita tersebut) kepada pamannya, yaitu Nabi bersabda, "berilah dua putri anak Sa'ad itu dua pertiga dari harta ayah mereka, istrinya seperdelapan dan sisinya buat engkau."

Ulama *muhaditsin* ketika menjelaskan hadits di atas menyebutkan, bahwa tempo dulu dimasa jahiliyah, pembagian harta warisan dilakukan berlandaskan kepada hawa nafsunya, sering terjadi diskriminasi terhadap pihak-pihak yang lemah,⁶² sehingga Allah menjelaskan tatacara pembagian harta warisan yang benar yang tercantum dalam ayat-ayat *farā'idh* beserta hadits yang disampaikan oleh Rasulullah yang menyebabkan batalnya praktik-praktik yang dilakukan pada masa jahiliyah itu.⁶³ Hadits ini menjelaskan bahwa pada masa jahiliyah orang-orang yang lemah, seperti wanita, anak-anak yang belum bisa menunggangi kuda untuk berperang dan

⁶¹ Abi Bakar Muhammad bin'Abdullah, *A'ridhah al-Ahwazi Syarah Kitab Shahih al-Turmuzi*, hlm.184-185.

⁶² Amin 'Abdu Al-Ma'bud..., hlm 123.

⁶³ Arahman, *Penjelasan lengkap hukum-hukum Allah (Syari'ah)*, (Jakarta Utara: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 353.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebagainya tidak mendapatkan harta warisan dari peninggalan orang tuanya. Praktik pembagian harta warisan pada masa jahiliyah hanya memberikan bagian harta warisan kepada orang-orang yang kuat fisiknya, yang dapat berperang melawan musuh dan lain sebagainya.

Penjelasan hadits di atas dapat dipahami bahwa seorang perempuan yang bernama Ummu Kujjah datang menjumpai Rasulullah dan membawa kedua anak perempuannya yang telah sampai umur untuk menikah, tetapi pernikahannya tidak dapat dilakukan kecuali apabila keduanya mempunyai harta. Harta yang ditinggalkan oleh ayahnya telah diambil paman dari kedua anak perempuan tersebut.

Paparan yang telah disebutkan penulis di atas dipahami bahwa proses pembagian harta warisan mestinya dilakukan dengan sesegera mungkin tidak ditunda hingga bertahun-tahun lamanya. Kasus yang terjadi dalam hadits ini juga memberi pemahaman bahwa pada masa jahiliyah pengalihan harta dari pewaris kepada ahli waris dilakukan dengan waktu yang relatif singkat. Hal ini dapat dibuktikan, bahwa Sa'ad bin Abi Rabi' yang meninggal dunia bersama Rasulullah dalam perang Uhud pada saat itu, saudaranya dengan segera mengambil harta yang ditinggalkan oleh Sa'ad dengan tidak menyisakan harta tersebut kepada keponakannya. Akan tetapi, ketika permasalahan ini diadukan kepada Rasulullah pada saat ayat kewarisan turun, maka

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Rasulullah memerintahkan kepada paman dari kedua anak perempuan yang ditinggalkan oleh Sa'ad untuk membagi kembali harta yang telah diambilnya.

Upaya Rasulullah memanggil kembali paman dari anak perempuan (saudara-saudaranya Sa'ad) yang telah mengambil harta yang ditinggalkan oleh Sa'ad tersebut dipahami bahwa: Rasulullah sangat tidak menginginkan terjadinya peralihan harta yang bukan hak untuk diterima oleh ummatnya. Oleh karena demikian pemisahan harta yang mengandung unsur *syubhāt* lebih harus diutamakan. Pemisahan harta syubhat dari pembagian harta warisan kepada ahli waris ini bertujuan untuk menjaga ahli waris dari hal yang tidak diridahi oleh *syarī'*. maka, penulis berpandangan bahwa perlunya pembersihan harta warisan dari unsur syubhat sebelum pembagian kepada ahli waris.

3) Hadist dari Ali ra.

عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: أَنْتُمْ تَقْرَأُونَ هَذِهِ آيَةَ “مَنْ بَعْدَ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ” وَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَىٰ بِالذَّيْنِ قَبْلَ الْوَصِيَّةِ. وَإِنَّ أَعْيَانَ بَنِي الْأُمِّ يَتَوَارَثُونَ بَنِي الْعَلَاءِ، الرَّجُلُ يَرِثُ أَخَاهُ لِأَبِيهِ وَأُمُّهُ دُونَ أَخِيهِ لِأَبِيهِ.

Artinya: *Dari Ali r.a ia berkata: kalian telah membaca ayat ini , yaitu mimba'di washii yati yushi biha au dain “sesudah wasiat yang ia wasiatkannya atau hutang” Padahal Rasulullah saw. menetapkan hutang didahulukan dari pada wasiat, dan sesungguhnya saudara-saudara seibu sebabak itu mewarisi saudara-saudara sebabak, bukan saudaranya sebabak (mewarisi saudara seibu sebabak).” (HR. Ahmad, Tirmidzi dan Ibnu Majah).*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4) Hadist dari Qabisah bin Dzuaib

عَنْ قَبِيصَةَ بِنِ ذُوَيْبٍ قَالَ: جَاءَتِ الْجَدَّةُ إِلَى أَبِي بَكْرٍ فَسَأَلَتْهُ مِيرَاثَهَا فَقَالَ: مَا لَكَ فِي كِتَابِ اللَّهِ شَيْئٌ وَمَا عَلِمْتُ لَكَ فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْئًا فَارْجِعِي حَتَّى أَسْأَلَ النَّاسَ فَسَأَلَ النَّاسَ فَقَالَ: الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ: خَضِرْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَعْطَاهَا السُّدُسُ فَقَالَ: هَلْ مَعَكَ غَيْرُكَ؟ فَقَامَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ مِثْلَ مَا قَالَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ فَأَنْفَذَهُ لَهَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: ثُمَّ جَاءَتِ الْجَدَّةُ الْأُخْرَى إِلَى عُمَرَ فَسَأَلَتْهُ مِيرَاثَهَا فَقَالَ: مَا لَكَ فِي كِتَابِ اللَّهِ شَيْءٌ وَلَكِنْ هُوَ ذَاكَ السُّدُسُ فَإِنْ اجْتَمَعْتُمَا فَهُوَ بَيْنَكُمَا وَإِكُمَا خَلَتْ بِهِ فَهُوَ لَهَا

Artinya: *Dari Qabisah bin Dzauib, ia berkata: seorang nenek pernah datang ke tempat Abu Bakar menanyakan tentang warisannya, maka Abu Bakar menjawab: Al-Qur'ansedikit pun tidak menyebutkan hal itu, dan aku pun tidak mengetahuinya dalam sunnah Rasulullah saw. karena itu kembalilah sehingga aku akan bertanya dulu kepada orang lain, lalu ia bertanya kepada orang lain (yaitu kepada Mughirah bin Syu'bah), maka kata Mughirah bin Syu'bah, aku pernah datang ke tempat Rasulullah saw. maka ia memberinya (nenek) seperenam. Lalu Abu Bakar bertanya lagi: Apa ada orang lain yang tahu? Maka Muhammad bin Maslamah Al-Anshari berdiri lalu berkata seperti apa yang dikatakan oleh Mughirah bin Syu'bah itu. Begitulah, kemudian Abu Bakar melaksanakan hukum tersebut kepada nenek tadi. Qabishah berkata: kemudian datanglah seorang nenek lain kepada 'Umar, menanyakan tentang warisnya. Maka jawab Umar: Al-Qur'ansedikit pun tidak menyebut hal itu, tetapi warisannya adalah seperenam. Jika kalian berdua berkumpul (nenek dan kakek) maka seperenam itu untuk kalian berdua, dan siapa di antara kalian berdua yang bersendirian (baik nenek ataupun datuk seorang diri) maka seperenam itu adalah untuknya." (HR. Imam yang lima, kecuali Nasa'i dan disahkan oleh Tirmidzi).*

c. Ijma' dan Ijtihad Sahabat Nabi

Ijma' adalah kesepakatan atau konsensus, yaitu kesepakatan mujtahid dari ummat Islam pada suatu masa⁶⁴, setelah wafatnya

⁶⁴Unsur pokok yang merupakan hakikat dari suatu *ijma'* yang sekaligus merupakan rukun *ijma'* yaitu: *Pertama*, sat berlangsungnya kejadian yang memerlukan adanya *ijma'* terdapat sejumlah orang yang berkualitas mujtahid, karena kesepakatan itu tidak berarti bila yang sepakat itu hanya seorang saja. *Kedua*, semua mujtahid sepakat tentang hukum masalah tersebut, tanpa

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Rasulullah saw terhadap suatu hukum syara'. Ijma' merupakan salah satu dalil syara' dalam menetapkan hukum Islam, dan oleh jumhur ulama fikih dianggap sebagai sumber hukum Islam ketiga⁶⁵ setelah al-Qur'andan Sunnah Rasulullah SAW.⁶⁶ Dapat dipahami bahwa ijma' harus merupakan kesepakatan seluruh mujtahid, apabila ada di antara ulama yang tidak setuju dengan hukum yang telah ditetapkan, maka

memandang kepada negri asal, jenis dan golongan mujtahid. Apabila yang melakukan kesepakatan itu hanya sebagian mujtahid saja. Maka, kesepakatan itu tidak dapat disebut *ijma'*, hal ini dikarenakan *ijma'* hanya tercapai dalam kesepakatan menyeluruh. Ketiga, kesepakatan itu tercapai setelah terlebih dahulu masing-masing mujtahid mengemukakan pendapatnya sebagai hasil dari usaha ijtihadnya, secara terang-terangan, baik pendapatnya itu dikemukakan dalam bentuk ucapan dengan mengemukakan fatwa tentang hukum yang terjadi tersebut, atau dalam bentuk perbuatan dengan memutuskan hukum pada pengadilan dalam kedudukannya sebagai hakim. Apabila telah berkumpul dan bertemu semua mujtahid muslim dari berbagai negeri, bangsa dan golongan dalam suatu masa sesudah wafatnya Nabi, dihadapkan kepada mereka suatu kasus yang memerlukan putusan hukum, kemudian setiap mujtahid mengemukakan pendapatnya secara terang-terangan, baik dengan ucapan atau dengan perbuatan, secara bersama atau terpisah, ternyata pendapat mereka sama tentang hukumnya, maka hukum yang disepakati itu merupakan hukum syara' yang wajib diikuti dan mengikat seluruh ummat Islam.

⁶⁵ Jumhur ulama berpendapat bahwa kedudukan *ijma'* menempati salah satu sumber atau dalil hukum sesudah al-Qur'an dan sunnah, ini berarti *ijma'* dapat menetapkan hukum yang mengikat dan wajib dipatuhi ummat Islam apabila tidak dijumpai ketetapan hukumnya dalam al-Qur'an maupun sunnah. Untuk menguatkan pendapat ini jumhur ulama mengemukakan beberapa ayat al-Qur'an. Pertama: surat an-Nisa ayat 115 yang artinya: *dan Barangsiapa yang menentang Rasul sesudah jelas kebenaran baginya, dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, Kami biarkan ia leluasa terhadap kesesatan yang telah dikuasainya itu] dan Kami masukkan ia ke dalam Jahannam, dan Jahannam itu seburuk-buruk tempat kembali.* Frase pada ayat ini "jalan-jalan orang mukmin" di artikan sebagai apa yang telah disepakati untuk dilakukan orang mukmin. Inilah yang disebut *ijma'* kaum mukminin. Orang yang tidak mengikuti jalan orang mukmin mendapat ancaman neraka jahannam. Hal ini berarti, larangan mengikuti jalan selain apa yang diikuti kaum mukminin, artinya adanya suruhan untuk mengikuti *ijma'*. Kedua: surat al-Baqarah ayat 143 dan demikian (pula) Kami telah menjadikan kamu (umat Islam), umat yang adil dan pilihan agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu. dan Kami tidak menetapkan kiblat yang menjadi kiblatmu (sekarang) melainkan agar Kami mengetahui (supaya nyata) siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang membelot. dan sungguh (pemindahan kiblat) itu terasa Amat berat, kecuali bagi orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah; dan Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada manusia. ayat di atas mensifati ummat Islam dengan "wasath" yang berarti "adil". Ayat ini memandang bahwa ummat Islam itu adalah hujjah yang mengikat terhadap manusia untuk menerima pendapat mereka sebagaimana ucapan Rasul menjadi hujjah terhadap kita. *Ijma'* berkedudukan sebagai hujjah tidak lain artinya kecuali bahwa pendapat mereka itu menjadi hujjah terhadap yang lainnya. Lihat Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Juz II (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 138-139.

⁶⁶Ensiklopedi Hukum Islam, jilid 2, Cet. VII, (Jakarta: Rajawali Press, 1998), hlm. 24.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tidak dikatakan ijma'.⁶⁷ Disamping hal yang telah dijelaskan, ijma' tersebut dilakukan setelah wafatnya Rasulullah SAW oleh ulama yang memiliki kemampuan dan memenuhi syarat untuk melakukan ijtihad dan hukum yang disepakati itu adalah hukum syara'.⁶⁸

Maksud ijma' dalam hukum kewarisan Islam adalah kesepakatan para ulama baik dari kalangan sahabat Rasulullah atau para ulama yang datang setelahnya, mengenai ketentuan warisan yang terdapat dalam al-Qur'an dan Sunnah atau hadist. Demikian pula halnya dengan ijtihad para sahabat dijadikan sebagai dalil atau sumber hukum Islam, apabila tidak ditemukan dalil dalam al-Qur'an dan hadits seperti kasus bagian kakek dengan saudara simayit.

Kasus atau permasalahan yang disebutkan di atas tidak didapati penjelasannya dalam al-Qur'an dan hadist Rasulullah, akan tetapi al-Qur'an hanya menyebutkan masalah kewarisan ayah dengan saudara-saudara si mayit dan kewarisan ayah dengan cucu.⁶⁹ Oleh karena demikian, perlu adanya ijtihad yang dapat melahirkan ketetapan hukum syara' dalam masalah tersebut. Ijtihad adalah mencurahkan segala kemampuan atau memikul beban, yaitu usaha yang sungguh-sungguh yang dilakukan seseorang mujtahid untuk mencapai suatu putusan

⁶⁸ *Ibid.*

⁶⁹ Muhammad Mas'um Zaen, *Fikih Mawaris*, Cet. I, (Jatim: Darul-hikmah, 2008), hlm.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hukum syara' tentang kasus yang penyelesaiannya belum tercantum dalam al-Qur'an dan hadist Rasulullah SAW.⁷⁰

Pasca Rasulullah wafat, permasalahan yang dihadapi para sahabat semakin berkembang dan rumit. Kebanyakan dari permasalahan yang timbul dalam masyarakat tidak didapati dasar hukumnya dalam al-Qur'an dan hadist secara *sharih* atau jelas. Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, para sahabat melakukan ijtihad, baik secara bersama-sama melalui musyawarah maupun secara pribadi. Karena ijtihad merupakan salah satu cara yang utuh dalam menetapkan hukum dalam kasus-kasus tertentu.

Ijtihad sebagai sumber hukum kewarisan Islam, yakni merupakan pemikiran sahabat Rasulullah saw atau pemikiran para ulama dalam menyelesaikan kasus pembagian harta warisan, yang belum atau disepakati, seperti permasalahan *rād* atau *'aul* dan juga terkait dengan permasalahan yang di angkat oleh penulis dalam disertasi ini, yaitu terkait dengan kewarisan *tirkah syubhāt* yang didalamnya terdapat perbedaan pendapat para ulama, tentunya sejalan dengan hasil ijtihad masing-masing sahabat, tabi'in dan ulama berikutnya dari kalangan tabi'in dan ulama pengikut setelahnya (atba' al tabi'in).

perlu diketahui, meskipun hukum kewarisan Islam yang sering disebut dengan *farā'id* (ketentuan) yakni ketentuan yang telah ditetapkan

⁷⁰ Ensiklopedi Hukum Islam, jilid 2, Cet. VII, hlm. 24.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

secara pasti bagianya. Namun, dalam penerapannya sering dijumpai kasus-kasus yang menyimpang atau tidak sama persis dengan apa yang dikehendaki oleh al-Qur'an dan sunnah atau hadist, sehingga perlu adanya upaya untuk melakukan ijtihad agar dapat menemukan hukumnya. Dalam berijtihad tetap juga berpedoman kepada al-Qur'an dan sunnah atau hadist Rasulullah. Jadi, jelasnya bahwa penyelesaian pembagian warisan, ketantuan bakunya dalam al-Qur'an dan sunnah tetap dipedomani untuk menentukan porsi bagian dalam penyelesaian pembagian harta warisan.

Penelitian ini penulis menggunakan *ijmā'* dan atau *ijtihad* para ulama untuk membantu mencari pendapat-pendapat para fuqaha yang dikhususkan pada pandangan empat mazhab dalam menentukan kedudukan harta *syubhāt* dan relevansinya dengan asas *ijbarī* dalam kewarisan Islam, apakah ada kesamaan mengenai hal tersebut ataukah terdapat perbedaan pendapat dalam menentukan kedudukan harta *syubhāt* tersebut dalam kewarisan. Oleh karena demikian penulis menilai perlu disebutkan *ijma'* dalam pembahasan ini, agar bisa tercapai tujuan akhir dari penelitian ini yaitu menganalisa kesepakatan ulama dalam hal status hukum mewarisi harta *syubhāt* kepada ahli waris.

3. Istilah dan Klasifikasi Bahagian dalam Kewarisan

Terdapat beberapa istilah penting yang perlu diketahui dan dijelaskan dalam kewarisan Islam. Hal ini dianggap perlu oleh penulis,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengingat tulisan yang akan dibahas berkaitan erat dengan kewarisan. Kendati istilah-istilah dalam kewarisan tersebut banyak, dalam penulis disertasi ini, penulis hanya menjelaskan beberapa istilahnya saja, diantaranya adalah:

a. *Farūḍhul Al-Muqaddarah*

Furūḍul al-Muqaddarah adalah bagian-bagian pasti atau konkrit⁷¹ dalam kewarisan yang akan diberikan kepada ahli waris pada saat meninggalnya pewaris yang ditetapkan al Quran, hadits Nabi saw dan ijma' para ulama.⁷² Islam dalam al-Qur'andan hadistnya telah menetapkan bahwa jumlah *furūdu al-muqaddarah* tersebut adalah enam macam, yaitu 1/2, 1/4, 1/8, 2/3, 1/3, dan 1/6.⁷³

Ahli waris yang mendapatkan bagian seperdua (1/2) atau setengah dalam penjelasannya disebutkan bahwa terdapat lima kelompok, sebagaimana yang akan dipaparkan oleh penulis berikut ini:
Pertama: Suami, suami mendapatkan bagian 1/2 atau setengah⁷⁴ tersebut apabila istrinya tidak meninggalkan anak, baik anak dari perkawinan antara keduanya, artinya suami yang ditinggal mati oleh istrinya pada

⁷¹ Imam Taqiyu Al-din Al-Hisnī, *Kifāyatu al-akhyār fī hil ghāyatu al-ikhthishār*, jilid II, (Surabaya: Al-Haramain, 2005 M), hlm. 17.

⁷² Imam Taqiyu Al-din Al-Hisnī, *Kifāyatu al-akhyār fī hil ghāyatu al-ikhthishār*, jilid II, (Surabaya: Al-Haramain, 2005 M), hlm 23. Lihat juga: Amin 'Abdu Al-Ma'bud, *ahkam al-miras wa al-washiyyah fī syari'ati al-islam*, Cet IV(Kairo: Dar Al-Andalus li Al-Thaba', 2010), hlm. 100.

⁷³ Sayyid Sabiq, *fiqhu al-Sunnah*, jilid III, Cet. XXI (Kairo: Dar al-Fathi lil I'ilmī al-Arabiyy, 1999), hlm. 295. Lihat juga: Imam Taqiyu Al-din Al-Hisnī, *Kifāyatu al-akhyār fī hil ghāyatu al-ikhthishār*, jilid II, (Surabaya: Al-Haramain, 2005 M), hlm. 22.

⁷⁴ Imam Taqiyu Al-din Al-Hisnī, *Kifāyatu al-akhyār fī hil ghāyatu al-ikhthishār*, jilid II, (Surabaya: Al-Haramain, 2005 M), hlm. 23.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

saat ia meninggal dunia, maupun anak yang lahir dari hasil perkawinan istri dengan suami sebelumnya. Keturunan juga dimaksudkan jalur garis kebawahnya dalam hal ini adalah cucunya dari anak laki-lakinya. Allah berfirman:

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ

وَلَدٌ

Artinya: *Bagian kalian (suami-suami) adalah seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isteri kalian jika mereka tidak mempunyai anak,*” (QS. al-Nisa’ [4]: 12).

Kedua: Anak perempuan, maksudnya adalah anak perempuan kandung yang lahir dari rahim ibunya setelah terjadinya akad nikah yang sah. Anak perempuan kandung mendapatkan bagian 1/2 atau setengah⁷⁵ apabila anak perempuan tersebut tunggal atau sendirian, dalam hal ini sebagaimana firman Allah yang telah disampaikan di dalam al-Qur’an” (QS. al-Nisa’ [4]: 11).

وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ

Artinya: *“Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja atau tunggal, maka anak perempuan tersebut memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan) atau seperdua bagian yang tinggalkan oleh pewarisnya,*

Ketiga: Cucu perempuan dari anak laki-laki ketika dalam kasus yang akan diselesaikan tidak terdapat anak perempuan kandung, karena

⁷⁵ Ibid

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menurut *ijma'* ulama, cucu perempuan dari anak laki-laki masih termasuk kategori anak perempuan. Cucu perempuan dari anak laki-laki mendapatkan bagian 1/2 tersebut berdasarkan qiyas⁷⁶, artinya dalam ayat al-Qur'an tidak dijumpai adanya ayat yang menjelaskan secara nyata atau terang-terangan tentang bagian cucu perempuan dari anak laki-laki, akan tetapi hanya bagian anak perempuan saja yang dijelaskan di dalam al-Qur'an.

Keempat: Saudari kandung. Bagian seperdua (1/2) yang diperoleh saudari kandung, sesuai dengan firman Allah dalam surah al-Nisa', "*Dia tidak mempunyai anak tetapi mempunyai saudari, maka bagiannya (saudarinya itu) seperdua dari harta yang ditinggalkannya,*" (QS. al-Nisa' [4]: 176). Saudari kandung akan memperoleh bagian yang telah disebutkan apabila ia tunggal dan tidak bersama ayah, dan anak laki-laki serta juga tidak bersama saudara yang sederajat dengannya, yaitu saudara kandung.⁷⁷ Saudari kandung akan mendapatkan bagian yang berbeda dengan yang telah disebutkan (1/2), bila bersama-sama dengan orang yang telah disebutkan di atas.

⁷⁶Kewarisan cucu perempuan dari anak laki-laki memang tidak disebutkan bagiannya oleh Al-Qur'an secara jelas atau secara terang-terangan, akan tetapi dalam pemahamannya secara terdapat didapati bahwa yang dimaksud dengan anak dalam penjelasan ulama juga dikategorikan jalur keturunan kebawah, makanya ada nash kitab turats yang menyebutkan bahwa maksud kalimat "*wal-in safal*" artinya kebawah, dalam keterangannya dijelaskan bahwa termasuk ahli waris yang mendapatkan kewarisan dari jalur perempuan tersebut adalah anak perempuan dan cucu perempuan dari anak laki-laki. Lihat Syarahan Al Bujairimi Al Syafi'i (w 1221 H), *Tuhfatul al Habib 'ala Syarhi al Khatib al-ma'ruf bi al-Iqna' fi hilli al Al-fadh abi Syuja'*, Juz IV, (Bairut: Dar al-Kutub al Ilmiyah, 1996 M), hlm. 11.

⁷⁷ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), hlm. 326.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kelima: Saudari seayah akan mendapatkan bagian 1/2 ketika si mayyit tidak meninggalkan ahli warisnya dari saudara kandung, karena saudara seayah menempati kedudukannya. Bagian seperdua tersebut, akan diperoleh saudara seayah, ialah apabila ia sendirian atau tunggal⁷⁸. Bila saudara seayah bersama saudara yang sederajat dengannya (saudara seayah), atau saudara lainnya, maka bagian hak waris ahli waris lainnya akan berubah sebagaimana penjelasan berikutnya.

Ahli waris yang mendapatkan bagian Seperempat (1/4) dalam kewarisan dibagi menjadi dua kelompok, hal ini dijelaskan sebagaimana berikut. *Pertama* Suami yang bersama dengan anak atau cucu dari anak laki-laki. Allah berfirman, “ *Jika mereka (istri-istri kalian) itu mempunyai anak, maka kalian mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya,*” (QS. al-Nisa’ [4]: 12). Cucu dari anak laki-laki berkedudukan sama dengan anak sebagaimana penjelasan terdahulu. *Kedua:* Istri yang tidak bersama anak atau cucu dari anak laki-laki. Allah berfirman, “ Istri dari orang yang meninggalkan harta warisan memperoleh bagian seperempat harta yang ditinggalkan jika suaminya tidak mempunyai anak atau keturunan melalui jalur garis anak laki-laki,” (QS. al-Nisa’ [4]: 12). Cucu dari anak laki-laki berkedudukan sama dengan anak sebagaimana penjelasan terdahulu.

⁷⁸ *Ibid*, hlm. 327.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ahli waris yang memperoleh bagian *furūdhul al-muqaddarah* seperdelapan terdiri dari satu kelompok ahli waris saja, yaitu istri ketika suaminya meninggalkan keturunan baik keturunannya langsung yaitu anak kandung atau cucu dari anak laki-laki dan seterusnya dari garis keturunannya laki-laki kebawah. Allah berfirman, “*Jika kalian (suami-suami) mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kalian tinggalkan,*” (QS. al-Nisa’ [4]: 12). Cucu dari anak laki-laki berkedudukan sama dengan anak sebagaimana penjelasan terdahulu.

Ahli waris yang mendapatkan bagian yang telah ditentukan atau *furudhu al-Muqaddarah* duapertiga ($\frac{2}{3}$) dalam kewarisan terbagi dalam empat kelompok, sebagaimana berikut:

Pertama: Dua anak perempuan atau lebih, apabila tidak bersamaan dengan anak laki-laki atau tidak ada hal lainnya yang menghalanginya untuk mendapatkan bagian tersebut.⁷⁹ Allah berfirman, “*Jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian yang akan diperoleh anak perempuan tersebut adalah dua pertiga dari harta yang ditinggalkan.* Akan tetapi, dalam masalah yang disebutkan di atas, para ulama berselisih pandangan, sebagian dari ulama mengatakan, bahwa dua orang anak perempuan yang ditinggalakan oleh pewarisnya akan mendapatkan bagian dua pertiga $\frac{2}{3}$, argumen yang

⁷⁹ Muhammad Thāha Abu al ‘Ulā Khalifah, *Ahkām al-mawarist dirāsah thatbiqiyah*, (Kairo: Darussalam, 2015 M/1436 H), hlm 64-70.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

digunakan oleh golongan ulama ini adalah, bahwa penggalan ayat pada surah al-Nisā' yaitu "*fauqā isnataini*" ini bermakana *min*, sehingga maksudnya adalah dimulai dari dua. Artinya, apabila jumlah anak perempuan yang ditinggalkan adalah dua orang, maka bagian yang akan diperolehnya adalah dua pertiga ($\frac{2}{3}$).

Ulama lain mengatakan, bahwa: dua anak perempuan yang ditinggalkan oleh pewaris tidak diberikan bagian dua pertiga $\frac{2}{3}$, ulama yang menyebutkan pandangan tersebut mengemukakan alasannya bahwa penggalan ayat al-Qur'an yang berada dalam surah al-Nisā' yaitu kalimat *fauqā* bermakna '*alā*' yang artinya di atas, sehingga maksud dari *frasa* ini adalah apabila anak perempuan di atas dua orang, maka bagian yang akan diperolehnya adalah dua pertiga, apabila jumlah anak perempuan yang tinggalkan pewaris tidak melebihi dua orang atau hanya dua orang saja, maka bagian yang didapatinya kembali kepada bagian asalnya, yaitu seperdua ($\frac{1}{2}$) dari harta yang tinggalkan.⁸⁰

Kedua: ahli waris yang memperoleh bagian kewarisan dua pertiga adalah: Dua cucu perempuan dari anak laki-laki atau lebih, baik mereka dari satu ayah atau beberapa ayah. Ketiga dan keempat ahli waris yang memperoleh bagian dua pertiga ($\frac{2}{3}$) adalah dua orang saudara kandung atau lebih, atau seayah ketika tidak bersama saudara kandung dan tidak ada ahli waris yang mengakibatkan mereka

⁸⁰*Ibid*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mendapatkan sisa atau menghalanginya. Allah berfirman, “ *Tetapi jika saudari itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan,*” (QS. al-Nisa’ [4]: 176).

Ayat di atas turun dalam menjelaskan tujuh saudari Jabir, setelah ia sakit keras dan bertanya mengenai ahli warisnya, sebagaimana hadits yang diriwayatkan oleh al-Bukhārī dan Muslim. Dengan demikian, yang dimaksud oleh ayat di atas adalah dua saudari atau lebih. Dan disamakan dengan mereka adalah dua anak perempuan dan dua anak perempuan dari anak laki-laki, bahkan mereka dikategorikan kepada pengertian anak, baik dalam pengertian hakiki maupun majazi.

Ahli waris yang mendapatkan bagian sepertiga dari *furūdhul al-muqadarah* yang telah ditetapkan ada dua kelompok, *Pertama*: Ibu yang tidak bersama dengan anak dan atau cucu dari anak laki-laki, dua saudara dan saudari, sekandung atau tidak, yang terhalangi bila bersama ahli waris lainnya, seperti saudara seibu, “ Jika yang meninggal tidak mempunyai anak dan diwarisi oleh kedua ibu bapaknya saja, maka ibunya mendapat sepertiga. Jika pewaris mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. Cucu dari anak laki-laki berkedudukan sama dengan anak sebagaimana penjelasan terdahulu. Menurut *ijma’* ulama yang dimaksud saudara-saudara adalah dua saudara atau lebih, selain itu, disyaratkan tidak terdapat bapak dan salah satu dari istri atau suami. Maka apabila ibu bersama mereka, ia

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mendapatkan sepertiga sisa. *Kedua*: satu orang atau lebih saudara seibu. Menurut Ibnu Mas'ud ra, maksud “mempunyai seorang saudara (seibu) atau seorang saudara (seibu)” adalah saudara dan saudara seibu (*aulād al um*), walau penafsiran ini tidak populer di kalangan ulama, akan tetapi, hadits yang menjelaskannya dikategorikan sebagai *hadits shahih* sehingga maknanya bisa dijadikan acuan dan diamalkan mengingat *hadits shahih* bersifat tauqifi (sesuatu yang pasti dari Nabi Muhammad SAW). Allah menyebut saudara dan saudara seibu dengan sebutan anak-anaknya ibu (*aulād al-um*) dan menyamakannya, karena mereka tidak mempunyai hak dan kesempatan untuk mendapatkan bagian sisa (*‘ashabah*). Berbeda dengan saudara kandung atau saudara seayah. Mereka bisa mendapatkan warisan melalui jalur *‘ashabah*. Dengan demikian, maka hak laki-laki adalah dua kali lipat hak perempuan, seperti dalam pembagian waris dua anak perempuan atau beberapa anak perempuan. Terkadang hak waris sepertiga untuk kakek yang bersama dengan saudara-saudara, apabila pembagiannya berkurang karena dibagi sama (*muqāsamah*). Contoh, kakek bersama tiga saudara atau lebih, maka hak sepertiga diberikan kepada tiga saudara itu dan kakek mendapat sepertiga.

Ahli waris yang mendapatkan bagian seperenam terbagi menjadi tujuh kelompok, sebagaimana berikut. 1) Ayah ketika bersama anak atau cucu dari anak laki-laki, baik laki-laki atau perempuan. 2) Kakek

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mendapatkan seperenam apabila tidak dijumpai bapak dalam kewarisan. Begitulah menurut pendapat ijma' ulama. 3) Ibu mendapatkan bagian yang disebutkan di atas ketika bersama anak atau cucu dari anak laki-laki, atau bersama para saudara dan saudari, dua orang atau lebih. 4) Nenek dari ayah atau ibu mendapatkan bagian seperenam ketika tidak ada ibu. 5) Cucu perempuan dan anak laki-laki yang bersama dengan anak perempuan kandung atau bersama cucu perempuan dari anak laki-laki yang lebih dekat darinya, dan tidak ada ahli waris '*ashabah* karena untuk menyempurnakan bagian dua pertiga. 6) Saudari seayah, satu atau lebih dari saudara kandung, dan tidak ada waris *ashabah* (*mu'ashib*), tidak ada orang tua dari kalangan laki-laki dan tidak ada keturunan dari kalangan laki-laki pula. Ini berdasarkan ijma' ulama untuk menyempurnakan bagian dua pertiga (bagian dari dua saudari) 7) Saudara seibu atau saudara seibu ketika tidak ada keturunan yang menerima waris dari kalangan laki-laki atau orang tua yang menerima waris dari kalangan laki-laki pula. Allah berfirman, "*Apabila seorang laki-laki atau perempuan tidak mempunyai anak, dan mempunyai saudara dan saudari, maka masing-masing dari keduanya mendapatkan seperenam*" (QS.al-Nisa').

Akan tetapi seiring dengan perjalanan penyebaran Agama Islam dalam beberapa kasus yang diselesaikan oleh para sahabat Rasulullah, terutama Umar Ibn Khattāb didapati bahagian kewarisan lainnya selain

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dari bahagian yang telah disebutkan di atas, bagian tersebut adalah $\frac{1}{3}$ sisa, hal ini terjadi dalam kasus yang di istilahkan dengan *al-gharawān*. Kasus tersebut adalah apabila ahli waris terdiri dari suami dan atau istri dan kedua orang tua si pemilik harta. Dalam putusannya Umar Ibn Khattāb menetapkan bahagian $\frac{1}{3}$ sisa kepada ibu si mayyit, bukan bahagian $\frac{1}{3}$ sempurna.

b. Ahli Waris

Yaitu seluruh ahli kerabat dan atau yang memiliki ikatan hubungan perkawinan dengan pemilik harta yang akan menerima estafet kepemilikan harta peninggalan mayyit⁸¹ (orang-orang yang berhak menerima harta peninggalan pewaris) baik karena sebab pernikahan, keturunannya, maupun memerdekakan hamba sahaya. Dalam hal ini adalah anak-anak, baik laki-laki maupun perempuan, kecil maupun yang sudah cakap hukum.

Orang tua si mayyit juga termasuk ahli waris yang berhak menerima harta warisan, baik orang tua laki-laki, maupun orang tua perempuannya. Sama halnya dengan saudara-saudara si mayyit atau orang yang meninggalkan harta, dalam kewarisan Islam saudara-saudaranya tersebut termasuk dalam kategori ahli waris, baik dari golongan *al-‘ayān* (sebapak dan juga seibu), atau hanya saudara sebapak

⁸¹ Sayuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Cet. 1, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 99.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

saja dengan si mayit juga termasuk ahli waris, baik laki-laki maupun perempuan.

Kewarisan Islam juga mengkatagorikan saudara-saudara si mayyit yang hanya kekerabatannya dengan si pewaris tersebut dari garis ibu (saudara tiri dari garis ibu), baik laki-laki maupun perempuan juga digolongkan dalam ahli waris yang akan mendapatkan harta warisan, baik saudara kandung maupun se ayah, artinya paman dari pemilik harta yang hubungan keturunannya melalui jalur kandung atau hanya seayah saja pun termasuk ahli waris.

Kewarisan Islam juga menjadikan orang-orang yang membebaskan hambasahaya (*mu'tiq* atau *mu'tiqah*) sebagai ahli waris, apabila hamba sahaya tersebut tidak memiliki ahli waris dari keturunan *nasab* atau sepertalain darah. Seluruh ahli waris yang telah disebutkan penulis, dijumpai bagian kewarisan yang mereka dapatkan sesuai dengan apa yang telah penulis sebutkan pada penjelasan sebelum ini.⁸²

c. *Muwarriṣt*

Muwarriṣt adalah orang yang meninggal dunia dan meninggalkan harta waris.⁸³ Karena *muwarriṣt* merupakan *ismu al-maf'ūl* yang berarti orang yang telah meninggal dan meninggalkan semua yang pernah dimilikinya. Dalam hal ini dikatakan ia sebagai *muwarriṣt* setelah

⁸² *Ibid*,

⁸³ Amin 'Abdu Al-Ma'bud, *ahkam al-miras wa al-washiyyah fi syari'ati al-islam*, Cet IV (Kairo: Dar Al-Andalus li Al-Thaba', 2010), hlm. 79.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

meninggalnya. Artinya, baik meninggal pemilik harta tersebut secara *haqiqi*⁸⁴, hukmi⁸⁵ dan atau dengan *taqdiri*.⁸⁶ Hal ini juga menjadi persyaratan dalam pengalihan harta warisan. Harta warisan tidak di distribusikan kepada ahli waris, apabila pemiliknya masih hidup. Oleh karena demikian, meninggal *muwarrist* merupakan salah satu diantara beberapa hal yang harus terpenuhi sebelum pelaksanaan pembagian harta warisan.

d. *Al-Ashlu*

Al ashlu merupakan asal usul adanya orang sebelumnya⁸⁷. dalam kewarisan, yang dimaksud dengan ushul adalah muara awal tempat

⁸⁴Meninggal *haqiqi* adalah hilangnya nyawa seseorang, baik meninggalnya tersebut disaksikan dengan pengujian, atau dengan pendekatan dan pembuktian, yakni kesaksian dua orang yang adil atau lebih atas kematian seseorang. Seperti seorang sakit yang disaksikan oleh dokter beserta keluarganya atau seseorang yang kemalangan di lalulintas atau tertimpa runtuh bangunan karena gempa bumi, serta banyak lagi peristiwa lain yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang. Lihat Komite Fakultas Syariah Universitas al-Azhar Mesir, *Ahkam al-Mawarist fi al-Fiqhi al-Islami*, Terjemaha oleh Adys Aldizar dan Fathurrahman, *Hukum Waris*, Cet.III (Jakarta: Senayan Abadi Publishing, 2011), hlm. 29.

⁸⁵Meninggal *hukmi* adalah suatu kematian yang disebabkan oleh suatu keputusan hakim, seperti seorang hakim memvonis kematian *mafqud* (orang hilang) yakni orang yang tidak diketahui kabar beritanya, tidak diketahui dimana keberadaannya dan tidak pula diketahui orang tersebut masih hidup atau sudah meninggal dunia. Maka status orang seperti ini, jika telah melewati batas waktu yang ditentukan untuk pencariannya, sehingga si *mafqud* dianggap hilang berdasarkan atas sangkaan yang kuat., dapat dikategorikan sebagai orang yang telah mati. Maksudnya secara yuridis, orang hilang tersebut telah mati, meskipun ada kemungkinan orang tersebut masih hidup. Lihat Komite Fakultas Syariah Universitas al-Azhar Mesir, *Ahkam al-Mawarist fi al-Fiqhi al-Islami*, Terjemaha oleh Addys Aldizar dan Fathurrahman, *Hukum Waris*, hlm. 29-30.

⁸⁶Meninggal *taqdiri* ialah suatu kematian yang berdasarkan atas dugaan sangat kuat. Seperti seorang bayi yang dilahirkan dalam keadaan mati, sedang ibunya masih hidup, ataupun bayi tersebut meninggal dunia setelah kematian ibu yang melahirkannya akibat pendarahan, yang mewajibkan pembayaran saksi dengan al-ghurrah (hamba sahaya atau budak perempuan yang disamakan dengan lima unta yang diberikan kepada ahli waris si bayi) sehingga si bayi didigugu karena meninggal akibat kejahatan tersebut, dimana ibunya mewarisi budak dari bayi.

⁸⁷Komite Fakultas Syariah Universitas al-Azhar Mesir, *Ahkam al-Mawarist fi al-Fiqhi al-Islami*, Terjemaha oleh Addys Aldizar dan Fathurrahman, *Hukum Waris*, hlm.127.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terjadi pendistribusian kewarisan. Artinya orang tua si pemilik harta, dalam hal ini adalah ayah dan ibunya pewaris.

e. *Al-Furu'*

Furu' merupakan makna dari golongan garis lurus kebawah. Ahli waris yang termasuk dalam katagori *furu'* adalah anak keturunan si mati, diantaranya adalah: *Pertama:* anak laki, cucu, cicit, dan jalur kebawahnya. *Kedua:* anak perempuan, cucu, cicit, dan jalur kebawahnya. Paparan tentang ahli waris yang menjadi *furu'* dalam kewarisan dapat kita pahami bahwa *furu'* merupakan ahli waris dari jalur keturunan atau dari golongan garis lurus kebawah.

f. *Al-‘Ashabah*

Ashabah (orangnya disebut *‘ashib*) adalah yang akan mendapatkan semua harta yang ditinggalkan oleh pewarisnya, ketika ia hanya sendiri artinya tidak ada ahli waris yang mengahlanginya. *‘ashabah* juga dapat bermakna orang-orang yang mendapatkan sisa harta setelah pembagian kepada *as-habul furudh*,⁸⁸ dan ia tidak mendapatkan apa-apa jika tidak ada sisa dari pembagian kepada *as-ḥābu al-furūdḥ*. Hal ini senada dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam*, “Hubungkanlah *Farā’idh* (bagian warisan) kepada orang yang berhak. Selebihnya kepada laki-laki yang terdekat.”

⁸⁸ Amin ‘Abdul Ma’bud Al-Zaglul, *Ahkam al-mirast wa al-Washiyyah*, hlm. 169.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Para ulama mengklasifikasi ‘*ashabah* menjadi tiga katagori,⁸⁹ sebagaimana akan dijelaskan berikut ini:

1) ‘*Ashabah bi al-nafsih*.

Istilah ‘*ashabah bi al-nafsih* karena sebagai ‘*ashabah* (yang mengambil sisa) karena faktor dirinya sendiri. Adapun yang menjadi ‘*ashabah bi al-nafsih* secara hirarkinya atau urutannya adalah:

- a) *Bunuwwah* (anak laki-lai dan seterusnya ke bawah), dinamakan juga *furū*’.
- b) *Ubuwwah* (bapak dst. ke atas), dinamakan juga *ushūl* atau asal keluarga dari pewaris.
- c) *Ukhuwwah* (saudara dan anak-anaknya), dinamakan juga *hawāsyi qarībah* (dekat).
- d) ‘*Umumāh* (paman dan anak-anaknya), dinamakan juga *hawāsyi ba’īdah* (ahli waris dari pihak yang jauh).
- e) *Mu’tiq* (hamba sahaya yang dimerdekakan baik laki-laki maupun perempuan).
- f) *Baitul māl*.

Namun apabila dalam penyelesaian suatu perkara kewarisan semua ahli waris yang mendapatkan bahagian ‘*ashabah* termasuk didalamnya, maka yang berhak mendapatkan warisan hanya dari garis keturunan dan ayah akan memperoleh *furudh* atau bagian tertentu, yaitu 1/6, selain keduanya *mahjub* (terhalang).

⁸⁹ Ibid

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2) ***‘Ashabah bi al-ghairih.***

‘Ashabah bi al-ghairih adalah ahli waris dari pihak perempuan yang awalnya mendapatkan bagian tertentu (*al-ḥābu al-furūdh*), tetapi berubah mengambil sisa semua harta karena ada ahli waris lain yang menyebabkannya menjadi *‘ashabah*. Ahli waris yang menarik itu disebut *mu’āshib*. Dalam hal ini *farḍh* (bagian) nya tidak berlaku, dan ia hanya berbagi dengan *mu’āshibnya* (laki-laki mendapatkan dua bagian, sedangkan wanita satu bagian). Ahli waris yang mendapatkan bahagian *‘ashabah bi al-ghair* terbagi menjadi empat: *Pertama*: anak perempuan sekandung, *mu’āshibnya* (yang menjadikan *‘ashabah*) adalah anak laki-laki yang sekandung dengannya (laki-laki mendapatkan dua bagian, sedangkan wanita satu bagian). *Kedua*: Cucu perempuan dari anak laki-laki, *mu’āshibnya* adalah cucu laki-laki, cicit laki-laki dari cucu laki-laki dari anak laki-laki jika diperlukan, *Ketiga*: Saudari kandung, *mu’āshibnya* adalah saudara kandung dan *Keempat*: Saudari seayah, *mu’āshibnya* adalah saudara seayah.

3) ***‘Ashabah ma’a al-ghairih.***

‘Ashabah ma’a al-ghairih adalah setiap perempuan dari jalur saudara si mayyit baik sekandung maupun saudara seayah, tatkala dalam kasus kewarisan bersama dengan ahli waris dari jalur anak perempuan kandung dan cucu perempuan, maka menjadi *‘ashabah*,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tetapi orang lain itu tidak bersama-sama menerima *'ashabah*. Artinya yang menjadi *'ashabah* disini adalah perempuan dari jalur lainnya.

'Ashabah ma'a al-ghairih dalam kewarisan terdapat hanya 2 orang ahli waris saja:

- a) Saudari kandung baik seorang diri atau lebih bersama anak perempuan kandung atau cucu perempuan dari anak laki-laki,
- b) Saudari seayah baik seorang diri atau lebih bersama puteri atau puteri dari anak laki-laki.
- c) Saudari kandung atau seayah jika sendiri mengambil sisanya setelah anak perempuan atau cucu perempuan mengambil bagian sebagai as-habul furudh. Tetapi jika saudari kandung atau seayah lebih dari satu, maka mengambil dengan dibagi rata. Perlu diperhatikan, saudari kandung menghalangi saudari seayah, dan saudari seayah menghalangi anak saudara secara mutlak seperti halnya saudara seayah ketika ia menjadi *'ashabah*, artinya status saudari kandung atau seayah akan menjadi penghalang kewarisan ahli waris berikutnya ketika ia pada posisi *'ashabah*.

Rukun-rukun Kewarisan

Berbicara tentang rukun kewarisan, penulis dalam sub bab berikut ini berupaya untuk memaparkannya dari beberapa buku yang membahas tentang permasalahan tersebut. dalam buku 'Ali al-shabuni ia menyebutkan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ada tiga hal yang menjadi rukun kewarisan⁹⁰ diantaranya adalah: *al-Muwarrits*, yaitu orang yang meninggalkan harta peninggalannya atau orang yang mewariskan hartanya. Syaratnya, *al-muwarrits* benar-benar telah meninggal dunia, apakah meninggal secara hakiki, secara yuridis (*hukmi*) atau secara *taqdiri* berdasarkan perkiraan.

Al-Warits atau ahli waris. Ahli waris adalah orang yang dinyatakan mempunyai hubungan kekerabatan baik karena hubungan darah, hubungan sebab perkawinan, atau karena akibat memerdekaan hamba sahaya. Syaratnya, pada saat meninggalnya *al-muwarrits*, ahli waris benar-benar dalam keadaan hidup. Termasuk dalam pengertian ini adalah, bayi yang masih berada dalam kandungan. Meskipun masih berupa janin, apabila dapat dipastikan hidup, melalui gerakan (kontraksi) atau cara lainnya, maka bagi si janin tersebut berhak mendapat warisan.

Al-Mauruts atau *al-mirats*, yaitu harta peninggalan si mayit setelah dikurangi biaya perawatan jenazah, pelunasan utang dan pelaksanaan wasiat. Ketiga rukun kewarisan yang telah disebut di atas, dalam prosesi pembagian harta warisan tentunya akan menjadi syarat yang mutlak atau mesti ada sebagai syarat dalam pengalihan estafet harta si mayit tersebut, tatkala ketiga hal tersebut telah terpenuhi, maka barulah prosesi pembagian harta warisan dikukuhkan. Hal ini disebabkan oleh keharusan yang mutlak yang melekat pada syarat untuk melakukan pembagian harta warisan yang

⁹⁰Muhammad Ali Ashabuni, *Pembagian warisan menurut Islam*, ter, A. Basalamah, (Jakarta: Gema insani pres, 1995), hlm. 4.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mungkin dipahami suatu keharusan untuk melakukan pendistribusian harta warisan kepada penerusnya, yaitu ahli waris. akan tetapi, hemat penulis bahwa syarat yang telah disebutkan di atas, tingkat kepastiannya bersifat tidak mutlak. Oleh karena demikian syarat yang telah ada bisa ditambah dengan syarat-syarat lainnya seperti membersihkan harta sebelum pembagian harta warisan, dan lain sebagainya.

Sebab-sebab Kewarisan

a. Sebab⁹¹-Sebab Kewarisan Masa Jahiliyah

Bangsa Arab pada masa jahiliyah memiliki sifat kekeluargaan patrilineal. Bangsa Arab pada masa jahiliyah tergolong salah satu bangsa yang gemar mengembara dan berperang. Kondisi daerahnya kering dan tandus mengharuskan mereka menjalani hidup penuh keberanian dan keras. Mata pencaharian bangsa Arab pada masa tersebut yang paling utama adalah berdagang yang dilakukan dengan cara menempuh perjalanan jauh dan berat. Permusuhan antara kabilah dengan kabilah lainnya seringkali menyebabkan peperangan, yang menang berhasil membawa harta rampasan. Beberapa hal tersebut

⁹¹ Sabab dalam arti etimologi berarti sesuatu yang dapat menyampaikan kepada apa yang dimaksud. Sepotong tali atau suatu jalan dapat dinamakan "sabab" karena keduanya itu dapat membawa pada tujuan yang dituju. Dalam bahasa Indonesia, sabab disebut dengan sebab. Sebab secara terminologi adalah sesuatu yang jelas, dapat diukur, yang dijadikan pembuat hukum sebagai tanda adanya hukum, lazim dengan adanya tanda itu ada hukum dan dengan tidak adanya tanda tersebut, tidak adanya hukum. Seperti contoh: masuknya bulan Ramadhan menjadi pertanda datangnya kewajiban puasa Ramadhan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mempengaruhi kematangan cara berpikir mereka yang serba mengandalkan kepada kekuatan fisik.⁹²

Tradisi pembagian harta warisan pada zaman jahiliyah, dengan cara berpegang teguh pada tradisi yang telah diwariskan oleh nenek moyang atau leluhur pendahulunya. Prosesi pembagian harta warisan pada masa jahiliyah tersebut dengan mempertimbangkan kedewasaan dari sisi umur. Artinya, dalam arti lain anak-anak belum dianggap dewasa, yang belum dapat untuk pergi menghadapi musuh-musuh kabilahnya atau berperang membantu kaumnya dan juga anak perempuan dilarang mempuni harta peninggalan ahli warisnya yang telah meninggal dunia.

Jahiliyah pada masa itu beranggapan bahwa anak laki yang belum dewasa, anak perempuan, dan orang yang sudah berusia lanjut adalah orang-orang yang lemah fisiknya dan dinilai tidak berharga. Karena wanita, anak kecil dan orang lanjut usia tidak mampu untuk mencari nafkah, tidak sanggup berperang untuk merampas harta musuh, sehingga mereka tidak berhak menerima harta waris dari keluarga atau orang tuanya sendiri. Penjelasan di atas dapat dipahami, bahwa terdapat beberapa sebab untuk mendapatkan harta warisan pada masa *jahiliyah*:

⁹²Tengku Muhammad Hasbi Ash Shiddiey. *Fiqh Mawarist*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001), hlm. 5.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

karena hubungan kekerabat, karena sebab janji setia, karena sebab pengangkatan anak.⁹³

1) Hubungan Kekerabatan

Kekerabatan adalah hubungan nasab antara orang yang mewariskan dengan orang yang mewarisi yang disebabkan oleh kelahiran. Dalam tradisi bangsa Arab jahiliyah tempo dulu, kekerabatan saja antara ahli waris dengan pewaris tidak menjadikan sebab untuk mendapatkan harta peninggalan keluarganya, selama tidak dilengkapi dengan kekuatan fisik atau jasmani yang sanggup untuk membela, melindungi, dan memelihara *qabilah* atau sekurang-kurangnya keluarganya sendiri.

Ketetapan yang ditetapkan kaum jahiliyah Arab tempo dulu, mengakibatkan anak-anak yang belum dewasa dan perempuan tidak dapat menerima pusaka. Pantangan untuk anak-anak yang belum dewasa terletak pada ketidak sanggupannya untuk berjuang, memacukan kuda untuk mengejar musuh, dan bermain pedang untuk mengalahkan lawan dalam membela suku dan warganya.

Perempuan kerana fisiknya tidak memungkinkan untuk mempergunakan senjata untuk bergulat di medan pertempuran, serta jiwa jiwa yang sangat lemah, sehingga anak perempuan dalam anggapan kaum jahiliyah harus disisihkan dari menerima pusaka.

⁹³ Fathurrahman, *Ilmu waris*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1975), hlm. 12.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dengan demikian, ahli waris yang akan mempusakai dalam tradisi kaum jahiliyah terdiri atas: anak laki-laki yang sudah dewasa, saudara laiki-laki, paman, dan semua anak-anak yang sudah dewasa.

2) Kerena Sebab Janji Setia

Janji prasetia, terjadi dan mempunyai kekuatan hukum untuk saling mewarisi pada masa jahiliyah, bila salah satu pihak telah mengikrarkan janji setianya kepada pihak lainnya. Seperti uagkapan “Darahku darahmu, pertumpahan darahku pertumpahan darahmu, perjuanganku merupakan perjuanganmu.

Sebagai akibat dari janji setia yang telah mereka setuju bersama, maka konsekwensi yang akan terjadi adalah: jika salah satu pihak telah mengadakan perjanjian dan kemudian meninggal dunia, maka pihak lain yang masih hidup berhak untuk mempusakai harta peninggalan patnernya yang mendahului meninggal dunia sebanyak $\frac{1}{6}$ bagian harta peninggalannya. Adapun sisa harta setelah dikurangi $\frac{1}{6}$ ini dibagi-bagikan kepada ahli warisnya.⁹⁴

3) Karena Sebab Pengangkatan Anak

Pada masa jahiliyyah, pengangkatan anak laki-laki yang telah diambil untuk dipelihara oleh seseorang sehingga menjadi salah satu anggota dalam keluarga yang memeliharanya, kemudian dijadikan sebagai anak angkat oleh orang yang mengangkatnya, sehingga status

⁹⁴ *Ibid*, hlm. 15.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kedudukan anak tersebut sudah menjadi anak nasab atau anak yang mempunyai hubungan kekerabatan. Dengan demikian, status hukum dalam hal saling mewarisi diberlakukan.

Apabila anak angkat tersebut beranjak dewasa, dan bapak angkatnya meninggal dunia. Maka, dalam tradisi Arab pada saat itu akan terjadinya saling mempusakai harta peninggalan bapak angkatnya seperti anak nasabnya sendiri. Karena ketika terjadi pengangkatan anak angkat kala itu, status anak tersbut diberlakukan seperti anak sendiri.

b. Sebab Kewarisan Pasca Islam

Pada masa awal Islam terdapat beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya saling mewarisi atau saling mempusakai, disamping karena adanya hubungan kerabat atau pertalian nasab⁹⁵, pada sub bab ini, penulis akan menjelaskan sebab-sebab terjadinya kewarisan, diantaranya: *al-Qarābah* (hubungan darah), pembatalan anak angkat untuk menjadi sebab kewarisan, hijrah dari Mekah ke Madinah, dan persaudaraan antara muhajirin dengan kaum anshar.

a. *Al-Qarābah*

Qarābah yang penulis maksud disini adalah hubungan kekerabatan. Kekerabatan adalah antara satu golongan dengan orang

⁹⁵Muhibbin, dan Abdul Wahid, *Hukum kewarisan Islam sebagai pembaharuan hukum positif di Indonesia*,(Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 35.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang lain mempunyai pertalian atau hubungan darah,⁹⁶ baik garis lurus ke atas maupun garis lurus ke bawah serta pertalian darah garis menyamping. Hubungan kekerabatan menjadi sebagai faktor penyebab terjadinya kewarisan setelah datang Islam, tidak terbatas pada anak laki-laki yang sanggup berperang saja, tetap berlaku untuk seluruh kerabat atau sanak family yang memiliki hubungan kekerabatan atau hubungan darah dengan pemilik harta.⁹⁷ Dasar hukumnya dapat dilihat pada garis hukum QS. al-Nisā' (4): 7, QS. al-Nisā' (4): 11, 12 176, sebagaimana sumber hukum kewarisan yang telah dijelaskan penulis pada pembahasan sebelumnya.

b. Pembatalan Anak Angkat Sebagai Sebab Kewarisan

Pembatalan kewarisan anak angkat, sebagaimana yang ditegaskan dalam Al-Qur'ansurah al-Ahzab (33): 4 yang berbunyi

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ ۖ وَمَا جَعَلَ
أَزْوَاجَكُمْ أَلْفَىٰ تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ ۚ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ
أَبْنَاءَكُمْ ۚ ذَٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ ۖ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ
يَهْدِي السَّبِيلَ

⁹⁶Syamsul Bahri Salahima, *Perkembangan pemikiran pembagian warisan dalam hukum Islam dan implementasinya pada Pengadilan Agama*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), hlm. 65.

⁹⁷ Sayuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Jakarta Sinar Grafika: 2016), hlm. 10.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: *Allah tidak menjadikan bagi seseorang dua hati dalam rongganya, dan ia tidak menjadikan isteri-isteri yang kamu zihar itu sebagai ibumu, dan ia tidak menjadikan anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu, hanyalah perkataan di mulutmu saja. Allah mengatakan yang sebenarnya dan ia menunjukkan jalan yang benar*

Hal ini dipahami, bahwa Allah memberikan pernyataan untuk kewarisan anak yang dijadikan sebagai anak angkat oleh seseorang menurut hukum adat Arab yang berlaku pada saat itu, telah dihapuskan atau tidak berlaku lagi dengan turunya ayat di atas. Dahulu dalam hukum adat Arab berlaku ketentuan bahwa anak angkat statusnya kedudukannya sama dengan anak kandung. Apabila telah terjadi pengangkatan anak maka akan berimplikasi terhadap kewarisan, artinya seorang anak angkat akan mewarisi sama seperti halnya anak kandungnya sendiri.

Allah membuat pernyataan dalam ayat tersebut di atas, apabila dihubungkan dengan hukum kewarisan bahwa kewarisan karena sebab pengangkatan anak tidak berlaku setelah datangnya Islam.

c. Hijrah dari Mekah Ke Madinah

Hijrah dari Mekkah ke Madinah pada awal Islam menjadi sebab untuk saling mewarisi atau saling pusaka-mempusakai. Hal ini disebabkan oleh karena kekuatan kaum muslimin pada saat itu masih sangat lemah, karena jumlah mereka sangat sedikit. Untuk menghadapi kaum musyrikin Quraisy yang sangat kuat dan banyak pengikutnya, maka Rasulullah memilih cara mempersaudara orang-orang yang telah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melakukan hijrah atau muhajirin dengan orang madinah (*anshar*) yang kala itu menaruh simpatiknya terhadap dakwah Rasulullah. Salah satu cara yang dipergunakan Rasulullah untuk mempersaudarakan kedua kaum tersebut dengan model kewarisan atau saling mewarisi antara dua kaum tersebut.

6. *Al-hajbu* dalam Kewarisan

Al-hajbu menurut bahasa (etimologi) berarti *al-man'u* menghalangi, mencegah⁹⁸, sedang menurut istilah (terminologi) hukum, yang dimaksud dengan *hijab* adalah penghalang sesuatu sebab hukum yang meniadakan seseorang dalam hal ini adalah ahli waris untuk mendapatkan harta warisan setelah adanya sebab hukum. Adapun hal-hal yang dapat menghalangi ahli waris untuk menerima warisan yang disebutkan oleh para ulama ada empat, yaitu: pembunuhan, berlainan agama, perbudakan dan berlainan negara.⁹⁹

a. Pembunuh

Pembunuhan yang dilakukan oleh ahli waris terhadap pewarisnya dapat menyebabkan tidak saling mewarisi harta peninggalan antara yang menbunuh dengan yang dibunuhnya. Demikian kesepakatan mayoritas (jumhur) Ulama. Berbeda halnya dengan golongan Khawarij yang menentang pendapat ini, alasan mereka bahwa ayat-ayat Al-Qur'an tidak mengecualikan pembunuh untuk mendapatkan harta warisan. Ayat

⁹⁸ Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum kewarisan Islam sebagai pembaharuan hukum positif di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 80.

⁹⁹ Amin 'Abdul Al-Ma'bud Zaghlul, *Ahkam al-Mirast wa al-Washiyyah*, hlm. 89.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mawaris seperti dalam surah an-Nisaa' ayat 11 dan 12 hanya memberi petunjuk umum, oleh karena itu, petunjuk umum ayat-ayat tersebut harus diamalkan sebagaimana adanya.

Adapun dasar hukum yang menjelaskan bahwa ahli waris yang membunuh pewarisnya untuk mewarisi harta peninggalan si mati adalah Hadist Rasulullah. Di antaranya adalah:

1) Riwayat Ahmad dari Ibn 'Abbas:

من قتل قتيلًا فإنه لا يرثه وإن لم يكن له وارث غيره وإن كان له والده أو ولده فليس لقاتل ميراث

Artinya: "Rasulullah SAW. bersabda: "Barangsiapa membunuh seorang korban, maka sesungguhnya ia tidak dapat mewarisinya, walaupun korban tidak mempunyai ahli waris selain dirinya sendiri. (Begitu juga) walaupun korban itu adalah orang tuanya atau anaknya sendiri. Maka bagi pembunuh tidak berhak menerima warisan." (Riwayat Ahmad)

2) Hadist Rasulullah SAW dalam sabdanya, yakni

القاتل لا يرث — رواه الترمذي¹⁰⁰

Artinya: *Pembunuh itu tidak mewarisi*

3) Riwayat al-Nasa'i yang artinya sebagai berikut "Rasulullah SAW. bersabda: "Tidak ada hak bagi pembunuh sedikit pun untuk mewarisi." (Riwayat al-Nasa'i)

Mengingat banyak jenis dan macam pembunuhan, maka pembunuhan yang mana yang dapat menghalangi pembunuh untuk mewarisi harta peninggalan pewaris. Ulama berbeda pendapat dalam

¹⁰⁰ Ibnu Majah, juz II, Hadist ke- 883. Riwayat Tirmizi, Juz III, Hadist ke- 288, (Darul Kutub Al-Islamiyah, 2006)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masalah ini, ulama Hanafiyah menjelaskan bahwa pembunuhan yang menjadi penghalang mewarisi adalah:

- a) Pembunuh yang dapat diberlakukan *qishas*. yaitu pembunuh yang dilakukan secara sengaja, direncanakan dan menggunakan peralatan yang dapat menghilangkan nyawa orang lain. Seperti pedang, golok, atau benda tajam lainnya. Yang secara umum dan kasat mata diduga dapat digunakan untuk membunuh,
- b) Pembunuh yang hukumannya berupa *kaffārāt*. yaitu pembunuh yang mirip sengaja, seperti seseorang sengaja memukul atau menganiaya orang lain tanpa disertai niat dan bertujuan untuk membunuhnya. Akan tetapi tiba-tiba orang yang dipukul tersebut meninggal dunia. Maka pembunuhnya yang tidak sengaja bertujuan untuk membunuh tersebut dikenakan kafarat. Menurut Abu Yusuf dan Muhammad al-Syaibani, pembunuh mirip sengaja dikategorikan sengaja, dengan menitik beratkan pada kematian korban. Jadi bukan teknis dan cara memukul atau menganiaya yang dilihat.
- c) Pembunuhan khilaf. Pembunuhan ini dapat dibedakan pada dua macam, *pertama*: khilaf maksud. Misalnya seseorang menembakkan peluru kepada sasaran yang dikira binatang dan mengana sasaran, lalu meninggal dunia. Ternyata yang terkena sasaran tersebut adalah manusia. *Kedua*, khilaf tindakan, seperti seorang menebang pohon,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tiba-tiba pohon yang roboh tersebut mengenai keluarganya yang melihat dari bawah hingga tewas.

- d) Pembunuhan dianggap salah. Misalnya seseorang membawa barang bawaan yang berat, tanpa disengaja bawaan tersebut jatuh dan menimpa saudaranya hingga tewas. Dalam hal ini, si pembawa bawan berat tersebut dikenai hukuman *kaffārat*.¹⁰¹

Lebih lanjut Ulama Hanafiyah mengatakan bahwa pembunuhan yang tidak menghalangi hak seseorang untuk mewarisi pewarisnya, ada empat yaitu:

- a) Pembunuhan tidak langsung.
- b) Pembunuhan karena hak, seperti algojo yang disertai tugas untuk membunuh si terhukum.
- c) Pembunuhan oleh orang yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum.
- d) Pembunuhan karena ‘*uzur*’, seperti pembelaan diri.

Ulama mazhab Malikiyah menyatakan bahwa pembunuhan yang menjadi penghalang mewarisi adalah:

- a) Pembunuhan sengaja.
- b) Pembunuhan mirip sengaja.
- c) Pembunuhan tidak langsung yang disengaja.

¹⁰¹ Amin ‘Abdul Al-Ma’bud Zaghlul, *Ahkam al-Mirast wa al-Washiyyah*, hlm. 90.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sementara pembunuhan yang tidak menjadi penghalang mewarisi adalah:

- a) Pembunuhan karena khilaf.
- b) Pembunuhan yang dilakukan oleh orang yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum.
- c) Pembunuhan yang dilakukan karena hak atau tugas, seperti algojo yang melaksanakan tugas hukuman *qishas*.
- d) Pembunuhan karena '*uzur* untuk membela diri.

Ulama mazhab Syafi'iyah menyebutkan pandangannya tentang pembunuhan yang menjadi penghalang untuk mendapatkan harta warisan adalah semua jenis pembunuhan merupakan penghalang mewarisi yang berlaku secara mutlak. Kalangan Syafi'iyah tidak membedakan jenis pembunuhan, apakah yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung, beralasan atau tidak beralasan. Oleh karena demikian, seorang algojo yang melakukan tembakan terhadap terdakwa yang masih ada hubungan keluarga, menyebabkannya tidak berhak mewarisi harta peninggalan si terpidana, kendatipun tidak ada ahli waris lainnya.¹⁰²

Bebeda halnya dengan Ulama Hanabilah yang mengemukakan pendapat yang lebih realistis, yaitu bahwa pembunuhan yang diancam dengan hukuman *qishas*, *kafarat* dan *diyatlah* yang dapat menjadi

¹⁰² Amin 'Abdul Al-Ma'bud Zaghlul, *Ahkam al-Mirast wa al-Washiyyah*, hlm.92. lihat juga *Mugni al-Muhtaj*, Juz 3, hlm 25-26, juga didapati dalam kitab yang ditulis oleh Al-Ramli, *Nihayatu al-Muhtaj*, Juz 6, hlm. 28-29.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penghalang mewarisi bagi ahli waris, yaitu: Pembunuhan sengaja, Pembunuhan mirip sengaja, pembunuhan yang dianggap khilaf, Pembunuhan khilaf, pembunuhan tidak langsung, pembunuhan oleh orang yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum.

Uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa mayoritas Ulama berpendapat bahwa semua jenis pembunuhan adalah menjadi penghalang mewarisi, kecuali pembunuhan yang hak yang dibenarkan oleh syariat Islam, seperti algojo yang melaksanakan tugas hukuman *qishas* atau hukuman bunuh lainnya, selain dari pembunuhan yang telah disebutkan dapat menghalangi ahli warinya untuk mendapatkan bahagian kewarisan. Penjabaran yang sangat terperinci terhadap pembunuhan sebagai hal yang dapat menghalangi seseorang untuk mendapatkan kewarisan karena syari' atau pembuat hukum tidak mengingan terjadinya pembunuhan pewaris oleh ahli warisnya.

b. Berbeda Agama

Berlainan agama yang menjadi penghalang untuk saling mewarisi adalah apabila antara ahli waris dan pewaris salah satu di antara keduanya beragama Islam sedangkan yang lainnya non muslim. Misalnya ahli waris beragam Islam sedangkan pewarisnya beragama Kristen, atau sebaliknya. Hal ini menyebabkan ahli warisnya tidak mendapatkan harta warisan yang ditinggalkan oleh pewarisnya. Konsekwensi yang telah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dijabarkan merupakan kesepakatan mayoritas Ulama. Dasar hukumnya adalah hadist Rasulullah riwayat al-Bukhari dan Muslim sebagai berikut:

عن أسامة بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ.

Artinya: “Orang Islam tidak mewarisi harta orang kafir dan orang kafir tidak mewarisi harta orang Islam.” (Muttafaq ‘alaih).¹⁰³

Hadis riwayat Abu Daud, al-Turmuzi, al-Nasa’i, dan Ibn Majah sebagai berikut:

لَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ الْمِلَّتَيْنِ شَيْئًا.¹⁰⁴

Artinya: “Tidak dapat saling mewarisi antara dua orang pemeluk agama yang berbeda-beda.” (HR al- ashāb al-Sunan).

Beberapa hadist lain yang membahas tentang perbedaan agama dapat menghalangi seseorang untuk mendapatkan harta warisan juga terdapat, akan tetapi dalam tulisan ini dicukupkan dua hadis di atas sebagai dasar hukumnya. Hadist di atas bahwa sanya Nabi Saw sendiri yang mempraktikkan pembagian warisan, di mana perbedaan agama dijadikan sebagai penghalang untuk saling mewarisi. Misalnya ketika paman beliau, Abu Thalib meninggal dunia dan pamannya belum masuk Islam. Oleh Nabi Saw. memberikan harta warisannya hanya kepada anak-anaknya yang masih kafir, sementara anak-anak yang telah memeluk Islam tidak diberikan bagian dari harta warisan tersebut.

¹⁰³ Abu Adullah Muhamad Ibn Isma’il al-Bukhari, *al-Jami’ al-Shahih*, juz II, (Kairo: al-Matba’ah al-Salafiyyah, 1400 H) hlm 87. Lihat Juga Abu al-Husai Muslim al Hajjaj al Nasayaburi, *al-Jami’ al-Shahih*, juz V, (Bairut: Dar al-Jay, t.th), hlm. 59.

¹⁰⁴

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penjelasan di atas dapat dipahami bahwa yang menjadi pertimbangan apakah antara ahli waris dan pewaris berbeda agama dapat mewarisi adalah pada saat pewarisnya meninggal dunia. Misalnya, ada seorang Muslim meninggal dunia, terdapat ahli waris anak laki-laki yang masih kafir, kemudian seminggu setelah itu masuk Islam, meski harta warisan belum dibagi anak tersebut tidak berhak mewarisi harta peninggalan si mayit.

Mengenai orang murtad—orang yang keluar dari agama Islam— para Ulama memandang mereka mempunyai kedudukan hukum sendiri. Hal ini kerana orang murtad dipandang telah memutuskan tali (*shilah*) syariah dan melakukan kejahatan agama. Karena itu, meskipun dalam isyarat Al-Qur'an bahwa mereka dikategorikan sebagai orang kafir, para Ulama menyatakan bahwa harta warisan orang murtad tidak diwarisi oleh siapa pun, termasuk ahli warisnya yang sama-sama murtad. Harta peninggalannya dimasukkan ke *baitulmāl* sebagai harta *faī'* atau rampasan, dan digunakan untuk kepentingan umum.

c. Perbudakan

Perbudakan menjadi penghalang mewarisi bukanlah kerana status kemanusiannya, tetapi semata-mata kerana status untuk formalnya sebagai hamba sahaya. Mayoritas Ulama sepakat bahwa seorang budak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terhalang untuk menerima warisan karena ia dianggap tidak cakap melakukan perbuatan hukum.¹⁰⁵ Firman Allah menunjukkan:

ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ

Artinya: “Allah membuat perumpamaan dengan seorang hamba sahaya yang dimiliki yang tidak dapat bertindak terhadap sesuatu pun”. (QS. Al-Nahl: 75)

Islam sangat tegas untuk tidak menyetujui adanya perbudakan, sebaliknya Islam sangat menganjurkan agar setiap budak hendaknya dimerdekakan. Seorang hamba sahaya secara yuridis dipandang tidak cakap melakukan perbuatan hukum. Karena hak-hak kebendaannya berada pada tuannya. Oleh karena itu, ia tidak bisa menerima bagian warisan dari tuannya. Lebih dari itu, hubungan kekerabatan budak dengan saudara atau keluarganya sendiri terputus. Oleh karena dimikian, perbudakan menjadi penghalang dalam kewarisan.

d. Berlainan Negara

Adapun berlainan negara yang menjadi penghalang mewarisi adalah apabila di antara ahli waris dan pewaris berdomisi di dua negara yang berbeda kriterianya. Apabila dua negara sama-sama sebagai negara Muslim, menurut para Ulama tidak menjadi penghalang saling mewarisi antara warga negaranya. Mayoritas Ulama mengatakan, bahwa meskipun negaranya berbeda, apabila antara ahli waris dan pewarisnya Muslim,

¹⁰⁵ Amin ‘Abdul Al-Ma’bud Zaghlul, *Ahkam al-Mirast wa al-Washiyyah*, hlm. 89.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tidak terhalang bagi mereka untuk saling mewaris. Demikian juga jika antara dua warga negara sama-sama Muslim.

Imam Abu Hanifah dan sebagian mazhab Hanabilah menyatakan bahwa antara mereka yang berlainan negara dan sama-sama non-Muslim terhalang untuk saling mewarisi. Dasar hukum yang dijadikan landasan oleh mayoritas Ulama adalah antara pewaris dengan ahli waris yang berbeda negara dan sama-sama Muslim tidak terhalang haknya dari harta warisan adalah sabda Nabi Saw yang artinya:

Artinya “*apabila dua orang Muslim, seorang (mengajak perang saudaranya) dengan membawa pedang, maka keduanya telah beradu di tepi Jahannam. Apabila salah seorang membunuh kawanya, kedua-duanya sama-sama masuk neraka. Kami bertanya, Ya Rasulullah Saw. ini adalah untuk yang membunuh, lalu bagaimana yang terbunuh? Beliau menjawab: “sesungguhnya ia juga menginginkan untuk membunuh kawanya. (Riwayat al-Bukhari).*

Negara yang sama-sama muslim pada hakikatnya adalah satu, meskipun kedaulatan, angkatan bersenjata dan kepala negara berbeda. Negara hanyalah semata-mata sebagai wadah perjuangan yang masing-masing di antara mereka terikat oleh satu tali persaudaraan, yaitu persaudaraan antara sesama muslim. Jadi, yang lebih prinsip untuk diperhatikan tampaknya adalah soal adanya perbedaan agama antara ahli waris dan pewarisnya yang berbeda di dua negara yang berbeda. Meskipun berbeda negara, jika tidak ada perbedaan agama, maka tidak ada halangan untuk dapat saling mewarisi.

7. Praktek Pembagian Harta Warisan Di Indonesia

Proses kehidupan manusia secara kudrati berakhir dengan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kematian, karena mati merupakan hak bagi setiap individu manusia (*inna al-maut haqq*). Karena itu, mati termasuk kategori hukum alam (*sunnatullah*), dan pasti bagi mereka cepat atau lambat akan mengalami kematian.¹⁰⁶ Secara normatif yuridis, peristiwa kematian merupakan peristiwa hukum, karena bagi orang yang mati segala hak dan kewajibannya berakhir, dan bahkan secara otomatis pindah kepada ahli waris yang berhak mewarisinya (*zaw al-furud*) terutama yang berkaitan dengan harta kekayaan yang ditingalkan (*al-tirkah*), baik berupa benda bergerak seperti mobil, motor dan lain-lain maupun benda tidak bergerak seperti rumah, sebidang tanah, dan lain-lain.

Prektek pembagian warisan secara teknis telah diatur dalam ilmu *fara'id*, baik segi sistem kewarisannya (*nizam al-irts*), orang-orang yang berhak mewarisinya (*al-warits*), kadar warisan yang akan diterima oleh masing-masing ahli waris (*al-furud al-muqaddarah*). Sama halnya dengan Negara Republik Indonesia, sebagai negara hukum juga telah menetapkan peraturan terkait pembagian harta warisan. Hal ini sebagai mana dipahami dari beberapa pasal yang termaktub dalam KHI (kompilasi hukum Islam) Pasal 175 kewajiban ahli waris terhadap pewaris adalah sebelum pembagian harta warisan: mengurus dan menyelesaikan sampai pemakaman jenazah selesai, menyelesaikan baik hutang-hutang berupa

¹⁰⁶Q.S. al-‘Ankabut: 87 dan al-Nahl: 61: “*Kull nafs zaiqat al-maut summa ilaina turja’un.*”
Dan “*Faiza jaa’a ajaluhum layasta’khirun sa’ah wala yastaqdimun.*”



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengobatan, perawatan termasuk kewajiban pewaris maupun menagih piutang, menyelesaikan wasiat pewaris, membagi harta warisan di antara ahli waris yang berhak.

Apabila mencermati penjelsan pasal 175 di atas, maka dalam praktek pembagian harta warisan selama ini yang telah dilakukan oleh masyarakat Indonesia, penulis menilai bahwa sangat besar kemungkinan *lost kontrol* dari harta-harta yang tidak baik, semisal harta haram atau harta *syubhāt*, karena aturan yang ada selama ini hanya ada ajuran untuk memisahkan utang piutang dan wasiat saja pra pembagian harta warisan. hal ini, tentu sangat beresiko karena yang namanya harta haram dan atau *syubhāt* tidak akan berubah statut hukumnya dengan meninggalnya pemilik asalnya. Maka oleh karena demikian, dalam penelitian ini, dengan pertimbangan bahwa aturan untuk melakukan praktek kewarisan baik yang ada dalam kitab-kitab fiqh *turāst*, maupun yang ada dalam Kompilasi Hukum Islam¹⁰⁷ (KHI) di Indonesia, belum mengatur untuk melakukan

¹⁰⁷Gagasan penyusunan kompilasi hukum Islam sebagai hukum materiil di Peradilan Agama telah berlangsung sejak lama. Namun cita-cita tersebut mulai mendapatkan respon serius sejak keluarnya SKB Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama No. 07/KMA/1985 dan Nomor 25 Tahun 1985 tanggal 25 Maret 1985 yang berisi tentang Penunjukan Pelaksanaan Proyek Pembangunan Hukum Islam melalui yurisprudensi. Atas dasar SKB tersebut dilakukan pengumpulan bahan kompilasi melalui tiga jalur: pertama, pengumpulan data melalui penelaahan dan pengkajian kitab-kitab standar hukum Islam yang dilakukan oleh tujuh IAIN, yaitu IAIN Syaif Hidayatullah Jakarta, IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, IAIN, Sunan Ampel Surabaya, IAIN Ar-Raniry Banda Aceh, IAIN Antasari Banjarmasin, IAIN Alauddin Ujung Pandang, IAIN Imam Bonjol Padang, Kedua pengumpulan data melalui wawancara dengan para ulama yang pelaksanaannya dilakukan oleh 10 Pengadilan Tinggi Agama, ketiga, Pengumpulan data melalui perbandingan dengan beberapa Negara Islam seperti Maroko, Turki, dan Mesir, dan diakhiri dengan lokakarya tingkat nasional pada tanggal 2-5 Februari 1988 yang diikuti oleh para ulama, ahli hukum, kaum cendekiawan, dan para tokoh masyarakat. Setelah proses pengumpulan data

pemeriksaan harta yang haram dengan harta yang halal atau harta yang bercampur antara zat halal dengan harta yang mengandung zat haram yang telah ditinggalkan oleh pewaris (*syubhāt*), pembiaran ini tentu berakibat fatal kepada ahli waris. Oleh Karena demikian penulis menawarkan aturan tersebut agar menjadi suatu perhatian palaku hukum,

kemudian data diolah oleh tim dan menghasilkan konsep/draf KHI. Selanjutnya, diadakan lokakarya nasional pada tanggal 2– 6 Februari 1988 yang dihadiri para ulama dan cendekiawan muslim untuk membahas draf KHI. Hasil lokakarya kemudian disampaikan menteri Agama kepada Presiden untuk memperoleh bentuk yuridis. Pada awalnya KHI akan diperjuangkan menjadi Undang-Undang Hukum materiil di Peradilan Agama. Akan tetapi karena kondisi politik yang belum memungkinkan akhirnya KHI disahkan dengan inpres Nomor 1 Tahun 1991 pada tanggal 10 Juni 1991. Melalui Inpres ini presiden mengintruksikan kepada menteri Agama untuk menyebarluaskan KHI tersebut untuk dipergunakan oleh instansi pemerintah dan masyarakat luas yang membutuhkan. Kemudian menteri Agama melalui keputusan Nomor 154 tahun 1991 menetapkan tentang pelaksanaan inpres Nomor 1 Tahun 1991 dan menunjuk Dirjen Kelembagaan Agama Islam dan Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji untuk mengkordinasikan pelaksanaan keputusan Menteri ini dalam bidang tugasnya masing-masing. Sejak saat itu, sosialisasi intens dilakukan kedua lembaga tersebut. Di samping itu Peradilan Agama pun ikut mensosialisasikan dan bahkan kemudian menjadikan KHI sebagai sumber rujukan dalam menangani perkara-perkara yang diterimanya hingga saat ini. Munculnya Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak terlepas dari pengadilan agama, karena pengadilan agama merupakan lembaga sosial yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara yang diajukan oleh orang yang merasakan dirugikan haknya oleh orang lain kepadanya (Pasal 49 UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama). Sebelum terbentuknya Kompilasi Hukum Indonesia terjadi perubahan penting dan mendasar yang telah terjadi dalam lingkungan Pengadilan Agama dengan disahkannya RUU-PA menjadi UU No 7 Tahun 1989, yang diajukan oleh menteri Agama Munawir Sjadzali ke sidang Dewan Perwakilan Rakyat. Diantara isinya sebagai berikut: Peradilan Agama telah menjadi peradilan mandiri, kedudukannya benar-benar telah sejajar dan sederajat dengan peradilan umum, peradilan militer, dan peradilan tata usaha Negara, nama, susunan, wewenang (kekuasaan) dan hukum acaranya telah sama dan seragam di seluruh Indonesia. Terciptanya unifikasi hukum acara Peradilan Agama akan memudahkan terwujudnya ketertiban dan kepastian hukum yang berkeadilan dalam lingkungan peradilan agama, Perlindungan kepada wanita telah ditingkatkan dengan jalan antara lain, memberikan hak yang sama kepada istri dalam proses dan membela kepentingannya di muka Peradilan Agama, lebih memantapkan upaya penggalian berbagai asas dan kaidah hukum Islam sebagai salah satu bahan baku dalam penyusunan dan pembinaan hukum nasional melalui yurispondensi, terlaksananya ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang pokok kekuasaan kehakiman, terselenggaranya pembangunan hukum nasional berwawasan nusantara yang sekaligus berwawasan Bhineka Tunggal Ika dalam bentuk Undang-undang Peradilan Agama.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Strategi dan Metode Penelitian Hukum Islam

Surat Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam hal ini adalah masyarakat Indonesia dan pemangku pemerintahan, seperti pejabat pemerintahan sebagai *stakeholder* yang menetapkan aturan hukum dalam proses pendistribusian harta warisan kepada ahli warisnya terkhusus bagi ummat Islam yang dalam Impres Presiden Nomor 1 Tahun 1991 pada tanggal 10 Juni 1991 yang mengintruksikan agar KHI disebar luaskan kepada yang membutuhkan. Dari impres presiden yang menyebabkan lahirnya KHI tersebut dapat dipahami bahwa proses pendistribusian harta warisan harus didistribusikan dengan barpijak kepada agama yang di anut masing-masing ahli warisnya. Hal ini, disarankan penulis oleh karena Islam sangat menganjurkan penganutnya untuk memperhatikan harta yang akan dikonsumsi dan yang akan menjadi simpanannya. Oleh karena demikian, maka usaha untuk mengidentifikasi atau menelusuri harta dan atau memisahkan *tirkah* yang mengandung unsur *syubhāt* perlu dilakukan, sebagai upaya pencegahan terhadap harta yang akan didistribusikan kepada ahli warisnya, agar tidak terjadi kesalahan yang kedua kalinya. Artinya kesalahan pewaris dalam usahanya untuk mencari harta atau menyimpan harta yang mengandung unsur *syubhāt* yang status hukumnya belum jelas, tidak turun-temurun kepada ahli warisnya. Sebagai upaya untuk dapat menerapkan pemisahan harta *syubhāt* dalam proses pembagian harta warisan, maka sangat diperlukan aturan yang mengikat sebagai bentuk perhatian dari penegak hukum atau pemegang kebijakan hukum.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

C. *Tirkah Syubhāt* dalam Pandangan Ulama

1. Pengertian *Tirkah Syubhāt*

Pada sub bab pembahasan ini penulis akan memaparkan makna *tirkah syubhāt*, akan tetapi sebelum dijelaskan pengertian *tirkah syubhāt* terlebih dahulu penulis paparkan makna *māl* (harta), karena pada awalnya *tirkah* berasal dari kata *māl* (harta) yang kemudian *tirkah* dikhususkan kepada sesuatu yang ditinggalkan oleh pemilik harta setelah ia meninggal dunia. Maka oleh karena demikian, terlebih dahulu penulis menjelaskan makna *māl* sebelum dipaparkan makna *tirkah*.

Secara etimologi kata *al-māl* berasal dari kata *māla* yang berarti condong atau berpaling dari tengah kepada satu sisi, dan *al-māl* diartikan sebagai segala sesuatu yang menyenangkan manusia dan mereka pelihara baik dalam bentuk materi maupun dalam bentuk manfaat.¹⁰⁸ Untuk pengertian *al-māl* secara terminologi ada dua definisi yang dikemukakan ulama *fiqh*, sebagaimana yang dikutip oleh Nasrun Haroen, yaitu:¹⁰⁹

ما يميل إليه طبع الانسان ويمكن إذا حادره إلى وقت الحاجة أو كان مائمين
حيادته وإحرازه وينتفع به.¹¹⁰

Artinya: *Segala yang diminati manusia dan dapat dihadirkan ketika diperlukan, atau segala sesuatu yang dapat dimiliki, disimpan dan dapat dimanfaatkan (definisi ini dikemukakan oleh ulama Hanafiyah).*

¹⁰⁸Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), hlm. 73

¹⁰⁹*Ibid.*

¹¹⁰*Ibid*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Makna terminologi lain untuk kata *māl* adalah sebagaimana dikutip oleh Muhammad bahwa makna *māl* adalah¹¹¹:

كل ماله قيمة يلزم متلفها بضمانه

Artinya: Segala *sesuatu yang mempunyai nilai dan dikenakan ganti rugi bagi orang yang merusak atau melenyapkannya*.

Sedangkan Musthafa Ahmad al-Zarqa' mendefinisikan *al-māl* dengan:

المال هو كل عين ذات قيمة مادية بين الناس

Artinya: *Harta adalah segala sesuatu yang mempunyai nilai materi di kalangan masyarakat*.

Dari beberapa definisi di atas, jelaslah bahwa *māl* adalah memiliki nilai materi dan nilai manfaat dan merupakan salah satu keperluan pokok manusia dalam menjalani kehidupan di dunia. Sehingga para ulama ushul *fiqh* memasukkan persolan *māl* dalam salah satu *al-Dharuriyat al-Khamsah* (lima keperluan pokok).¹¹² Oleh karena itu, mempertahankan dan memperoleh *māl* tersebut merupakan hal yang mendasar dalam Islam, yaitu dengan cara yang diridhai oleh Allah, bukan dengan cara haram atau tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam.

Selanjutnya, setelah dijelaskan pengertian *māl* penulis memaparkan makna kata *tirkah syubhāt*. untuk menemukan makna atau maksud dari dua kata tersebut tentu akan dijelaskan dari masing-masing kata *murakkab*

¹¹¹Zaghlul al-ma'bud, *ahkam al-miras wa al-washiyyah fi syari'ati al-Islam*, hlm. 125.

¹¹²Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), hlm. 75

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*idhaffi*¹¹³ (kalimat majmuk) yang ada pada kalimat *tirkah syubhāt*. *Tirkah* berasal dari bahasa Arab yang berarti harta yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia, baik berupa uang atau materi lainnya yang dibenarkan oleh syariat Islam untuk diwariskan kepada ahli warisnya.¹¹⁴

تركة dapat dibaca dengan harakat di atas huruf “*tā*” dan *harakat* di bawah huruf “*rā*”, dan تركة juga dapat dibaca dengan harakat di bawah huruf “*ta*” dan harakat sukun pada huruf “*ra*”.¹¹⁵ Kedua bacaan تركة tersebut dapat dimaknai dengan sesuatu yang ditinggalkan, sebagai contoh: Muhammad telah meninggalkan harta atau sesuatu. Maka dapat dipahami, bahwa yang dimaksud adalah sesuatu yang telah ditinggalkannya seseorang setelah ia meninggal dunia.

Dalam bahasa Arab, didapati istilah lain yang digunakan untuk menyebutkan harta warisan yaitu *mawārits* (مواريث). *Mawārits* (مواريث) adalah jama' dari ميراث dan *mirās* itu sendiri sebagai *masdār* dari -ورث. يرث - ارثا - وميراثا. Secara etimologi kata *mirās* mempunyai beberapa arti, di antaranya: *al-baqā'* (yang kekal), *al-intiqāl* (yang berpindah), dan *al-*

¹¹³ ialah gabungan dua kata yang masing-masing kata tersebut memiliki makna tersendiri, akan tetapi dari segi kalimatnya *murakab idhaffi* ini terdiri dari dua kata yang berbeda, seperti pada kalimat *tirkah syubhāt* dan *ushlu fiqh*. Contoh yang telah disebutkan merupakan *murakab idhaffi* karena memiliki dua kata yang masing-masing dari kata tersebut memiliki makna masing-masing. Akan tetapi kalimat tersebut tidak dapat dipisahkan, karena apabila dipisahkan tidak tercapai maksud yang diinginkan.

¹¹⁴ Djalal. Maman Abd, *Hukum Mawārist*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2006) hlm. 39.

¹¹⁵ Zaglul al-ma'bud, *ahkām al-mīras wa al-washīyyah fī syarī'ati al-Islām*, hlm. 115.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

maurūs yang maknanya *al-tirkah* yang merupakan *masdar* bermakna *maf'ul* yang berarti *matrukah* (sesuatu yang ditinggalkan). Ketiga kata ini (*al-baqā'*, *al-intiqāl*, dan *at-tirkah*) lebih menekankan kepada objek dari pewarisan, yaitu harta peninggalan pewaris.¹¹⁶ Namun dalam pemakaiannya, kata *tirkah* lebih dikenal dengan arti harta warisan.

Sedangkan *تركة* menurut pengertian terminologi, tetunya penulis akan menginventarisirnya sesuai dengan makna yang telah diungkapkan oleh para ulama mazhab empat. Menurut Hanafiyah *تركة* adalah:

ما تركه الميت من الاموال صافيا عن تعلق حق الغير من الاموال¹¹⁷

Artinya: *tirkah* merupakan sesuatu yang ditinggalkan oleh orang yang telah meninggal dunia, baik berupa harta benda yang tidak ada kaitannya dengan utang dan tidak ada hak-hak orang lain dengan harta yang ditinggalkan tersebut.

Hal ini dapat dipahami, bahwa yang dimaksud dengan *tirkah* dalam pandangan Hanafiyah adalah sesuatu yang ditinggalkan oleh orang yang telah meninggal dunia yang terdiri dari harta yang tidak terkait dengan hak-hak orang lain. Kepemilikan yang masih mempunyai keterkaitan dengan hal seperti utang piutang dan sebagainya tidak dikatakan dengan *tirkah*.

Menurut ulama Malikiyah *تركة* adalah:

¹¹⁶Muhammad Yunus, *kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: PT Hidakarya Agung, 1411 H/1990 M), hlm. 492. Lihat juga: Muhammad 'Ali as-Sabuny, *al-Mawaris fi asy-Syari'ah al-Islamiyyah fi Dau al-Kitab a as-Sunnah*, 1989, hlm. 33-34

¹¹⁷Ibn 'Abidin, *Hasyiyah Ibn 'Abidin*, jld 6 (Mesir: Musthafa al-Babu al-Halabi wa ataduhu, 1345 H). hlm. 759.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

بأنها حق يقبل التجزئ يثبت لمستحقه بعد موت من كان له ذلك¹¹⁸

Artinya: *tirkah* adalah *haq yaqbalu al-tajzik* (hak dapat dibagi-bagi) yang ditetapkan untuk orang-orang yang akan memperolehnya, setelah meninggal pemilik harta tersebut.

Pengikut Imam Asyafi'i mendefinisikan kata *تركة* adalah:

كل ما كان للإنسان حال حياته وخلفه بعد مماته من مال أو اختصاص وكذلك ما دخل بعد موت في ملكه بسبب كان منه في حياته كصيد وقع في شبكة نصبها في حياته فإن نصبه للشبكة¹¹⁹

Artinya: *Tirkah* adalah segala sesuatu yang menjadi milik seseorang pada masa hidupnya dan menjadi peninggalanya setelah meninggalnya, baik berbentuk harta, hak, maupun yang dikhususkan kepadanya. *tirkah* juga termasuk segala sesuatu yang kepemilikannya didapati setelah ia meninggal dunia dengan sebab yang ia lakukan pada saat ia hidup, Seperti berburu yang masuk dalam bagianya semasa ia masih hidup

Ulama dari kalangan Hanābilah mendefinisikan kata *تركة* adalah:

هي ما يخلفه الإنسان بعد موته من مال أو حق أو اختصاص

Artinya: *tirkah* adalah segala sesuatu yang ditinggalkan oleh manusia setelah meninggalnya baik berupa harta, hak maupun ikhtishas (sesuatu yang dapat dikhususkan).

Perbedaan *ta'rif* (pengertian) yang diutarakan oleh para ulama mazhab empat yang penulis sebutkan di atas berakar dari perbedaan antara Hanafi dengan Jumhur ulama dalam mendefinisikan harta. Menurut Hanafi, harta adalah segala sesuatu yang mungkin dikuasai, disimpan, dan dapat digunakan pada *'adah* (kebiasaan), dan definisi ini hanya dibatasi dalam konteks kebendaan. Sedangkan Jumhur mendefinisikan *tirkah* ialah segala

¹¹⁸ *Balaghatsu al-Sāliku li aqrabu al-Masālik*, jld 2. hlm. 443.

¹¹⁹ Al-Bujairimi, *Hasyiyah al-Bujairimi 'Ala Syahrhi Minhaj al-Thālibin*, jilid IV, (Mesir: Musthafa al-Babu al-Halabi wa auladuhu, 1345 H

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sesuatu yang mempunyai nilai (*qimah*), termasuk hak karena beberapa hak dapat dipandang memiliki nilai/harga.

Ibnu Hazm sependapat dengan mazhab Hanafi yang menyatakan bahwa harta peninggalan yang dapat diwariskan adalah yang berupa harta benda, sedangkan yang berupa hak tidak dapat diwariskan, kecuali jika hak itu mengikuti pada bendanya, misalnya hak mendirikan bangunan atau menanam tumbuh-tumbuhan di atas tanah.

Islam membedakan pengertian harta peninggalan dengan harta warisan. Harta peninggalan adalah semua yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal atau dalam arti apa-apa yang ada pada seseorang saat kematiannya. Sedangkan harta warisan adalah harta peninggalan yang secara hukum syara' berhak diterima oleh ahli warisnya.¹²⁰

Harta peninggalan yang secara hukum syara' berhak diterima oleh ahli warisnya disebut dengan harta *tirkah*. Mengenai ketentuan *tirkah* ini terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama. Bila dikembangkan, maka yang termasuk dalam kategori *tirkah* adalah segala harta benda simayit sebelum wafatnya, baik berupa harta benda bergerak, maupun harta benda tidak bergerak dan baik harta benda itu sedang berada di tangan orang lain, seperti barang titipan, tanah atau rumah sewaan, harta yang dipinjamkan dan yang termasuk dalam kategori ini adalah piutang, baik yang telah jelas

¹²⁰ H.R. Otje Salman S. dan Mustofa Haffas, 2006, *Hukum Waris Islam*, (Bandung: Refika Aditama), hlm. 18

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kapan waktu pelunasannya, maupun piutang yang belum jelas kapan waktu pelunasannya.¹²¹

Beberapa pengertian yang telah disebutkan sebelumnya, penulis lebih condong kepada definisi *tirkah* yang diutarakan oleh kalangan Malikiyyah, syafi'iyah, dan Hanbilah. Menurut penulis, pengertian yang diungkapkan oleh kalangan jumhur ini, lebih *jamī'* dan *manī'* atau lebih mencakup semua aspek dari harta peninggalan, maka oleh karena demikian penulis lebih memilih pengertian ini untuk dijadikan sebagai pengertian yang lebih tepat terhadap *tirkah*. Dengan demikian dapat dikategorikan bahwa yang termasuk harta *tirkah* adalah:

- a. Harta yang berada dalam milik seseorang waktu hidupnya;
- b. Segala hak yang bernilai harta atau yang dapat dinilai dengan harta;
- c. Harta yang didapatkan setelah wafatnya seseorang sebagai hasil dari suatu sebab yang menurut sifatnya akan mendatangkan laba, yang dilakukan di masa ia hidup.

Setelah memaparkan makna *tirkāh* di atas, untuk bisa sampai pada tujuan akhir dari makna *tirkah syubhāt* maka perlu dijelaskan makna *syubhat*. Kata *syubhat* (شبهة - شبهات) berasal dari akar kata *syabbaha-yusyabbihu* yang berarti menyamakan atau menyerupakan. Kata *syubhāt*

¹²¹ Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer-Analisis Yurisprudensi dengan pendekatan Ushuliyah*, (Jakarta: Prenada Media, 2004), hlm.240.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam makna terminologi dapat di artikan dengan “keadaan serupa, sama, atau keadaan gelap, kabur, samar, tidak jelas” dan diartikan juga hal-hal yang berkaitan dengan perkara yang tidak jelas kehalalan dan keharamnya¹²²

dalam kamus *al-Munjid syubhāt* diartikan dengan “*al-misl*” yang berarti sama atau mirip.¹²³ Penulis kitab *al-Ta’rifāt* mendefinisikan makna *syubhāt* adalah sesuatu yang tidak dapat dipastikan statusnya apakah haram atau halal.¹²⁴

Kata *syubhāt* dalam al-Qur’an disebutkan sebanyak dua belas kali dalam enam surat yang berarti kesamaan atau keserupaan. kata *syubhāt* dalam berbagai bentuknya, memiliki beberapa arti. Dalam surah al-Nisa surah ke 4 ayat 157¹²⁵ disebutkan kata *syubbiha* yang berarti diserupakan. Ayat ini menceritakan tentang penolakan kaum Yahudi terhadap kerasulan Nabi Isa as, karena kemarahan mereka terhadap Nabi Isa, kaum Yahudi berupaya untuk membunuhnya, akan tetapi Allah menyerupakan orang yang dipersangkan kaum Yahudi adalah Nabi Isa pada saat ingin dibunuh oleh mereka.

¹²² Ahamd Warson Munawwir, *Al-Munawwir kamus Arab -Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka猛进, 1997 M), hlm. 692.

¹²³ Lous Ma’luf, *Al-Munjid fi al-Lughah al-A’alam*, (Bairut: Dar al-Masyriq, 1986), hlm. 375.

¹²⁴ Al-Jurjani, *Al-Ta’rifāt*, (Bairut: Dar al Kutub al Ilmiyah, 2003) hlm 127.

وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَٰكِنْ شُبِّهَ هُمْ وَإِنَّ يُحْيِي

أَحْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مَا هُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا¹²⁵

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun pengertian *syubhāt* menurut terminologi para ulama adalah: berarti samar-samar atau tidak jelas halal dan haram terhadap manusia. Al Ghazali¹²⁶ mengatakan *syubhāt* adalah terjadi sesuatu yang samar-samar disebabkan karena tidak jelas dalil dan tidak jelas kehalalan jalan untuk menerapkan dalil yang ada terhadap sesuatu peristiwa atau perbuatan.¹²⁷ Imam Ahmad menafsirkan bahwa *syubhāt* ialah perkara yang berada antara halal dan haram yakni yang tidak diketahui apakah betul-betul halal dan betul-betul haram. Imam Ahmad berkata, "Barangsiapa yang menjauhinya yang bercampur antara yang halal dan haram, berarti dia telah menyelamatkan agamanya.."

Ibnu Rajab al Hambali sebagai mana yang dikutip oleh Nur Ahmad Fadhil dan Azhari Akmal, tatkala memaparkan makna *syubhāt* menyebutkan bahwa "Masalah *syubhāt* ini berlanjut kepada cara bermuamalah dengan orang yang bersamanya terdapat harta bendanya yang bercampur antara barang yang halal dan barang yang haram."¹²⁸

¹²⁶ Imam Al Ghazali, sebuah nama yang tidak asing di telinga kaum muslimin. Tokoh terkemuka dalam kancah falsafah dan tasawuf. Memiliki pengaruh dan pemikiran yang telah menyebar ke seantero dunia Islam. Nama lengkap beliau adalah Muhammad bin Muhammad bin Muhammad Ahmad Ath Thusi, Abu Hamid Al Ghazali, Lihat: Adz Dzhabī, *siyar 'alam al nubala'*, Juz 19, halm. 223. Dan Al Subki, *Thabaqat Asy Syafi'iyah*, juz, 6, hlm 191. Dinulilkan oleh Adz Dzhabī, *siyar 'alam al nubala'*, Al Ghazali wafat di kota Thusi, pada hari Senin, tanggal 14 Jumadil Akhir, tahun 505 H dan dikuburkan di pemakaman Al Thabaran.

¹²⁷ Al Ghazali, *Ihya 'Ulumuddin*, Juz II, (Kairo: Dar al hadits, 2008), hlm. 128.

¹²⁸ Nur Ahmad Fadhil dan Azhari Akmal T, *Etika Bisnis dalam Islam*, (Jakarta: Hijri Pustaka Utama, 2001 M), hlm. 75-78.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Al-Shan'ani¹²⁹ berpendapat bahwa yang dimaksud dengan *syubhāt* adalah hal yang belum diketahui status halal dan haramnya hingga sebagian besar orang yang tidak tahu (awam) menjadi ragu antara halal dan haramnya. Hanya para ulama yang mengetahui status hukumnya dengan jelas, baik berdasarkan nash atau berdasarkan ijtihad yang mereka lakukan dengan metode *qiyās*, *istishab*, dan sebagainya hingga memunculkan konsekuensi hukum yang pasti". Taqiyuddin al-Nabhani¹³⁰ mengatakan bahwa arti dari *syubhāt* adalah ketidakpastian hukum atau samar-samar, sehingga tidak bisa diketahui halal haramnya sesuatu secara jelas. Syubhat terhadap sesuatu bisa muncul baik karena tidak jelas status hukumnya, atau tidak jelas sifat atau faktanya.¹³¹

Syubhāt pada dasarnya menghendaki pengetahuan objektif terhadap status hukum suatu perkara. Sebab, dalam pandangan hukum, tidak ada satu pun masalah yang tidak memiliki status hukum. Sekalipun kadang-kadang diperdebatkan, ketidakjelasanannya bukan karena keraguan, tetapi berlandaskan keilmuan yang jelas. Sementara status *syubhāt* muncul dari ketidak-tahuan, bukan dari pengetahuan. Selamanya akan meragukan dan

¹²⁹ Nama lengkapnya adalah Muhammad bin Isma'il bin Shalah al-Amir al-Khalani al-Shan'ani. Ia dilahirkan di daerah yang bernama Kahlan dan kemudian ia pindah bersama ayahnya ke kota Shan'a ibukota Yaman, wafatnya 1182 H)

¹³⁰ Syaikh Muhammad Taqiyuddin bin Ibrahim bin Mustafa bin Ismail bin Yusuf an Nabhani. Lahir di Ijzim, Haifa pada tahun 1909- meninggal di Bairut Lebanon, 1977)

¹³¹ Taqiyuddin al-Nabhani, *Syakhsyah al-Islamiyyah*, jilid III, (Kairo, Daru al Hadits, 2009), hlm 78.

tidak akan pernah melahirkan kemantapan dalam menentukan sikap terhadap perkara tersebut.

Merujuk pada makna *tirkah* dan *syubhāt* yang telah dipaparkan penulis di atas, maka pada akhirnya dapat ditarik suatu kesimpulan mengenai makna dari kedua kata *murakkab idhāfī* tersebut yaitu *tirkah syubhāt* adalah segala sesuatu yang menjadi milik seseorang pada masa hidupnya dan menjadi peninggalanya setelah ia meninggal dunia, baik berbentuk harta, hak, maupun yang dikhususkan kepadanya yang status hukum harta peninggalan tersebut tidak dapat dipastikan secara pasti, sehingga tidak bisa diketahui halal haramnya sesuatu *tirkah* peninggalan tersebut. Hal ini tentunya sangat memerlukan peninjauan ulang terhadap harta tersebut, agar pada saat pendistribusian kepada ahli warisnya bersih dari unsur *syubhāt*.

2. Bentuk-bentuk *Tirkah*

Tirkah adalah segala sesuatu yang ditinggalkan oleh pewaris. *Tirkah* disyaratkan sebagai barang berharga yang bersifat sebagai berikut:

- a. Kebendaan dan sifat-sifat yang mempunyai nilai kebendaan. Misalnya benda-benda tetap, benda-benda bergerak, piutang-putang simati yang menjadi tanggungan orang lain.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Hak-hak kebendaan, seperti hak untuk mendayagunakan dan menarik hasil dari suatu jalan, sumber air minum, irigasi pertanian dan perkebunan, dll.
- c. Hak-hak yang bukan kebendaan, seperti hak khiyar, hak *suf'ah*. Yakni hak beli yang diutamakan dari salah seorang anggota serikat atau tetangga atas tanah, pekarangan atau lain sebagainya.
- d. Benda-benda yang bersangkutan dengan orang lain

Ditinjau dari segi asal harta, maka harta yang ditinggalkan oleh pewaris dapat dibagi menjadi beberapa kriteria, yaitu:

- a. Harta bawaan adalah “harta benda milik masing-masing suami dan isteri yang diperoleh sebelum terjadinya perkawinan atau yang diperoleh sebagai warisan dan hadiah”. Pada dasarnya, harta dapat kita bedakan menjadi dua, yaitu harta kekayaan dalam harta perkawinan dan harta dalam hal kewarisan. Harta kekayaan dalam perkawinan adalah harta yang ada dalam suatu perkawinan, yang terdiri dari harta asal suami, harta asal istri dan harta bersama, sedangkan harta dalam hal kewarisan dibagi lagi menjadi harta peninggalan dan harta warisan.
- b. Harta, harta bersama (gono-gini) adalah harta benda atau hasil kekayaan yang diperoleh selama berlangsungnya perkawinan. Meskipun harta tersebut diperoleh dari hasil kerja suami saja, isteri tetap memiliki hak atas harta bersama.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari macam-macam harta yang telah diuraikan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa harta peninggalan seseorang yang telah meninggal dunia terdiri dari harta asal pewaris dan sebagian dari harta bersama dalam perkawinan. Harta milik bersama itu apabila salah satu pemiliknya meninggal dunia, sebelum diwarisi dibagi terlebih dahulu dengan ketentuan yang berlaku menurut adat istiadat atau disesuaikan dengan besar kecilnya sumbangan orang yang meninggal terhadap terjadinya kekayaan bersama itu. Kemudian, mana yang menjadi hak suami-isteri yang meninggal itulah yang menjadi harta peninggalannya.¹³²

Selanjutnya, ditinjau dari bentuk harta warisan, maka harta warisan dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu:

- a. Harta peninggalan, harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya. Segala sesuatu yang ditinggalkan oleh ahli waris. Harta inilah yang nantinya digunakan untuk mengurus biaya *tajhiz* mayit, membayar utang dan sebagainya.¹³³
- b. Harta warisan, harta waris adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (*tajhiz*), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat. Jenis harta inilah yang dapat

¹³²Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Waris Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2001), hlm 110.

¹³³Tim Redaksi Fokus Media, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Fokus Media, 2014), hlm. 56.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diwariskan kepada ahli waris. Harta ini merupakan sisa dari harta yang ditinggalkan pewaris setelah dibayarkan biaya tajhiz, utang dan wasiat.¹³⁴

3. Tatacara Pembagian *Tirkah*

Dalam kewarisan Islam, pembagian harta warisan dapat dilakukan jika semua hak yang berkenaan dengan harta warisan telah ditunaikan, berikut ini penjelasannya:¹³⁵

a. *Tajhizul mayyit*¹³⁶

Seluruh keperluan dan pembiayaan pemakaman pewaris hendaknya menggunakan harta miliknya, dengan catatan tidak boleh berlebihan. Keperluan-keperluan pemakaman tersebut menyangkut segala sesuatu yang dibutuhkan mayit, sejak wafatnya hingga pemakamannya. Di antaranya, biaya memandikan, pembelian kain kafan, biaya pemakaman, dan sebagainya hingga mayit sampai di tempat pemakamannya.

¹³⁴ Ibid.

¹³⁵ Amin 'Abdu Aal-Ma'bud Zahglul, *ahkam al-Miras wa al-washiyyah fi al-syari'ati al-Islam*, (Kairo: Darul Andalus lithaba'ah, 2005), hlm 31

¹³⁶ Dapat dilihat bahwa didapati dalam sebahagian penjelasan kitab fikih, seperti kitab *al-Mugni wa syarhu al-kabir*, dan kitab *al-mabshuth*, jilid 29, hlm 137. Dalam kitab yang telah disebutkan bahwa tatacara pembagian harta warisan yang pertama dikerjakan adalah pembayaran utang piutang dibandingkan dengan pengurusan jenazah orang yang meninggalkan harta atau pewaris. Hal ini dimaksudkan oleh mazhab yang berpendapat tersebut dikarenakan utang piutang adalah hak orang lain yang lebih utama ditunaikan ahli waris dibandingkan mengurus jenazah yang pewaris yang telah meninggal dunia. Beranalogi dari penjelasan di atas, penulis mengambil satu sisi pandangan lain yaitu terkait dengan harta yang statusnya belum jelas statusnya, juga lebih utama harus dieleminirkan pra pembagian harta warisan, mengingat harta yang statusnya tersebut menyangkut dengan hak orang lain yang tentunya harus dipisahkan dari pembagian harta warisan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Satu hal yang perlu untuk diketahui dalam hal ini ialah bahwa segala keperluan tersebut akan berbeda-beda tergantung perbedaan keadaan mayit, baik dari segi kemampuannya maupun dari jenis kelaminnya.

- b. Pelunasan hutang dan hak orang lain yang ada hubungannya dengan harta yang ditinggalkan.

Hendaklah utang piutang yang masih ditanggung pewaris ditunaikan terlebih dahulu. Artinya, seluruh harta peninggalan pewaris tidak dibenarkan dibagikan kepada ahli warisnya sebelum utang piutangnya ditunaikan terlebih dahulu. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah saw, "Jiwa (ruh) orang mukmin bergantung pada utangnya hingga ditunaikan."

Maksud hadits ini adalah utang piutang yang bersangkutan dengan sesama manusia. Adapun jika utang tersebut berkaitan dengan Allah seperti belum membayar zakat, atau belum menunaikan *nadzar*, atau belum memenuhi *kafarat* (denda), maka di kalangan ulama ada sedikit perbedaan pandangan. Kalangan ulama mazhab Hanafi berpendapat bahwa ahli warisnya tidaklah diwajibkan untuk menunaikannya. Sedangkan jumhur ulama berpendapat wajib bagi ahli warisnya untuk menunaikannya sebelum harta warisan (harta peninggalan) pewaris dibagikan kepada para ahli warisnya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ulama mazhab Hanafi beralasan bahwa menunaikan hal tersebut merupakan ibadah, sedangkan kewajiban ibadah gugur jika seseorang telah meninggal dunia. Padahal, menurut mereka, pengamalan suatu ibadah harus disertai dengan niat dan keikhlasan, dan hal itu tidak mungkin dapat dilakukan oleh orang yang sudah meninggal. Akan tetapi, meskipun kewajiban tersebut dinyatakan telah gugur bagi orang yang sudah meninggal, ia tetap akan dikenakan sanksi kelak pada hari kiamat sebab ia tidak menunaikan kewajiban ketika masih hidup. Hal ini tentu saja merupakan keputusan Allah. Pendapat mazhab ini, menurut saya, tentunya bila sebelumnya mayit tidak berwasiat kepada ahli waris untuk membayarnya. Namun, bila sang mayit berwasiat, maka wajib bagi ahli waris untuk menunaikannya.

Sedangkan jumhur ulama yang menyatakan bahwa ahli waris wajib untuk menunaikan utang pewaris terhadap Allah beralasan bahwa hal tersebut sama saja seperti utang kepada sesama manusia. Menurut jumhur ulama, hal ini merupakan amalan yang tidak memerlukan niat karena bukan termasuk ibadah *mahdhah*, tetapi termasuk hak yang menyangkut harta peninggalan pewaris. Karena itu wajib bagi ahli waris untuk menunaikannya, baik pewaris mewasiatkan ataupun tidak.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut pandangan ulama mazhab Syafi'i pelunasan utang piutang tersebut wajib ditunaikan sebelum memenuhi hak yang berkaitan dengan hak sesama hamba. Sedangkan mazhab Maliki berpendapat bahwa hak yang berhubungan dengan Allah wajib ditunaikan oleh ahli warisnya sama seperti mereka diwajibkan menunaikan utang piutang pewaris yang berkaitan dengan hak sesama hamba. Hanya saja mazhab ini lebih mengutamakan agar mendahulukan utang yang berkaitan dengan sesama hamba daripada utang kepada Allah. Sementara itu, ulama mazhab Hambali menyamakan antara utang kepada sesama hamba dengan utang kepada Allah. Keduanya wajib ditunaikan secara bersamaan sebelum seluruh harta peninggalan pewaris dibagikan kepada setiap ahli waris.

c. Melaksanakan wasiat yang sesuai dengan hukum

Wajib menunaikan seluruh wasiat pewaris selama tidak melebihi jumlah sepertiga dari seluruh harta peninggalannya. Hal ini jika memang wasiat tersebut diperuntukkan bagi orang yang bukan ahli waris, serta tidak ada protes dari salah satu atau bahkan seluruh ahli warisnya. Adapun penunaian wasiat pewaris dilakukan setelah sebagian harta tersebut diambil untuk membiayai keperluan pemakamannya, termasuk diambil untuk membayar utangnya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Maka apabila, ternyata wasiat pewaris melebihi sepertiga dari jumlah harta yang ditinggalkannya, maka wasiatnya tidak wajib ditunaikan kecuali dengan kesepakatan semua ahli warisnya. Hal ini berlandaskan sabda Rasulullah saw. ketika menjawab pertanyaan Sa'ad bin Abi Waqash r.a. pada waktu itu Sa'ad sakit dan berniat menyerahkan seluruh harta yang dimilikinya ke baitulmal. Rasulullah saw. bersabda: *"sepertiga, dan sepertiga itu banyak. Sesungguhnya bila engkau meninggalkan para ahli warismu dalam keadaan kaya itu lebih baik daripada meninggalkan mereka dalam kemiskinan hingga meminta-minta kepada orang"*.

Setelah itu barulah seluruh harta peninggalan pewaris dibagikan kepada para ahli warisnya sesuai ketetapan al-Qur'an, as-Sunnah, dan kesepakatan para ulama (ijma'). Dalam hal ini dimulai dengan memberikan warisan kepada *ashabu al-furuḍh* (ahli waris yang telah ditentukan jumlah bagiannya, misalnya ibu, ayah, isteri, suami, dan lainnya), kemudian kepada para *'ashabah* (kerabat mayit yang berhak menerima sisa harta waris, jika ada, setelah *ashhabul furuḍh* menerima bagian).

Ayat waris di atas, wasiat memang lebih dahulu disebutkan daripada utang piutang. Akan tetapi dalam prakteknya, seperti yang disebutkan oleh Umar bin Khattāb, bahwa utang piutang yang lebih utama dilaksanakan. Persoalan utang piutang hendaklah terlebih

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dahulu diselesaikan, baru kemudian melaksanakan wasiat. Oleh karena itu, didahulukannya penyebutan wasiat tentu mengandung hikmah, diantaranya agar ahli waris menjaga dan benar-benar melaksanakannya. Sebab wasiat tidak ada yang menuntut hingga kadang-kadang seseorang enggan menunaikannya. Hal ini tentu saja berbeda dengan utang piutang. Itulah sebabnya wasiat lebih didahulukan penyebutannya dalam susunan ayat tersebut.

D. Penyebab Terjadinya Syubhāt dalam Pandangan Ulama

Imam Al-Ghazali dalam kitabnya *Ihya' 'Ulumuddin*¹³⁷ menyebutkan didapati beberapa penyebab terjadinya *syubhat* diantaranya adalah:

1. Penyebab pertama adalah keraguan mengenai sebab yang menghalalkan dan mengharamkannya.

Penyebab terjadinya *syubhāt* ini, adakalanya sama antara halal dan haram atau memenga salah satu dari keduanya terakndung unsur kemungkinan. Apabila kedua kemungkinann tersebut seimbang, maka hukumnya apa yang diketahui sebelumnya, sehingga hukum itu disamakan dan tidak ditinggalkan dengan keraguan. Akan tetapi apabila salah satu dari dua kemungkinan dengan adanya dalil yang mu'tabar maka, hukumnya itu bagi yang menang. Penyebab terjadinya *syubhāt* ini dapat diklasifikasikan menjadi empat bagian, yaitu:

¹³⁷ Imam Al-Ghazali, *Ihya Ulumuddin*, alih bahasa, Moh. Zuhri (Semarang: CV. Asyifa', 1992), hlm 331.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a) Keharaman sesuatu terhadap sesuatu diketahui sebelumnya, kemudian terjadi keraguan terhadap kehalalannya.

Menurut penulis buku yang telah disebutkan sebelumnya, model *syubhat* seperti ini wajib dijahui karena ketetapan hukumnya adalah haram.¹³⁸ Sebagai contoh: seorang melempar binatang buruan, binatang tersebut terluka karena buruannya. Kemudian binatang tersebut terjatuh kedalam air, setelah beberapa saat si pemburu baru kemudian menemukannya dalam keadaan mati. Pemburu tersebut tidak dapat memastikan apakah binatang yang diburunya itu mati karena buruannya ataukah karena terjatuh kedalam air. Maka dalam hal ini, telah terjadi keraguan pada cara binatang tersebut mati. Atas dasar ini, terdapat penjelasan dalam hadits Rasulullah

139 لا تأكله فلعلة قتل غير كلبك

artinya: *Janganlah kamu memakannya kerana bisa jadi binatang itu dibunuh oleh selain anjingmu.*

Oleh karena itu Rasulullah selalu hati-hati apabila menerima sesuatu yang status hukumnya masih samar-samar, apakah yang diterimanya itu zakat atau hadiah, dalam keschariannya beliau selalu bertanya tentang pemberian orang lain. Apakah pemberian tersebut sebagai hadiah, ataukah sebagai zakat. Sehingga Rasulullah mengetahui

¹³⁸ *Ibid.*

¹³⁹ Hadist ini merupakan hadits *mutafaqun 'alaih*, hadits tersebut diriwayatkan oleh Abi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sesuatu diantaranya. Merujuk kepada praktek Rasulullah dalam kesehariannya yang telah disebutkan, maka kehati-hatian untuk mengkonsumsi makanan dan mempergunakan barang yang dimilikinya atau barang yang akan dimilikinya dengan cara kewarisan dari pihak pewarisnya yang telah meninggal dunia menjadi sesuatu kehasuran. Karena bisa jadi dalam barang atau harta yang akan ia warisi tersebut masih mengandung usur syubhat yang status kepastian hukumnya belum diketahui secara jelas.

- b) *Syubhat* yang kedua adalah: Kehalalannya diketahui sedangkan keharamannya diragukan. Asalnya halal dan hukumnya juga halal, akan tetapi hanya dalam penerapannya saja diragukan. Sebagai contoh: dua orang laki-laki menikahi dua orang wanita, dan disela pernikahan mereka seekor burung sedang terbang di angkasa. Salah satu dari kedua laki-laki yang telah menikah tersebut berkata: “jika yang terbang ini adalah burung gagak”, maka isteriku tertalak. Sedangkan laki-laki lainnya yang sama-sama yang telah menikah juga menyebutkan “jika burung itu bukan burung gagak, maka istriku tertalak. Dalam kenyataannya mengenai burung yang terbang tersebut adalah samar-samar, maka status hukumnya tidak dapat diputuskan dengan haram pada seorang wanita dari keduanya dan tidak wajib untuk menjahui keduanya. Akan tetapi, menurut ulama yang wara’ dalam hal ini adalah imam al-Ghazali: menjahui dan mentalak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keduanya sehingga keduanya halal bagi seluruh suami, dimana *Makhul* memerintahkan untuk menjahui dalam masalah ini.¹⁴⁰

- c) *Syubhat* yang ketiga adalah: sesuatu yang pada asalnya adalah haram, kemudian muncul sesuatu yang mewajibkan pengahalalannya dengan dugaan yang *ghalib* (kuat), dan itu diragukan. Sedangkan yang menang itu adalah halalnya sesuatu perkara tersebut. Contohnya adalah: seorang melempar binatang buruan, kemudian binatang tersebut pergi. Setelah beberapa saat ia menjumpainya dan dalam keadaan mati, dan pada binatang tersebut tidak ada bekas selain anak panahnya. Tetapi masih *ihhtimal* (kemungkinan), bahwa bintang tersebut mati karena jatuh atau sebab lainnya. Contoh yang telah disebutkan, dalam penetapan hukumnya adalah apabila diketahui dengan jelas bekas benturan atau luka lain, maka status hukumnya disamakan dengan syubhat yang pertama yaitu haram. Imam al-Syafi'i dalam menetapkan hukum pada kalsifikasi syubhat yang ketiga ini terjadi perbedaan pandangan. Akan tetapi pandangan yang dipilahnya adalah buruan tersebut halal, karena luka yang ada pada bintang buruan tersebut merupakan sebab yang tampak dan telah nyata. Karena melihat kepada asalnya, bahwa tidak ada bukti yang lain selain bekas luka tersebut.

¹⁴⁰ Ibid

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d) *Syubhāt* yang keempat adalah: kehalalannya diketahui, akan tetapi kuat menurut dugaan datangnya sesuatu yang mengharamkan karena sebab yang dianggap menurut syara', maka hilanglah *isthishab* dan diputuskan dengan haram, karena dalam pandangan al-Ghazali bahwa *isthishab* itu lemah, dan tidak mempunyai hukum lagi bersama kuatnya dugaan. Misalnya, seseorang berkata "apabila dia membunuh buruan sendirian, maka isterinya tertalaq. Kemudian, dia melukainya dan binatang tersebut pergi dari padanya. Setelah beberapa saat ia mendapatkan binatang tersebut dalam keadaan mati, maka isterinya tersebut sudah haram untuknya. Hal ini, dikarenakan pemburu tersebut membunuh binatang buruan tersebut sendirian, tanpa bantuan orang lain.

2. Penyebab *syubhāt* yang kedua adalah: karena disebabkan oleh perkembangannya dengan prosedur percampuran.¹⁴¹

Hal ini terjadi karena haram yang bercampur dengan halal, oleh sebab demikian keadaan tersebut menjadi samar-samar (*syubhāt*) dan tidak dapat dibedakan. Percampuran antara yang halal dan haram tersebut adakalanya terjadi dengan jumlah yang tidak terhitung dari kedua sisinya tersebut, atau dari salah satu dari keduanya, adakalanya percampuran tersebut dapat diprediksikan jumlah percampurannya.

¹⁴¹ *Ibid*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Apabila percampuran tersebut dengan sesuatu yang terbatas, maka adakalanya percampuran senyawa apabila tidak dapat dibedakan dengan isyarat seperti percampuran barang-barang cair atau percampuran samar-samar antara halal dan haram yang dapat dibedakan benda-bendanya, seperti percampuran hamba sahaya, rumah dan kuda. Sesuatu yang bercampur dengan samar, maka adakalanya dpercampuran tersebut termasuk sesuatu yang mencakup percampuran ‘ainnya (dzatnya) seperti barang-barang dagangan atau tidak mencakup ‘ainnya seperti uang. Penyebab terjadinya *syubhāt* ini dapat diklasifikasikan menjadi tiga bagian:

- a. Pertama: ‘*Ain* (dzatnya) disamakan dengan bilangan yang tersebatas,¹⁴² sebagaimana bangkai bercampur dengan seekor binatang yang disembelih atau dengan sepuluh ekor binatang yang disembelih¹⁴³ atau seorang wanita tukang menyusui bercampur dengan sepuluh orang wanita atau mengawini salah satu dari wanita bersaudara, kemudian ia ragu. *Syubhāt* yang telah disebutkan wajib dijahui, karena penetapannya dilakukan dengan *ijma*’ dan juga bukan merupakan lapangan *ijtihad*.

¹⁴² Imam Al-Ghazali, *Ihya Ulumuddin*, alih bahasa, Moh. Zuhri (Semarang: CV. Asyifa’, 1992), hlm 342.

¹⁴³ *Ibid*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Paparan di atas mengenai penyebab terjadinya *syubhāt* dapat memberikan pemahaman yang konkrit bahwa: terdapat beberapa hal yang menyebabkan status harta dan atau harta warisan menjadi *syubhāt* yakni:

- a. Keadaan pemilik harta, keadaan seorang pemilik menjadi pemilik harta pada umumnya dapat dibagi menjadi tiga keadaan yaitu:

1) Pemiliknya tidak dikenal.

Pemilik harta tidak dikenal, maka tidak pantas asal muasal hartanya tersebut diselidiki dan diprasangkakan. Pada hakikatnya, seorang muslim dilarang untuk berburuk sangka kepada muslim yang lain. sebagaimana Firman Allah dalam Surat al-Hujurat ayat 12:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ
الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan berprasangka (kecurigaan), karena sebagian dari prasangka itu dosa, dan janganlah mencari-cari keburukan orang dan janganlah menggunjingkan satu sama lain.

Sebagaimana juga yang dipraktekkan pada masa nabi, ketika beliau pertama sekali memasuki kota madinah, Nabi dan para sahabatnya juga masuk ke pasar-pasar, dan tidak ada satu riwayatpun yang menyebutkan bahwa nabi dan para sahabat bertanta-tanya tentang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

barang-barang yang ada di pasar tersebut. Padahal, harta haram sudah ada pada masa itu.

2) Pemiliknya diragukan

Dari klasifikasi di atas, harta dapat menjadi *syubhat* apabila pemiliknya diragukan. Dalam hal ini, pemilik harta dapat diragukan apabila ada indikasi-indikasi yang mengarah kepada keraguan tersebut. Indikasi tersebut dapat terlihat dari perawakan, perbuatan, perkataan dan sebagainya. Sebagai contoh dari perkataannya, diketahui seseorang pernah menawarkan sesuatu yang haram, hal ini mengindikasikan adanya sikap remeh terhadap masalah harta. Inilah yang menimbulkan keraguan dari setiap harta yang ia miliki. Hal ini senada dengan sabda Rasulullah SAW:

عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، سَبَطِ رَسُولِ اللَّهِ وَرِيحَانَتِهِ قَالَ :
حَفِظْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ : ((دَعُ مَا يَرِيكَ إِلَى مَا لَا يَرِيكَ)) . رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ
وَالنَّسَائِيُّ، وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ : حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

Artinya: Dari Abu Muhammad al-Hasan bin 'Ali bin Abi Thalib, cucu Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam dan kesayangannya Radhiyallahu 'anhuma, ia berkata: "Aku telah hafal dari Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam: 'Tinggalkan apa yang meragukanmu kepada apa yang tidak meragukanmu'." (Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi dan an-Nasâi. At-Tirmidzi berkata, "Hadits hasan shahih).

3) Keadaan Harta

Dilihat dari keadaan harta, maka status harta dapat menjadi *syubhat* apabila dalam harta tersebut bercampur antara halal dan haram. Dalam kondisi ini, ada beberapa ketentuan yang diatur perihal

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kondisi harta yang bercampur antara halal dan haram antara lain; Pertama, sesuatu yang diketahui keharamannya secara jelas, namun kemudian timbul keraguan karena bercampur dengan yang halal, dalam hal ini, hukumnya jelas jatuh pada haram, seperti daging sapi yang tercampur dengan daging babi.

Kedua, sesuatu yang jelas halalnya namun kemudian timbul keraguan, atau jika keraguan itu muncul setelah ada rasa yakin, dalam hal ini kembali pada hukum asal/ yang diyakini semula, sebagaimana yang disebutkan oleh sebuah kaidah fiqh: *الـيـقـيـن لا يزـال بالشك*: *al-yaqiinu laa yazālu bisy-syak* (sesuatu yang telah diyakini itu tidak bisa digugurkan dengan keraguan). Umpamanya seorang suami yang ragu-ragu apakah ia telah mengucapkan kalimat talak atau belum, atau seseorang yang telah berwudhu kemudian ragu-ragu apakah ia sudah batal atau belum.

Ketiga, sesuatu yang diragukan halal atau haramnya. Dalam hal ini lebih baik menghindarinya, sebagaimana yang dilakukan Rasulullah terhadap kurma yang beliau temukan di atas tikar beliau. Beliau tidak mau memakan kurma tersebut karena khawatir kurma tersebut adalah kurma sedekah, sedangkan Rasulullah tidak boleh memakan sedekah.

E. Asas-asas Dalam Hukum Kewarisan

1. Pengertian Asas

Sebagai hukum yang bersumber dari wahyu Ilahi yang disampaikan dan dijelaskan oleh Nabi Muhammad dengan sunnahnya, hukum kewarisan Islam mengandung asas-asas yang dibentuk berdasarkan sumber hukum kewarisan itu sendiri. Menurut etimologi, yang dimaksud dengan istilah asas ada dua pengertian. Arti asas yang pertama adalah hukum dasar. Sedangkan pengertian asas yang kedua adalah sesuatu kebenaran yang menjadi tumpuan berfikir atau berpendapat.¹⁴⁴

Menurut R.H. Soebroto Brotodiredjo, asas adalah suatu sumber atau sebab yang menjadi pangkal tolak sesuatu, hal yang *inherent* (sangat erat/tidak dapat dipisahkan) dalam segala sesuatu, yang menentukan hakikatnya. Dikaitkan dengan penjelasan asas yang telah dikemukakan, maka dapat dilihat bahwa keberadaan asas dalam hukum kewarisan Islam merupakan prinsip yang harus terpenuhi dalam setiap praktik pembagian harta warisan.

Sebelum dijelaskan mengenai asas-asas kewarisan dalam Islam, terlebih dahulu diterangkan bahwa dalam literatur hukum kewarisan Islam klasik tidak ditemukan penggunaan kata “asas”. Sejauh penelusuran penulis, *term* “asas” baru digunakan dalam literatur hukum kewarisan Islam yang kekinian (kontemporer). Dalam penelusuran penulis, kata asas dalam

¹⁴⁴ Tim Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2006), hlm. 96

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

konteks hukum kewarisan Islam pertama sekali digunakan oleh Muhammad Ali al-Shabuni dalam kitab *al-mawarits fi al-syari'ah al-islamiyah*. Beliau menjelaskan bahwa Allah melalui ayat ayat warisnya yang termaktub dalam surat al-Nisa telah menegaskan dan merinci “*nashib*” (bagian) setiap ahli waris yang berhak menerimanya dan perlu diketahui bahwa ketiga ayat tersebut merupakan asas ilmu faraid yang berisi aturan dan tatacara pembagian harta warisan.¹⁴⁵ Namun beliau tidak menamakan asas yang dimaksud.

2. Pengertian Asas *Ijbari* dan Dasar Hukumnya.

Salah satu prinsip yang mendasar dalam hukum kewarisan Islam adalah *Ijbari*, asas ini berarti bahwa peralihan harta dari seorang yang telah meninggal dunia, berlaku dengan sendirinya menurut kehendak Allah. Ahli waris tidak berhak mengubah ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah tersebut, dan harus menerima kenyataan perpindahan harta pewaris kepada ahli waris sesuai ketentuan dalam *nash*. Prinsip *Ijbari* ini terlihat dari aspek legitimasi ahli waris, harta waris, dan bagian harta waris yang diterima ahli waris. Legitimasi ahli waris ditetapkan berdasarkan hubungan tertentu, terutama hubungan kekerabatan dan hubungan pernikahan.¹⁴⁶

¹⁴⁵ *Ibid*, hlm. 15.

¹⁴⁶ Suhadak, *Legal Standing Dalam Perspektif Gugatan Waris dan Urgensinya* (makalah), diseminarkan dalam Rakerda Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Mataram, Tanggal 24 November 2010, hlm. 1.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kata *ijabari* berasal dari kata *أجبر - يجبر* yang berarti “paksaan”, yaitu sesuatu yang terjadi di luar kehendak sendiri. Kata dasarnya adalah *جبر* yang apabila ditelusuri kata dasar ini dipakai dalam beberapa istilah lain. Untuk lebih memahami tentang makna *ijbari* akan dijelaskan pemakaiannya dalam beberapa istilah berikut:

a. Wali *mujbir*.

Istilah wali *mujbir* dikenal dalam fiqh munakahat. Wali *mujbir* adalah wali yang dapat memaksa anak gadisnya untuk menikah. Wali ini dapat mengawinkan anak gadisnya walaupun tanpa persetujuan anak gadis yang akan dikawinkan tersebut. Dengan kata lain perkawinan ini terjadi di luar kehendak anak gadisnya.¹⁴⁷

b. Jabariyah

Istilah ini dipakai untuk salah satu aliran kalam yang ada dalam Islam. Dalam pemahaman aliran ini, semua perbuatan yang dilakukan oleh seorang hamba adalah sebab kehendak dari kekuasaan Allah, bukan atas kehendak manusia. Dengan kata lain, setiap perbuatan yang terbentuk dari seorang hamba adalah di luar kehendaknya.¹⁴⁸

Istilah-istilah yang telah dikemukakan di atas dapat dipahami bahwa *ijbari* mengandung arti “memaksa”. Dalam konteks hukum waris, makna “memaksa” yang terkandung dalam istilah *ijbari*

¹⁴⁷ Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Kairo: Dar Fath Lil ‘ilmi al Araby, 1973), hlm. 131.

¹⁴⁸ Harun Nasution, *Teologi Islam: Aliran-Aliran Sejarah Analisa Perbandingan*, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 31.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dijabarkan dalam pemahaman bahwa terjadinya peralihan harta seorang yang telah meninggal dunia kepada yang masih hidup berlaku dengan sendirinya. Artinya pemberi waris tidak memiliki perbuatan hukum baik untuk menolak atau menghalanginya terjadinya peralihan harta tersebut. Dengan meninggalnya pemberi warisan maka hartanya langsung dapat berpindah tangan kepada penerima warisan, apakah ia suka atau tidak.

Asas *ijbari* merupakan kelanjutan dari prinsip tauhid yang mengandung arti bahwa peralihan harta dari pewaris kepada ahli warisnya berlaku secara otomatis sesuai dengan ketentuan Allah Ta'ala. Unsur memaksa disini menuntut setiap individu muslim untuk taat kepada hukum Allah sebagai konsekwensi logis dari pengakuannya kepada ke-Maha Esa-an Allah dan kerasulan Muhammad seperti dinyatakan melalui ucapan dua kalimat syahadat.

Ketentuan asas ini bersumber pada firman Allah an-Nisa' ayat 7 yang berbunyi:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Artinya: “Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi bagi istri ada hak bagian (pula) dari harta

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut yang telah ditetapkan”.

Kata “nashib” pada ayat yang dimaksud berarti saham, jatah, bagian yang merupakan hak ahli waris dari harta peninggalan si pewaris. Dalam ayat-ayat selanjutnya Allah merinci bagian-bagian tersebut. Oleh sebab itu dipahami bahwa harta warisan harus dibagi berdasarkan rincian yang telah ditentukan oleh Allah.

Kata *فرضا* diambil dari kata *فرض* yang berarti wajib. Kata *فرض* berarti kewajiban yang bersumber dari yang lebih tinggi kedudukannya, dalam konteks ayat ini kewajiban ini bersumber dari Allah. Dengan demikian, adanya hak warisan yang telah ditentukan oleh Allah tidak dapat ditolak maupun diubah oleh siapapun.¹⁴⁹

Sebab turunnya ayat di atas akan dijelaskan dalam hadits berikut:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ لَا يُورَثُونَ الْبَنَاتِ وَلَا الصِّغَارَ الذُّكُورَ حَتَّى يُدْرِكُوا فَمَاتَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ يُقَالُ لَهُ أَوْسُ بْنُ ثَابِتٍ وَتَرَكَ ابْنَتَيْنِ وَابْنًا صَغِيرًا فَجَاءَ ابْنَا عَمِّهِ خَالِدٌ وَعَرْطَفَةُ وَهُمَا عَصَبَتُهُ فَأَخَذُوا مِيرَاثَهُ كُلَّهُ فَأَتَتْ أَمْرَأَتُهُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَتْ لَهُ ذَلِكَ فَقَالَ مَا أَذْرِي مَا أَقُولُ فَتَرَكْتُ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ الْآيَةُ¹⁵⁰

Artinya:Diriwayatkan dari Ibn Abbas yang menerangkan bahwa orang jahiliyah tidak mewariskan harta kepada wanita (walau dewasa), dan laki-laki yang masih kecil hingga dewasa. Salah seorang kaum Anshar yang bernama Aws bin Tsabit, wafat meninggalkan dua anak perempuan dan dua anak laki-laki masih kecil. Khalid dan Arthafah sebagai kelompok ashabah (hubungan nasab fihak laki-laki) mengambil alih

¹⁴⁹ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, (Jakarta: Lentera hati, 2000), hlm. 336.

¹⁵⁰ Jalaluddin al-Suyuthi, *Lubab al-Nuqul fi Asbab al-Nuzul*, (Riyadh: Maktabat al-Riyadh, tt),hlm.64.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kekuasaan harta al-marhum secara keseluruhan. Kemudian istri al-Marhum menghadap rasul SAW mempertanyakan hal tersebut. Namun Rasul pada saat itu tidak menjelaskannya hingga turun ayat ini (Qs.4:7).

Ayat 7 dalam surat an-Nisa' ini turun sebagai koreksi terhadap adat jahiliyah yang tidak mewariskan harta kepada kaum wanita dan anak kecil. Menurut ayat ini, baik laki-laki, maupun wanita, dewasa atau pun belum, tetap mendapatkan warisan dari al-marhum. Oleh sebab itu baik dikehendaki ataupun tidak, tidak ada seorangpun yang dapat menahan ketentuan pewarisan yang telah ditentukan dalam ayat ini karena secara rinci Allah telah menentukan setiap ahli waris mempunyai hak untuk mendapatkan harta warisan yang telah ditinggalkan oleh pewaris.

Ulama, seperti Qatadah, al-Sudi, Muqatil Thawus, yang berpendapat bahwa ayat ini dimansuh oleh ayat 11-12 surat al-Nisa. Menurut Ibn al-Nashr al-Muqri (w.410), ayat ini turun berkaitan dengan adanya wanita anshar yang tidak mendapat warisan dari suaminya yang bernama 'Aus. Berdasar ayat ini wanita pun tetap mendapat bagian tertentu, maka ketentuannya dimansuh oleh ayat warits.¹⁵¹ Ibn al-Jawzi berpendapat justru ayat ini *memansukh* ayat wasiat yang tercantum dalam surat al-Baqarah.¹⁵² Namun Abu Muslim al-Ashfahani berpendapat bahwa ayat ini tidak *dimansukh* melainkan dijelaskan oleh

¹⁵¹Hibatullah bin Salamah bin Nashr al-Muqri, *al-Nasikh wa al-Mansukh*, (Beirut: al-Maktab al-Islami, 1984 M), hlm.65.

¹⁵²Abu al-Faraj Ibn al-Jauzi, *Nawasikh al-Quran*, (Beirut: Dar al-Kutub, tt), hlm.59.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ayat warits.¹⁵³ Artinya kaum laki-laki maupun perempuan mendapat bagian warisan, tapi ukurannya dijelaskan pada ayat warits.

Selain al-Quran surat an-Nisa' ayat 7, sumber hukum lainnya yang dapat dijadikan sebagai landasan asas *ijbari* adalah sabda rasulullah yang berbunyi:

عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقسّموا المال بين أهل الفرائض على كتاب الله (رواه مسلم)¹⁵⁴

Artinya :“Dari Abbas r.a., berkata, Rasulullah saw., bersabda: Bagikanlah harta pusaka antara ahli waris menurut kitabullah (al-Qur'an).(HR. Muslim)

Ijbari dari segi pewaris mengandung arti bahwa sebelum meninggal ia tidak dapat menolak peralihan harta tersebut. Apapun kemauan pewaris terhadap hartanya, maka kemauannya itu dibatasi oleh ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah, oleh karena itu sebelum meninggal ia tidak perlu memikirkan atau merencanakan sesuatu terhadap hartanya, karna dengan kematiannya itu secara otomatis hartanya beralih kepada ahli warisnya, baik ahli waris itu suka atau tidak.

Adanya asas *ijbari* dalam hukum kewarisan Islam dapat dilihat dari beberapa segi:

¹⁵³Ibn Katsir, *Tafsir Ibn Katsir*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo. 2000 M), hlm. 212.

¹⁵⁴Imam Muslim, *Shahih Muslim*, juz. 3, (Beirut: Darul Kutub Alamiah, 1992 M), hlm. 23.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Segi peralihan, maksudnya adalah bahwa harta orang yang telah mati itu beralih dengan sendirinya, bukan di alihkan siapa-siapa kecuali oleh Allah.
- b. Segi jumlah, menurut terminologi ilmu fikih berarti sesuatu yang telah diwajibkan Allah kepada hambanya. Dengan kata lain berarti sudah ditentukan jumlahnya dan harus dilakukan sedemikian rupa, secara mengikat dan memaksa.
- c. Segi penerima peralihan harta, setiap orang yang berhak atas harta peninggalan itu sudah ditentukan secara pasti, sehingga tidak ada satu kekuasaan manapun dapat mengubahnya, dengan memasukkan orang lain dan mengeluarkan orang yang berhak.

3. Asas asas dalam Kewarisan

Berdasarkan pemahaman ayat-ayat dalam al-Qur'anyang menjadi sumber hukum kewarisan dalam Islam, ada beberapa asas yang dianut dalam sistem kewarisan Islam yakni:

a. Asas *ijbari*

Secara etimologis, kata *ijbari* mengandung arti paksaan (*compulsory*). Kata dasar paksa dapat diartikan dengan “melakukan sesuatu di luar kehendak sendiri”. Dalam konteks asas *ijbari* yang dianut dalam sistem kewarisan Islam, terjadinya peralihan harta seseorang yang telah meninggal dunia kepada yang masih hidup berlaku dengan sendirinya tanpa ada perbuatan hukum atau pernyataan kehendak dari si

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pewaris, bahkan si pewaris (semasa hidupnya) tidak dapat memberikan pernyataan untuk menolak atau menghalang-halangi terjadinya peralihan tersebut.¹⁵⁵

Dengan lain kata, hal ini berarti peralihan harta seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya berlaku dengan sendirinya menurut kehendak Allah tanpa bergantung kepada kehendak ahli waris atau pewaris. Ahli waris langsung menerima kenyataan pindahanya harta si meninggal dunia kepadanya sesuai dengan jumlah yang telah di tentukan.¹⁵⁶

Indonesia menerapkan asas *ijbari* dalam hukum kewarisan Islam yang juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam. Ketentuan dalam Pasal 187 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa: “Sisa dari pengeluaran dimaksud di atas adalah merupakan harta warisan yang harus dibagikan kepada ahli waris yang berhak”. Dalam penjelasan diketahui bahwa yang dimaksud dengan pengeluaran adalah pengeluaran yang disebutkan dalam pasal 175 ayat 1 sub a, b, c yakni:

- 1) Biaya untuk mengurus dan menyelesaikan sampai pemakaman jenazah selesai.
- 2) Menyelesaikan hutang-hutang, baik berupa biaya pengobatan, perawatan termasuk kewajiban pewaris maupun menagih piutang.
- 3) Menyelesaikan wasiat pewaris.

¹⁵⁵Suhrawardi K. Lubis dan Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 39.

¹⁵⁶M. Idris Ramulyo, *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dengan Kewarisan Menurut Hukum Perdata (BW)*, (Yogyakarta: 1994 M), hlm. 115.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa setelah tiga hal di atas ditunaikan, maka harta warisan harus dibagikan. Kata harus di sini menyatakan bahwa ahli waris memang berhak untuk dibagikan harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris. Pembagian harta warisan wajib dilaksanakan walaupun pewaris tidak pernah merencanakan hal tersebut.

Perkataan “harus dibagikan” pada Pasal 187 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam tersebut menunjukkan sifat memaksa dan mengikatnya hukum kewarisan Islam Indonesia. Sifat memaksa hukum kewarisan Islam Indonesia ini juga dapat dijumpai dalam ketentuan Pasal 188 Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa “ para ahli waris baik bersama-sama atau perseorangan dapat mengajukan permintaan kepada ahli waris yang lain untuk melakukan pembagian harta warisan”. Bila ada di antara ahli waris yang tidak menyetujui permintaan itu, maka yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Agama untuk melakukan pembagian harta warisan. Ketentuan dalam Pasal 188 Kompilasi Hukum Islam ini memberikan hak kepada ahli waris untuk menuntut pembagian harta warisan baik secara sukarela melalui permintaan kepada ahli waris lainnya atau mengajukan gugatan melalui Pengadilan Agama agar harta warisan yang ada dibagikan kepada ahli waris.¹⁵⁷

¹⁵⁷ *Lex Privatum*, Vol.I/No.5/November/2013 M, hlm. 48.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Namun sifat memaksa hukum kewarisan Islam ini ternyata tidak mutlak, sebab dalam hal tertentu dapat dikecualikan. Kompilasi Hukum Islam memberikan kemungkinan tersebut, bahwa penyelesaian pembagian harta peninggalan dapat dilakukan secara damai dan musyawarah di antara ahli warisnya. Ketentuan dalam Pasal 183 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya. Berdasarkan bunyi ketentuan dalam Pasal 183 Kompilasi Hukum Islam ini, pembagian harta peninggalan dapat dilakukan secara damai dan musyawarah, asalkan sebelumnya ahli waris secara nyata telah mengetahui bagian peruntukannya masing-masing yang menjadi haknya, baru setelah itu dengan kerelaan masing-masing ahli waris untuk menyerahkan bagian peruntukannya kepada ahli waris lainnya atau dibagi sama rata di antara ahli waris tersebut.¹⁵⁸

Setelah Allah menjelaskan siapa saja yang berhak mendapat harta waris dan berapa besar hak masing-masing dalam ayat 11 dan 12, di dalam al-Quran surat Al-Nisa ayat 13 dan 14 Allah menjanjikan konsekwensi hukum dari ketentuan yang terkandung dalam dua ayat sebelumnya. Bagi orang yang taat kepada aturan hukum waris untuk masuk surga. Tapi sebaliknya, buat mereka yang tidak mengerjakan

¹⁵⁸ *Lex Privatum*, Vol.I/No.5/November/2013 M, hlm. 48.

aturan pembagian warisan itu, akan dimasukkan ke neraka dan kekal selama-lamanya.

Ayat di atas ini Allah menyebutkan bahwa membagi warisan adalah bagian dari *hudud*, yaitu sebuah ketetapan yang bila dilanggar akan melahirkan dosa besar. Bahkan di akhirat nanti akan diancam dengan siska api neraka. Setelah menjelaskan rincian bagian-bagian untuk masing-masing ahli waris, kedua ayat di atas memberi dorongan peringatan serta janji dan ancaman dengan menegaskan bahwa bagian yang ditetapkan di atas (*تلك حدود الله*) itu adalah batas-batas Allah, yakni ketentuan-ketentuan-Nya yang tidak boleh dilanggar. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya dengan mengindahkan batas-batas itu dan ketentuan-Nya yang lain, niscaya Allah memasukkannya ke dalam Surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya, itulah keberuntungan yang besar. Bukan keberuntungan semu atau sementara seperti yang diduga oleh sementara orang ketika mampu memperoleh kemegahan duniawi. Dan barangsiapa yang mendurhakai Allah dan Rasul Nya di atas, atau dan yang lain, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka. Sedang ia kekal didalamnya, dan yang mendurhakai Allah tapi tidak mempersekutukan Nya, maka baginya siksa yang menghinakan,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

setimpal dengan sikap mereka melecehkan ketentan Allah dan meremehkan orang-orang yang mereka halangi hak-haknya.¹⁵⁹

Sementara Imam al Qurthubi menafsirkan *تلك حدود الله* adalah hukum-hukum yang telah Allah jelaskan kepada kalian agar kalian mengetahui serta mengamalkannya. Kemudian sebagai konsekwensi hukumnya dijelaskan bahwa *ومن يطع الله ورسوله* (barang siapa taat kepada Allah dan Rasul Nya) dalam arti mengamalkan pembagian harta warisan seperti perintah Allah maka *يدخله جنّات* (Allah akan memasukkannya ke dalam syurga). Selanjutnya Allah menegaskan konsekuensi hukum apabila tidak mengamalkan hukum waris yang telah ditetapkan oleh Allah dengan kalimat *ومن يعص الله ورسوله ويتعدّ حدوده يدخله ناراً*.¹⁶⁰

Hamka dalam tafsirnya menyebutkan ungkapan yang tidak jauh berbeda dengan kedua penafsiran di atas: Yang demikian itu batas-batas Allah” yaitu peraturan-peraturan waris yang telah Allah tentukan, sehingga tidak timbul lagi fitnah dan hasad dengki dalam keluarga dan tidak ada lagi aniaya yang lebih tua kepada yang masih kecil.

¹⁵⁹M. Quraisy Shihab, *Tafsir Al Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002 M), hlm.367-368.

¹⁶⁰Al-Qurthubi, *Tafsir al-jami' li ahkam al-Qur'an*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008 M), hlm.197-198.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berpatokan pada surat al-Nisa' ayat 13 dan 14, tampaknya para mufssir tidak ada perbedaan tentang hukum pembagian harta warisan, yakni pembagian harta warisan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan Allah yang tersebut dalam al-Qur'an, bahkan diakhir ayat 14 surat al-Nisa' Allah mengancam orang-orang yang tidak mentaati ketentuan pembagian harta warisan dan memasukkannya ke dalam neraka selama-lamanya.

Ketentuan ayat-ayat waris yang telah disebutkan penulis di atas, dapat dipahami bahwa peralihan harta dari yang meninggal (pewaris) kepada yang hidup (ahli waris) berikut jumlah bagiannya terjadi tidak atas kehendak pewaris maupun ahli waris, tetapi atas kehendak Allah melalui al-Qur'an. Ini mengandung arti bahwa terjadinya waris mewarisi dan aturan-aturan yang berkaitan dengannya adalah bersifat memaksa. Dalam terminologi ilmu hukum, dikenal dua sifat hukum, yaitu hukum yang 'memaksa' dan hukum yang 'mengatur'. Hukum disebut bersifat 'memaksa' apabila ketentuan hukum yang ada tidak dapat dikesampingkan, yaitu, perintah atau larangan hukum tersebut -tidak bisa tidak- harus ditaati. Seandainya tidak ditaati, maka dapat dikategorikan sebagai perbuatan melanggar hukum yang dapat dikenakan sanksi atau hukuman tertentu. Inilah yang melandasi keberadaan asas *ijbari* dalam hukum kewarisan Islam.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berbeda halnya dengan pengertian hukum yang bersifat ‘mengatur’, maka hukum yang ada dapat dikesampingkan (tidak dipedomani) seandainya para pihak berkeinginan lain sesuai dengan kesepakatan atau musyawarah di antara mereka. Dalam hal ini, walaupun tidak dilaksanakan ketentuan hukum yang ada, perbuatan tersebut tidak dianggap sebagai perbuatan melanggar hukum karena sifatnya yang (sekedar) mengatur itu. Sedangkan secara *zahir*, ternyata tidak ada satu ketentuan pun (*nash*), baik dalam al-Qur’an maupun Hadits Nabi saw, yang menyatakan bahwa membagi harta warisan menurut ketentuan hukum waris Islam itu tidak wajib. Bahkan sebaliknya, Allah telah menyatakan kewajibannya seperti dapat dilihat pada ayat-ayat waris yang telah disebutkan sebelumnya. Ayat-ayat waris ini jelas menunjukkan kekuatan atau kewajibannya. Hal ini diperkuat lagi dengan adanya sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Muslim dan Abu Daud, “Bagilah harta warisan di antara para ahli waris menurut Kitabullah (al Qur’an).”

Uraian di atas, dikaitkan dengan sifat hukum yang telah dikemukakan, maka hukum waris Islam yang telah diatur oleh Allah merupakan ketentuan hukum yang bersifat memaksa. Karena itu, wajib bagi setiap pribadi muslim untuk mengamalkannya. Bahkan, dengan mengacu kepada sumber hukum asalnya, pelanggaran terhadap pelaksanaan hukum waris Islam dikenakan sanksi langsung oleh Allah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

meskipun bukan di dunia ini- di akhirat kelak menurut Surat al-Nisa':

14. Setelah memperbincangkan dan memahami kekuatan hukum waris Islam, selayaknya tidak ada alasan lagi bagi setiap muslim untuk mengambil hukum waris lain selain hukum waris Islam. Ketaatan seorang muslim dalam melaksanakan hukum waris Islam, seperti halnya hukum syariat lainnya, merupakan tolak ukur dari kadar keimanannya kepada Allah yang Maha Bijaksana. Hendaknya setiap pribadi muslim menyadari bahwa mengambil hukum selain hukum yang berasal dari Allah dapat dikategorikan ke dalam salah satu dari tiga macam sebutan ini: kafir, zhalim, atau fasik (lihat Surat al-Maidah: 44, 45, 47).

Namun beberapa pendapat menentang apa yang telah dijelaskan sebelumnya. Merujuk pada surat al-Nisa ayat 14, bahwasanya kewarisan merupakan hak bukan kewajiban. Tidak ada teks yang menyebutkan kewajiban mewarisi, tetapi yang ada adalah hak mewarisi. Dan hak mewarisi merupakan hak hamba atau perorangan. Maksudnya, hak-hak tersebut apabila dilanggar akan merugikan diri orang yang bersangkutan, sehingga apabila hak tersebut dilanggar maka sepenuhnya terserah kepada pemilik yang dilanggar, apakah ia akan menuntut atau memaafkan. Hal ini dipertegas oleh pendapat Muhammad Abu Zahrah, beliau menegaskan bahwa hak seseorang untuk mewarisi harta peninggalan ahli warisnya yang meninggal dunia

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

termasuk kedalam hak hamba secara murni. Beliau menyejajarkan hak untuk mewarisi dengan untuk menagih atau piutang dan masalah-masalah lain yang berhubungan dengan pemilikan harta¹⁶¹.

Harun Nasution juga menentang keberadaan asas *ijbari*. Menurutnya, memang benar bahwa surat al-Nisa ayat 11 dan 176 adalah dalil yang bersifat qath'i dan muhkamat yang tidak mungkin dilakukan ijtihad. Namun menurut Harun Nasution, sifat ke-qath'iannya pada segi asalnya yaitu dari Allah dan maknanya bersifat matematis. Dengan demikian dalam pelaksanaannya dapat bersifat dhanny, jadi pembagian 2:1 bisa merupakan pilihan. Ketika sebuah keluarga sebagai ahli waris bersepakat untuk memilih jalan lain dengan landasan kesepakatan dan saling rela, demi kemaslahatan keluarga dan kemudian membagi 1:1, maka mereka tidak dapat dikategorikan menentang ayat Al-Qur'an. Malahan keluarga tersebut tidak akan berdosa atas kesepakatan memilih jalan lain untuk membagi harta warisan pewaris.¹⁶²

Pengertian hal yang sama juga di ungkapkan oleh Muhammad Abduh ia memberikan peluang besar untuk mentakwilkan ayat dengan tetap memperhatikan aturan bahasa agar maksudnya sesuai dengan ketentuan akal. Dengan pertimbangan akal Muhammad Abduh

¹⁶¹Satria Effendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2004), hlm.342.

¹⁶²Hasbi Hanan, *Pembagian Waris 2:1 dalam Perspektif Hadits Ahkam*, dikutip dari majalah Suara UI dilag No.7, (Jakarta: 2005), hlm. 94.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

meminta umat Islam agar melakukan ijtihad untuk menemukan penafsiran atau rumusan baru terhadap ayat al-Qur'an asal tidak terkait dengan ibadah. Sehingga dapat memberikan penafsiran yang lebih tepat dan cocok sesuai dengan kondisi nyata masyarakat Islam yang selalu berkembang. Pembagian 2:1 yang tercantum secara harfiah dalam ayat al-Qur'an merupakan pesan keadilan yang harus dijunjung tinggi oleh setiap umat Islam dalam membagi harta warisan sebagai wujud pengamalan al-Qur'an. Kini pembagian dengan perbandingan 2:1 telah nyata tidak sesuai dengan rasa keadilan yang telah tergeser akibat pergeseran di masyarakat, di mana peran laki-laki dan perempuan sudah tidak ada perbedaan.

Keadaan masyarakat sekarang ini sudah berbeda dengan keadaan masyarakat ketika ayat waris diturunkan. Peran perempuan masa sekarang tidak lagi di lingkungan keluarga, tetapi sudah keluar ke bidang-bidang yang dulunya dikuasai laki-laki. Di samping pemikiran masyarakat tersebut, dalam perubahan pembagian waris 2:1 menjadi 1:1 antara laki-laki dan perempuan juga dapat dilihat dari pemikiran rasionalis atau ta'aquly. Pemikiran ta'aquly ini menurut Ibrahim Hosen bertumpu pada maqashid syar'i (tujuan hukum) yaitu pendekatan yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memungkinkan dan memberi peluang kepada akal untuk menetapkan tujuan hukum sesuai dengan kemaslahatan umat.¹⁶³

Atas dasar pemikiran ini maka tidak semua ketentuan yang *qath'i* dengan sendirinya diberlakukan dalam segala zaman dan keadaan. Inilah yang dimaksud unsur pelaksanaan (*tathbiq*) mempertimbangkan keadaan kemaslahatan. Hal ini tampak dalam pembagian harta warisan berdasarkan kesepakatan untuk membagi sama antara laki-laki dan perempuan menunjukkan ketentuan 2:1 yang bersifat *qath'id* disesuaikan dengan kondisi tertentu.¹⁶⁴

Sebelum UU Nomor 3 Tahun 2006 ada, masyarakat Islam di Indonesia boleh memilih (hak opsi) hukum kewarisan dalam membagi harta warisan. Hak opsi dalam perkara warisan ialah hak memilih hukum warisan apa yang akan dipergunakan dalam menyelesaikan pembagian warisan.¹⁶⁵ Penjelasan umum angka 1 alinea 2 UU Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas UU No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, bahwa kalimat yang terdapat dalam penjelasan umum UU Nomor 7 Tahun 1989 yang menyatakan: “Para pihak sebelum berperkara dapat mempertimbangkan untuk memilih hukum apa yang dipergunakan dalam pembagian warisan”, dinyatakan

¹⁶³Jalaluddin Rahman, *Perumusan Ulang Hukum Waris Islam*, (Jakarta: al-Hikmah, 2004), hlm. 90.

¹⁶⁴Jalaluddin Rahman, *Perumusan Ulang Hukum*, hlm.90.

¹⁶⁵Yahya Harahap, *Kedudukan, Kewenangan dan Acara Peradilan Agama , UU Nomor 7 Tahun 1989*, (Jakarta: Pustaka Kartini, 1993), hlm. 162.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dihapus. Sebab ditinjau dari segi pendekatan hukum Islam pemberian hak opsi itu kurang dapat dibenarkan, sebab seolah-olah membuka pintu bagi penganut agama Islam untuk meninggalkan hukum waris Islam dan lebih mengutamakan nilai-nilai hukum waris asing.¹⁶⁶

Penghapusan hak opsi ini secara filosofis merupakan pengejawantahan dari salah satu azaz hukum waris Islam, yaitu asas *ijbari* atau Keharusan, kewajiban. Dalam pandangan Muhammad Shahrur, ayat-ayat waris yang bersifat eksplisit merupakan salah satu batasan dari sekian batasan (*hudūd*) hukum syariat yang ditentukan Allah. Otoritas penentuan syariat Islam hanya milik Allah semata, bukan otoritas yang lain, bahkan kepada Nabi Muhammad SAW sekalipun. Sehingga ketentuan hukum yang berasal dari Nabi Muhammad SAW bersifat temporal. Hukum yang bersumber dari Allah bersifat universal, berlaku untuk segala situasi dan kondisi, sesuai setiap waktu dan tempat.

Penerapan asas *ijbari* juga dapat ditemukan dalam pertimbangan putusan hakim. Disebutkan bahwa hukum kewarisan Islam memiliki beberapa asas yang mengikat dan menentukan, diantara asas tersebut adalah asas *ijbari* dan asas individual. Maksud dari asas *ijbari* adalah bahwa pada saat seseorang meninggal dunia, kerabatnya

¹⁶⁶ A. Mukti Arto, *Teknik Pemeriksaan Perkara Waris Di Pengadilan Agama*, Catatan ini berasal dari Bahan Bimbingan Teknis Kompetensi Hakim Pengadilan Agama Angkatan V Tahun 2015, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung R.I.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(atas pertalian darah dan pertalian perkawinan) langsung menjadi ahli waris, karena tidak ada hak bagi kerabat tersebut untuk menolak sebagai ahli waris atau berfikir lebih dahulu apakah akan menolak atau menerima sebagai ahli waris¹⁶⁷

b. Asas bilateral

Adapun yang dimaksud dengan asas bilateral dalam hukum kewarisan Islam adalah bahwa seseorang menerima hak warisan dari kedua belah pihak garis kerabat, yaitu garis keturunan perempuan maupun garis keturunan laki-laki.¹⁶⁸

Asas bilateral ini bersumber dari surat al-Nisa' ayat 7, 11, 12 dan 176. Dalam ayat 7 dijelaskan bahwa seorang laki-laki berhak mendapat warisan dari pihak ayahnya dan juga dari pihak ibunya. Begitu pula seorang perempuan berhak menerima harta warisan dari pihak ayahnya dan juga pihak ibunya. Ayat ini merupakan dasar bagi kewarisan bilateral yang dianut dalam sistem kewarisan Islam.¹⁶⁹

Ayat 11 dalam surat al-Nisa' juga ditegaskan bahwa anak perempuan berhak menerima warisan dari kedua orang tuanya sebagaimana yang didapat oleh anak laki-laki dengan bandingan seseorang anak laki-laki menerima sebanyak yang didapat dua orang

¹⁶⁷ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 0116/Pdt.G/2012/PA.BB.

¹⁶⁸ *ibid*, hlm. 40.

¹⁶⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2004 M), hlm. 20.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

anak perempuan. Ibu berhak mendapat warisan dari anaknya, baik laki-laki maupun perempuan. Begitu pula ayah sebagai ahli waris laki-laki berhak menerima warisan dari anak-anaknya, baik laki-laki maupun perempuan sebesar seperenam bagian, bila pewaris ada meninggalkan anak.

Ayat 12 dalam surat al-Nisa' juga menegaskan bahwa bila pewaris adalah seseorang laki-laki yang tidak memiliki anak dan tidak memiliki ayah, maka saudara laki-laki dan atau perempuannya berhak menerima bagian dari harta tersebut. Begitu juga bila pewaris adalah seseorang perempuan yang tidak memiliki pewaris langsung (anak/ayah), maka saudara yang laki-laki dan atau perempuannya berhak menerima harta tersebut.

Pemahaman ayat yang dikemukakan diatas terlihat secara jelas bahwa kewarisan itu beralih ke bawah (anak-anak), ke atas (ayah dan ibu) dan kesamping (saudara-saudara) dari kedua belah pihak garis keluarga, yaitu laki-laki dan perempuan dan menerima warisan dari dua garis keluarga yaitu dari garis laki-laki dan garis perempuan. Inilah yang dinamakan kewarisan secara bilateral.¹⁷⁰

c. Asas individual

Hukum Islam menganut asas kewarisan secara individual, dalam arti bahwa harta warisan dapat dibagi-bagi pada masing-masing ahli

¹⁷⁰ *Ibid*, hlm. 21.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

waris untuk dimiliki secara perorangan. Dalam pelaksanaannya, masing-masing ahli waris menerima bagiannya tersendiri tanpa terikat dengan ahli waris yang lain. Keseluruhan harta warisan dinyatakan dalam nilai tertentu yang kemudian jumlah tertentu dibagikan kepada setiap ahli waris yang berhak menerimanya menurut kadar masing-masing.¹⁷¹

Secara garis besar, makna yang terkandung dalam surat al-Nisa' ayat 7 dapat disimpulkan bahwa laki-laki maupun perempuan berhak menerima warisan dari orang tua dan karib kerabatnya sesuai dengan bagian yang telah ditentukan. Ahli waris yang tidak memenuhi ketentuan untuk bertindak atas hartanya seperti belum dewasa, maka harta warisan yang diperolehnya berada di bawah kuasa walinya, kemudian harta tersebut harus dikembalikan oleh walinya ketika anak tersebut telah dewasa dan cakap dalam melakukan perbuatan hukum.

Menghilangkan bentuk individualnya dengan jalan mencampurkan harta warisan tanpa perhitungan dan dengan sengaja menjadikan hak kewarisan itu bersifat kolektif berarti menyalahi ketentuan yang disebut di atas. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa bentuk kewarisan kolektif tidak sesuai dengan ajaran Islam, karena cara tersebut dikhawatirkan akan memakan hak anak yatim yang terdapat dalam harta itu.¹⁷²

¹⁷¹ Mochlm. Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam, Sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 28.

¹⁷² Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam.*, hlm. 23.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d. Asas keadilan berimbang

Kata “adil” merupakan kata bahasa Indonesia yang berasal dari kata *al-‘adlu*. Dalam hubungannya dengan hak yang menyangkut materi, khususnya yang menyangkut dengan kewarisan, kata tersebut dapat diartikan: keseimbangan antara hak dan kewajiban dan keseimbangan antara yang diperoleh dengan keperluan dan kegunaan.¹⁷³

Asas keadilan berimbang dalam hukum kewarisan dapat dikatakan bahwa baik laki-laki maupun perempuan sama-sama berhak tampil sebagai ahli waris mewarisi harta peninggalan yang ditinggal mati oleh pewaris¹⁷⁴, seperti terungkap dalam firman Allah QS. al-Nisa’ ayat 7 yang telah disebutkan sebelumnya. Dengan kata lain dapat dikemukakan bahwa faktor jenis kelamin tidaklah menentukan dalam hak kewarisan sebagaimana yang dianut dalam sistem kewarisan *patrilineal*, yang ahli waris tersebut hanyalah keturunan laki-laki saja/garis kebabakan).¹⁷⁵

Selama ini orang sering mempermasalahkan aturan satu laki-laki berbanding dua perempuan (2:1) yang diatur dalam al-Quran bertentangan dengan prinsip keadilan. Jika dilihat dari segi jumlah bagian yang diperoleh saat menerima hak, memang terdapat ketidaksetaraan. Akan tetapi hal tersebut bukan berarti tidak adil, karena keadilan dalam pandangan Islam tidak hanya diukur dengan jumlah yang

¹⁷³ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam...*, hlm. 24.

¹⁷⁴ M. Idris Ramulyo, *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dengan Kewarisan Menurut Hukum Perdata (BW)*, hlm. 118.

¹⁷⁵ Suhrawardi, hlm. 41.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

didapat saat menerima hak waris tetapi juga dikaitkan kepada kegunaan dan kebutuhan.¹⁷⁶

Hak warisan yang diterima oleh ahli waris pada hakikatnya merupakan kontinuitas tanggung jawab pewaris terhadap keluarganya atau ahli waris dalam mengelola harta, sehingga jumlah bagian yang diterima ahli waris berimbang dengan perbedaan tanggung jawab seseorang (yang kemudian menjadi pewaris) terhadap keluarga (yang kemudian menjadi ahli waris). Oleh sebab itu laki-laki yang pada dasarnya memikul tanggungjawab nafkah dalam keluarga memperoleh bagian yang lebih besar daripada perempuan yang nafkahnya ditanggung oleh laki-laki.¹⁷⁷

e. Asas semata akibat kematian

Hukum waris Islam memandang bahwa terjadinya peralihan harta hanya semata-mata disebabkan adanya kematian. Dengan lain kata, harta seseorang tidak dapat beralih secara *ijbar* kepada ahli warisnya seandainya dia masih hidup. Walaupun ia berhak untuk mengatur hartanya, hak tersebut semata-mata hanya sebatas keperluannya semasa ia masih hidup, dan bukan untuk penggunaan harta tersebut sesudah ia meninggal dunia.¹⁷⁸

¹⁷⁶ Amir Syarifuddin, hlm. 26.

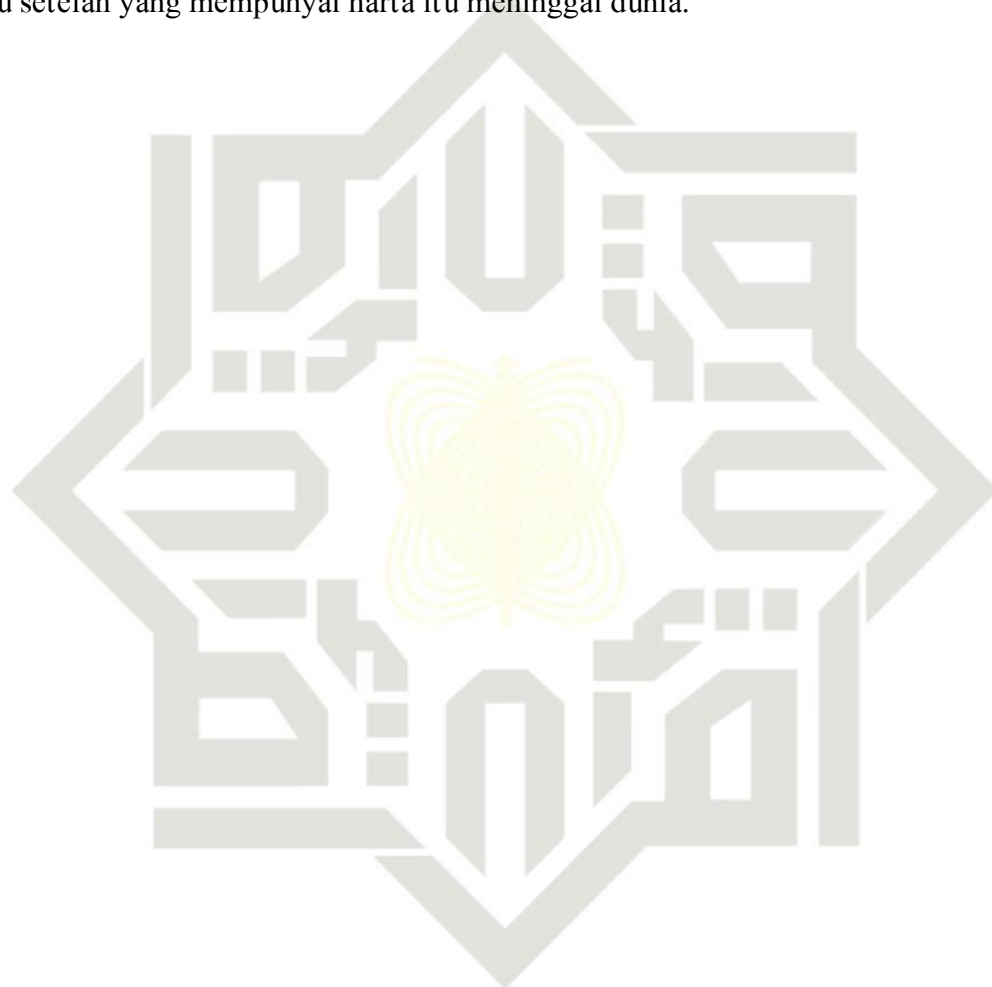
¹⁷⁷ Amir Syarifuddin., hlm. 26.

¹⁷⁸ Suhrawardi K. Lubis dan Komis Simanjuntak., hlm. 41.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Asas kewarisan akibat kematian ini dapat digali dari penggunaan kata-kata “*waratsa*”, yang banyak terdapat dalam al-Qur’an. Kata *waratsa* ditemukan beberapa kali digunakan dalam ayat-ayat kewarisan. Dari keseluruhan pemakaian kata itu terlihat bahwa peralihan harta berlaku setelah yang mempunyai harta itu meninggal dunia.



UIN SUSKA RIAU



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ilmiah diperlukan suatu metode penelitian¹ yang sesuai dengan permasalahan yang sedang diteliti, karena metode penelitian tersebut berfungsi sebagai cara mengerjakan sesuatu sebagai upaya agar kegiatan pekerjaan tersebut dapat terlaksana secara rasional guna mencapai hasil yang optimal.²

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang menghasilkan prosedur analisis kata-kata dengan tidak menggunakan prosedur analisis statistik atau kuantifikasi, dengan demikian penelitian kualitatif adalah penelitian yang tidak menghasilkan perhitungan dalam bentuk apapun, akan tetapi merupakan kata-kata tertulis.

Penulisan ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang penemuan objeknya dilakukan dengan menggali informasi kepustakaan, berupa teks: seperti buku, ensiklopedi,

¹Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Oleh karena demikian terdapat empat kata kunci yang perlu diperhatikan dalam melakukan penelitian, diantaranya adalah: cara ilmiah, data, tujuan dan kegunaan. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional, empiris dan sistematis. Rasional berarti kegiatan penelitian tersebut dilakukan dengan cara-cara yang masuk akal sehingga terjangkau oleh penalaran manusia. Empiris berarti cara yang dilakukan itu dapat diamati oleh indera manusia, sehingga orang lain dapat mengamati dan mengetahui cara-cara yang digunakan dalam menulis sebuah karya ilmiah. Sistematika artinya, proses yang digunakan dalam penelitian itu menggunakan langkah-langkah tertentu yang bersifat logis, artinya dapat diterima oleh akal pikiran, tidak mengada-adakan yang tidak ada. Lihat, Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Method)*, (Bandung: Alfabeta, 2016), hlm. 3.

²Anton Bakker, *Metode Filsafat*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1996,) hlm. 10.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

jurnal ilmiah, koran, majalah dan dokumen lainnya.³ Bahan-bahan yang didapat dari pustaka diseleksi berdasarkan kualitas isi buku atau kitab tersebut serta dengan memperhatikan tingkat kebaruan dari isinya. Berdasarkan hal yang telah disampai di atas, maka penelitian kepustakaan dengan memilah-milahnya kemudian memprioritaskan sumber bacaan yang memiliki kualitas, baik dari aspek isinya maupun popularitas pengarangnya.

Ada empat ciri utama penelitain kepustakaan: *Pertama*, peneliti berhadapan langsung dengan teks, bukan pengetahuan dari lapangan atau saksi mata berupa kejadian, orang atau benda-benda lain. *Kedua*, data pustaka bersifat siap pakai, artinya data mentah yang tertuang dalam teks dan tentunya perlu analisa dari penulis sehingga menjadi data yang siap saji. *Ketiga*, data pustaka umumnya adalah sumber sekunder yang bukadata orisinal dari tangan pertama dilapangan. *Keempat*, kondisi data pustaka tidak dibatasi oleh ruang dan waktu.⁴

Penelitian ini bercorak penelitian hukum normatif dikarenakan bersinggungan erat dengan hukum, yang tentunya mengutamakan pengkajian terhadap ketentuan-ketentuan hukum maupun asas-asas hukum pada umumnya. Penelitain hukum normatif merupakan penelitian dengan mendasarkan kepada bahan hukum, baik primer maupun sekunder.⁵ Kajian

³Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Ober Indonesia, 2008), hlm. 3. Lihat juga: Abuddin Nata, *Metodologio Studi Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hlm.173.

⁴*Ibid*, hlm.3.

⁵Soerjono, Soekanto dan Sri Pamudji, *Pengantar Penelitian Normatif*, (Jakarta: Rajawali Press, 1985), hlm. 15.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

hukum normatif melihat hukum dalam karakternya yang berisi kaedah atau pennormaan.

Sedangkan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersifat deskriptif analisis yaitu menjelaskan tentang kedudukan *tirkah subhāt* dalam pembagian harta warisan yang dikaitkan dengan asas *ijbari* yang memaksa untuk melakukan pembagian harta peninggalan setelah meninggal pewaris dalam pandangan ulama mazhab empat. Pendekatan yang digunakan ini akan diterapkan berdasarkan aturan-aturan dan teori-teori yang berkaitan dengan *tirkah syubhāt* dalam pembagian harta warisan. Peran pendekatan deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan dan atau menggambarkan kedudukan *tirkah syubhāt* dalam pandangan atau perspektif mazhab empat dalam proses pembagian harta warisan kepada ahli warisnya.

Selanjutnya pendekatan analisis digunakan untuk menganalisis tentang *tirkah syubhāt* dan relevansinya dengan asas *ijbari* menurut pendapat ulama empat mazhab dalam pembagian harta warisan dan juga menganalisis cara-cara yang mungkin dapat ditempuh untuk menyelesaikan pembagian harta warisan di mana *tirkah* yang akan dibagikan kepada ahli waris masih mengandung unsur *syubhāt*.

Salain dua pendekatan di atas, penelitian ini juga menggunakan pendekatan perbandingan (*comperative approach*). Perbandingan hukum yang dapat digunakan atau diterapkan, yaitu:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

1. Perbandingan hukum dalam disertasi ini selain mencari informasi atau diskripsi, juga mencari perbandingan dan persamaan.⁶

Perbandingan yang penulis maksud dalam penelitian ini adalah, perbandingan pemikiran dalam permasalahan tirkah syubahāt yang disebutkan oleh mazhab empat dengan melihat sisi perbedaan dan persamaan antara mazhab tersebut

2. Memberikan solusi dari perselihan atau memunculkan pandangan yang dianggap lebih relevan dengan keadaan sekarang ini.

Dalam penulisan ilmu hukum normatif, sumber utamanya adalah bahan hukum sekunder yakni meliputi bahan-bahan hukum baik kitab *turāst*, buku hukum dan dokumen hukum, termasuk kasus-kasus hukum yang menjadi pijakan dasar peneliti dalam rangka menjawab permasalahan dan tujuan penelitian yang berbicara tentang kedudukan harta *syubhāt* dan relevansinya dengan asas *ijbari* dalam kewarisan Islam.

B. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah sebuah teknik ataupun cara-cara yang dapat ditempuh oleh peneliti untuk mengumpulkan data-data yang kemudian ingin diteliti. Data-data ini juga diperlukan sebagai bukti bahwa penelitian benar-benar dilaksanakan.

Oleh karena penelitian ini merupakan studi kepustakaan (*library research*), maka untuk mendapatkan data yang dibutuhkan diadakan

⁶Hajar M, Model-model Pendekatan dalam Penelitian Hukum dan Fiqh, Pekanbaru: Suska Riau (2015), hlm. 84.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

penelaahan terhadap buku-buku yang ada hubungannya dengan topik yang akan dibahas. Data tersebut dikumpulkan dengan kategori dasar yang sesuai dengan pokok permasalahan. Kemudian diteliti secermat mungkin dan dijadikan sebagai bahan untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang dibahas.

Riset kepustakaan, penelusuran ke pustaka-pustaka lebih diutamakan daripada sekedar melayani fungsi-fungsi persiapan kerangka penelitian, seperti mempertajam metodologi atau memperdalam kajian teoritis. Oleh karena demikian riset pustaka lebih bermakna memanfaatkan sumber perpustakaan untuk memperoleh data penelitian, tanpa riset lapangan.

C. Sumber Data

Adapun sumber data penelitian dalam disertasi ini berupa:

1. Data Primer

Sumber data primer yaitu sumber data yang diperoleh

Sesuai dengan permasalahan yang telah dirumuskan sebelumnya, data primer yang dibutuhkan dalam penelitian ini berkaitan dengan tiga hal: *Pertama*, data yang berkaitan dengan konsep *tirkah syubhāt*. *Kedua*, yang berkaitan dengan asas *ijbari* dalam kewarisan. *Ketiga*, data yang berkenaan dengan kewarisan *tirkah syubhāt* dalam pandangan ulama mazhab empat. Oleh karena demikian yang menjadi data primer dalam penelitian ini berupa tulisan-tulisan yang pernah ditulis oleh tokoh mazhab empat yang berkaitan langsung dengan permasalahan *tirkah*

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

syubhāt.⁷ Sesuai dengan tema penelitian, maka data primer dari penelitian ini diantaranya adalah kitab kitab *majmu' 'ala syarhi al-muhazzab, ihyā ulumuddīn, Al-bariqah li muhmmadiyah, mughnī li Ibnu al-Qudāmah*.

2. Data Sekunder

Selanjutnya, data juga diperoleh dari sumber-sumber sekunder yang diperlukan untuk menunjang data primer. Dalam hal ini, sumber data sekunder meliputi antara lain kepustakaan di bidang ushul fikih secara umum, ushul fikih, yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti. Selain itu, penelitian ini juga merujuk berbagai sumber data tersier sebagai pelengkap data primer dan sekunder. Data-data tersebut dapat dirinci sebagai berikut: buku tafsir, buku hadits, dan sebagainya yang tentunya dapat membantu penulis untuk dapat menyebutkan permasalahan yang akan diteliti terkait *tirkah syubhāt* dan yang berkaitan dengan permasalahan kewarisan dan asas-asasnya.

D Pengolahan Data

Data yang telah diperoleh diolah berdasarkan metode berfikir induktif, deduktif dan komperatif. Metode induktif adalah menganalisa masalah yang bertitik tolak dari fakta-fakta yang bersifat khusus, kemudian dari fakta yang bersifat khusus tersebut ditarik suatu kesimpulan yang bersifat umum.⁸ Metode berfikir deduktif menarik kesimpulan khusus dari

⁷ *ibid.*, hlm. 34

⁸ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Cet ke-2, (Yogyakarta: Andi Offset, 1989), hlm. 42

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

E. Teknik Analisa Data

informasi yang bersifat umum.⁹ Sedangkan metode berfikir komperatif adalah pemecahan suatu masalah melalui analisa terhadap faktor-faktor tertentu yang berkaitan dengan fenomena yang diselidiki dan membandingkan dengan suatu faktor yang lainya.¹⁰

Penelitian ini pada dasarnya adalah penelitian disiplin ilmu ushul fikih, yaitu kajian suatu penelitian yang dilakukan oleh seorang penelitian dengan berbekal ilmu pengetahuan ushul fikih dan bertujuan untuk menunjukkan pemikiran mazhab empat terkait masalah *tirkah syubhāt* dan relevansinya dengan asas *ijbarī* dalam kewarisan Islam. Penulis mencoba untuk menyebutkan pandangan para ulama terkait masalah tersebut dan memaparkan landasan pijakan yang digunakan para ulama mazhab empat dalam menetapkan hukum terhadap masalah *tirkah syubāt* yang ditinggalkan pewaris kepada ahli warisnya. Akhir dari penelitian ini penulis mengungkapakan pandangan yang relevan untuk masyarakat Indonesia yang hidup pada zaman kekinian.

⁹ Ibid

¹⁰ Winarno Surachman, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, (Bandung: Tarsito, 1985), hlm. 143.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, penulis menyimpulkan beberapa kesimpulan, sebagai hasil temuan penelitian ini. kesimpulan yang dapat diketengahkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Esensi *tirkah syubhāt* adalah segala sesuatu yang menjadi milik seseorang pada masa hidupnya dan menjadi peninggalanya setelah ia meninggal dunia, yang status hukum harta peninggalan tersebut tidak jelas atau samar-samar, karena sebab percampuran unsur halal dan haram, sehingga memunculkan keragaman konsekuensi hukum terhadap penggunaan harta peninggalan tersebut.
2. *Asas ijbari* dalam kewarisan adalah paksaan untuk menerima bagian harta warisan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh syari'at, hal ini membuktikan bahwa paksaan dalam penerapan *asas ijbari* tidak mencakup pemberian *tirkah syubhāt* dalam praktek pembagian warisan.
3. Pendapat mazhab Hanafiyah terkait kewarisan *tirkah syubhāt* dilihat dari kadar percampuran harta, apabila mayoritas harta haram, maka status haram. Berbeda halnya apabila mayoritas dari harta itu halal, maka hukumnya makruh. Mazhab Syafi'iyah berpendapat bahwa harta yang bercampur antara halal dan haram hukum penggunaannya adalah makruh. Mazhab Malik menyebutkan pandangan yang sama dengan pandangan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mazhab Syafi'i yaitu harta yang bercampur antara halal dan haram adalah dihakimi makruh. Sedangkan Ulama dari kalangan Hanābilah menyebutkan pandangannya tentang harta yang bercampur antara halal dan haram (*syubhāt*) terbagi menjadi 4 (empat) pendapa: *Pertama* apabila diketahui bahwa dalam harta tersebut terdapat harta halal dan haram, maka konsekwensi hukumnya haram secara keseluruhan harta tersebut. *Kedua*, apabila bercampurnya sesuatu yang haram dengan yang halal, dan percampuran tersebut melebihi 1/3 (sepertiga), maka harta tersebut dianggap haram semuanya akan tetapi setelah identifikasi diketahui, bahwa percampuran harta kurang dari seper tiga, maka percampuran tersebut dianggap halal. *Ketiga*, apabila harta haram lebih banyak, maka hukumnya haram, apabila harta yang halal lebih banyak, maka hartanya halal. karena yang sedikit mengikuti yang dominan. *Keempat*, tidak haram secara mutlak. Baik harta yang haram itu sedikit atau banyak tapi makruh. Kemakruhannya meningkat atau menurun menurut kadar banyak atau sedikitnya harta yang haram

B. Saran

1. Identifikasi atau menelusuri ulang harta warisan yang telah ditinggalakan oleh pewaris agar dapat melakukan pemisahan *tirkah* yang mengandung unsur *syubhāt* dianggap perlu dilakukan kerana untuk menjaga kehalalan dan kebersihan harta. Oleh karena demikian menjadi saran dalam tulisan ini bahwa kepada seluruh pihak ahli waris yang mempraktekkan kewarisna agar kiranya meninjau ulang harta yang akan didistribusikan kepada ahli waris. agar distribusi harta warisan benar-benar terdiri dari harta yang bersih dari unsur *syubhāt*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Kepada penegak hukum atau *stholder* yang membuat hukum agarkiranya meninjau ulang terkait aturan yang telah ada mengenai pembagian harta warisan dan atau membuat aturan yang bersifat mengikat mengenai hal-hal yang harus dilakukan pewaris sebelum pembagian harta warisan. karena, aturan yang telah ada belum mampu mengkaver *tirkah syubhāt* yang status kehalalan hartanya masih diragukan. Oleh karena dimikian, perlu adanya aturan mengikat yang mengatur tentang pemisahan harta *syubhāt* sebelum pendistribusiannya kepada ahli waris, agar tidak terjadi penerusan estavet kesalahan pewaris kepada ahli waris.
3. Untuk memudahkan pengidentifikasi atau pemisahan status harta *syubhāt*, maka perlu adanya penguatan aturan yang dikemas pemerintah melalui melalui Kompilasi Hukum Islam dalam pencatatan pemasukan dan pengeluaran setiap individu penduduk (masyarakat). Apabila hal ini terlaksana, sangat dimungkinkan untuk mendeteksi semua penggunaan harta yang dilakukan oleh setiap penduduk, terkhusus masyarakat Indonesia. Konsekwensi dari pemberlakuan peraturan tersebut tentunya akan meminimalisir terjadi keraguan dalam penggunaan harta terutama bagi ahli waris yang melanjutkan estafet kepemilikan harta dari pewarisnya.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Abdul Kadir Muhammad Ali, Fathul Mubdi bi syarhi Mukhtashir Az-Zaidi, Juz III, Cet III, Bairut-Libanon: Dar al-Katab al-Ilmiyah, 2009
- Abdur Rahman al-Syarqawi, *Kehidupan Pemikiran Dan Perjuangan 5 Imam MazhabTerkemuka*, Bandung: al-Bay, 1994
- , *Riwayat 9 Imam Fikih*, Bandung: Pustaka Hidayah, 2000)
- Abdurrahman Kasdi, *Masail Fiqhiyyah: Kajian Fikih atas Masalah-Masalah Kontemporer*, Cet. 1, Kudus: Nora Media Enterprise, 2011
- Abdurrahman L. Doi, *Inilah Syariat Islam*, Jakarta: Pustaka Panjimas, 1990
- Abi Al-Fidaa' Isma'il Ibn Kasirt Al-Damsyik, *Tafsir Al-Qur'anal-A'dhim*, Kairo: al-Maktabah al-Taufiqiyah, t.t
- Abi Bakar Muhammad bin'Abdullah, *A'ridhah al-Ahwazi syarah kitab shahih al-Turmuzi*, Jilid IV, Bairut: Darul al-Kutub al-Ilmiyah, 1997
- Abi Daud Sulaiman, *sunan Abi Daud*, Bairut: Dar al-Fikri, 1994
- Abu Adullah Muhamad Ibn Isma'il al-Bukhari, *al-Jami' al-Shahih*, juz II, Kairo: al-Mathba'ah al-Salafiyah, 1400 H
- Abu al-Faraj Ibn al-Jauzi, *Nawasikh al-Quran*, Beirut: Dar al-Kutub, tt
- Abu al-Husai Muslim al Hajjaj al Nasyaburi, *al-Jami' al-Shahih*, juz V, Bairut: Dar al-Jay, t.th
- Abu Daud al-Sijistani, *Sunan Abu Daud*, Jilid II, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t.th
- Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, cet II, Jakarta: PT Toko Gunung Agung 2002
- Ahmad Abdul Ghaffar, *Agar Harta Tidak Menjadi Fitnah*, Yogyakarta, Gema Insani, 2008
- Ahmad al-Anshari al-Qurthubi, *Tafsiral-Jami' Li al-Ahkam Al-Qur'an*, Kairo: Dar al-Hadist, 2002



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Ahmad al-Syurbasi, *Sejarah dan Biografi Imam Mazhab, Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 1991

Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Waris Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2001

Ahmad Ibn Yahya al-Wansharisi, *Al-Mi'yar Al-Mu'rib*, Lebanon: Dar al-Gharib al-Islami, tt

Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995

Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islama di Indonesia*, cet. 1. Edisi Revisi Jakarta: Rajawali Pers, 2013

Al-Bujairimi, *Hasyiyah al-Bujairimi 'Ala Syahrhi Minhaj al-Thalibin*, Mesir: Musthafa al-Babu al-Halabi wa auladuhu, 1345 H

Al-Ghazali, *Al-Mustashfa min 'Ilmi al-Ushul*, vol. I, Bairut: Dar Ihya al-Turast al-Arabi, tth

Al-Ghazali, *Benang Tipis antara Halal dan Haram*, Semarang: Putra Pelajar, 2002

Al-Ghazali, Mutiara Ihya 'Ulumuddin, terj, Irwan Kurniawan, Bandung: Mizan, 2004

Al-Nawawi, *Majmu' Syarah Muhadzdzab*, Juz IX, Jeddah: Maktabat al-Irsyad, tt

Al-Nawawi, *Terjemahan Riyadus Shalihin*, Jakarta: Pustaka Amani, 1999

Al-Qalyubi dan al-'Umairah, *Hasyiatani 'ala Minhaj Al-Thalabin*, Bairut: Dar al-Fikr, Juz 3, tt

al-Qurthubi, *Tafsir al-Qurthubi*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2008

Al-'Abdu Al-Ma'bud, *ahkam al-miras wa al-washiyyah fi syari'ati al-islam*, Cet I, Kairo: Dar Al-Andalus li Al-Thaba', 2010

Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Kencana, 2003

Amir Syarifuddin, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dalam Llingkungan Adat Mingangkabau*, Jakarta: Gunung Agung, 1994

Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2012



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Anton Bakker, *Metode Filsafat*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1996,
- Arahman, *Penjelasan lengkap hukum-hukum Allah*, Jakarta Utara: PT Raja Gafindo Persada, 2002
- Asep Saifudin al-Mansyur, *Kedudukan Mazhab Dalam Syariat Islam* Jakarta: Bulan Bintang, 1989
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'andan Terjemahannya*, Surabaya: Pustaka As-salam, 2010
- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 0146/Pdt.G/2012/PA.BB.
- Djalal. Maman Abd, *Hukum Mawārist*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2006
- Djazuli, *Ilmu Fikih: Penggalan, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam*, Edisi Revisi, Cet. 7, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010
- Ensiklopedi Hukum Islam, jilid 2, Cet. VII, Jakarta: Rajawali Press, 1998
- Fathurrahman, *Hukum Waris*, Cet III, Jakarta: Senayan Abadi Publishing, 2011
- H.R. Otje Salman S. dan Mustofa Haffas, 2006, *Hukum Waris Islam*, (Bandung: Refika Aditama)
- Hafun Nasution, *Teologi Islam: Aliran-Aliran Sejarah Analisa Perbandingan*, (Jakarta: UI Press, 1986)
- Habibi Hanan, *Pembagian Waris 2:1 dalam Perspektif Hadits Ahkam*, dikutip dari majalah SuaraUldilag No.7 MARI Uldilag, (Jakarta : 2005)
- Hibatullah bin Salamah bin Nashr al-Muqri, *al-Nasikh wa al-Mansukh*, (Beirut: al-Maktab al-Islami, 1984)
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, (Bandung: Alumni, 1983)
- Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, (Jakarta: Logos, 1997)
- Ibn 'Abidin, *Hasyiyah Ibn 'Abidin*, jld 6 (Mesir: Musthafa al-Babu al-Halabi wa auladuhu, 1345 H)
- Ibn 'Abidin, *Radd al-Mukhtar 'ala Durr al-Mukhtar*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
- State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
- Ibn Katsir, *Tafsir Ibn Katsir*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo. 2000)
- Ibnu Hajar al-Asqalani, *Fath al-Bari*, Jilid XI, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2002)
- Ibnu Katsir, *Tafsir Al Qur'an Al 'Azhim*, (Madinah: Muja'mma' Malik Fahd, 1999)
- Ibnu Majah, *Sunan Ibn Majah* (Darul Kutub Al-Islamiyah, 2006)
- Ibnu Mandhur, *Lisan al-'Arab*, (kairo: Dar Al-Ma'arif, t.th)
- Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *I'lam al-Muwaqi'in*, Vol. III, (Kairo: Maktabah al-Kulliyyat al-Azhariyyah, 1980)
- Ibnu Rusyd, *Al-Muqaddimat Al-Mumahhadat*, (Beirut, Dar al-Kutb al-'Ilmiyyah, 2002)
- Ibnu Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid wa-Nihāyah al-Muqtasid*, Tahqiq : Thoha Abdurrauf Sa'ad, (Beirut : Dar al-Jail, 1989)
- Ibnu Taimiyah, *Majmū' al-Fatawā*, (Madinah: Muja'mma' al-malik Fahd, 1995)
- Imam Al-Ghazali, *Ihya Ulumuddin*, alih bahasa, Moh. Zuhri (Semarang: CV. Asyifa', 1992)
- Imam Muslim, *Shahih Muslim*, (Beirut: Darul Kutub Alamiah, 1992)
- Imam Nawawi, *Terjemahan Riyadus Shalihin Jilid I*, (Jakarta: Pustaka Amani, 1999)
- Jaih Mubarak, *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam* (Bandung: Rosdakarya, 2000)
- Jalaluddin Al-Suyuthi, *Al-Asybah wa Al-nadhair*, juz I, (Bairut: Dar-al-Kutub al-ilmiyah)
- Jalaluddin al-Suyuthi, *Lubab al-Nuqul fi Asbab al-Nuzul*, (Riyadh: Maktabat al-Riyadh, tt)
- Jalaluddin Rahman, *Perumusan Ulang Hukum Waris Islam*, (Jakarta: al-Hikmah, 2004)
- Komite Fakultas Syariah Universitas al-Azhar Mesir, *Ahkam al-Mawarist fi al-Fiqhi al-Islami*, Terjemaha oleh Adys Aldizar
- Lex Privatum* (majalah), Vol.I/No.5/November/2013



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- Syarkoni, *Penundaan Pembagian Harta Warisan dalam Perspektif Hukum Islam*, (Banda Aceh, IAIN Ar Raniry, 2005)
- Li Rasyidi, *Hukum sebagai Suatu Sistem*, (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 1993)
- Lotus Ma'luf, *Al-Munjid fi al-Lughah al-A'alam*, (Bairut: Dar al-Masyriq, 1986)
- M. Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995)
- M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Fiqh Mawaris*, (Semarang: Pustaka Riski Putra, 1999)
- M. Idris Ramulyo, *Beberapa Masalah Tentang Hukum Acara Perdata Peradilan Agama*, (Jakart: In Hill Co, 1991)
- M. Idris Ramulyo, *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dengan Kewarisan Menurut Hukum Perdata (BW)*, (Yogyakarta: 1994)
- M. Muhyidin Abdul Hamid, *Panduan Waris Empat Mazhab*, (Jakarta: al-Kausar, 2009)
- M. Nur kholis Al Amin, *Hibah Orang Tua Kepada Anak sebagai Pengganti Waris (Telaah Hermenitika Terhadap Pasal 211 Kompilasi Hukum Islam*, Jurlan Hukum Keluarga Islam, vol 6, No I, 2013
- M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, (Jakarta: Lentera hati, 2000)
- M. Quraishy Shihab, *Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002)
- M. Husain Abdullah, *Al-Wadhih fi Usul al-Fiqh*, (Beirut: Darul Bayariq, 1995)
- M. mun Daud, *Terjemahan Hadist Sahih Muslim*, Jilid. 3, Cet III (Jakarta: Widjaya, 1993)
- M. Hibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam, Sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009)
- M. chtar Kusumatmadja, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Unpublished draft, 1996)
- M. enawar Chalil, *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab: Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*, Cet. 9, (Jakarta: Bulan Bintang, 1994)
- M. enawir Chalil, *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*, Cet. ke-9, (Jakarta: Bulan Bintang, 1955)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- Muhamamad A'li al-Ashabuni, *Shafwatu al-Tafasir*, Jilid I, (Kairo: Dar al-Shabuni, tt)
- Muhamamd 'Abdu al-Rahim al-Kasykiy, *al-Mirats al-Muqran*, bab *Daur al-Taurts fi al-Islam*, (Baghdad: Dar al-Nadzir Lithaba' wa al-Nasyir, 1998)
- Muhammad A'li Saais, *Tafsir Ayat Al-Ahkam*, (ttp, tp, tt)
- Muhammad 'Ali al-Sabuny, *Pembagian Waris menurut Islam*, (Jakarta: Gema Insani, 1995)
- Muhammad Ali al-Sayis, *Nasy'at al-Fiqh al-Ijtihadi* (t.t: Majma' al-Buhuts al-Islamiyah. 1970)
- Muhammad Ali Ashabuni, *Pembagain warisn menurut Islam*, ter, A. Basalamah, (Jakarta: Gema insani pres, 1995)
- Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Pembagian Waris Menurut Islam*, Terj. Basalamah, (Jakarta: Gema Insani Pres, 1995)
- Muhammad 'Ali as-Sabuny, *al-Mawaris fi asy-Syari'ah al-Islamiyyah fi Dau al-Kitab a as-Sunnah*, (t.t 1989)
- Muhammad Ali as-Shabuni, *Hukum Waris dalam Syari'at Islam*, alih bahasa M. Samhuji Yahya, (Bandung: Dipenogoro, 1988)
- Muhammad Ali as-Shabuni, *Hukum Waris dalam Syari'at Islam*, alih bahasa M. Samhuji Yahya, (Bandung: Dipenogoro, 1988)
- Muhammad Ali Hasan, *Perbandingan mazhab*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1995)
- Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2004)
- Muhammad bin Ahmad al-Qurthubi, *Tafsir al-Qurthubi*, Jilid V, (Riyadh: Dar al-'alam al-Kutubi, 2003)
- Muhammad Mas'um Zaen, *Fikih Mawaris*, Cet. I, (Jatim: Daru al-hikmah, 2008)
- Muhammad Nuruddin al-Makki, *Imam Asy-Syafi'i Penghulu Imam Dan Pembaharu Ummah* (Jakarta: Pustaka Aman Press, 2002)
- Muhammad Shidqi al-Burnu, *Al-Wajiz li Idhah al-Qawa'id al-Fiqhiyyat al-Kuliyyat* (Riyadh: Mu'assasah al-Risalah. 1983)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
- State Islamic University of Sunan Syarif Kasim Riau
- Muhammad Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/ Penafsiran Al-Qur'an, 1972)
- Munibbin, dan Abdul Wahid, *Hukum kewarisan Islam sebagai pembaharuan hukum positif di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009)
- Muhlis Usman, *Kaedah-kaedah Ushuliyah dan Fiqhiyah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997)
- Muhlis Usman, *Kaidah-kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyyah*, (Jakarta: Gema Insani Press, 200)
- Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000)
- positif di Indonesia* (jurnal pemikiran Islam, volume 4, No. 2, Juli-Agustus, 2015.)
- Rizal, *Eksistensi harta Haram Dalam Islam* (Suatu kajian Analisi Teoritis) Vol, 9. No. I Februari, 2015.
- Roscoe, *The Law Theory of Social Engineering*, dalam Tom Cambell, *Tujuh Teori Sosial*, Sketsa, Penilaian, Perbandingan, (Yogyakarta: Kanisius, 1994).
- Rusli Efendi dan Achamad Ali, *Teori Hukum*, (Ujung Pandang: Hasanuddin Universitas Pres, 1991)
- Sa'id Hawa, *Asas fi Tafsir*, jilid 2, (Kairo: Dar Al-Salam, 1999)
- Sa'uti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Bina Akasara, 1981)
- Sa'jipto, *Hukum dan Masyarakat*, (Bandung: Angkasa, 1980)
- Sa'ria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer- Analisis Yurisprudensi dengan pendekatan Ushuliyah*, (Jakarta: Prenada Media, 2004)
- Sa'ria Effendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2004)
- Sa'id Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Kairo: Dar Fath Lil 'ilmi al Araby, 1973)
- Sa'uti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Jakarta Sinar Grafika: 2016)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta dimiliki UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Sayuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Cet. 1, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016)
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Kairo: Dar al-Fikr, [t.th]), Juz 9,
- Sayyid Sabiq, *fiqhu al-Sunnah*, jilid III, Cet. XXI (Kairo: Dar al-Fathi lil I'limi al-Arabiy, 1999)
- Sirajuddin, dkk, *Legislative Drafting: Pelembagaan Metode Partisipatif dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, (Malang: Malang Corruption Watch dan YAPPIKA, 2006)
- Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah, *Sosiologi Hukum Terhadap Masyarakat*, (Jakarta: Rajawali Press, 1982)
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methodh)*, (Bandung: Alfabeta, 2016)
- Suhadak, *Legal Standing Dalam Perspektif Gugatan Waris dan Urgensinya* (makalah), diseminarkan dalam Rakerda Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Mataram, Tanggal 24 November 2010)
- Suhrawardi & Komisa Simanjuntak, *Hukum Waris Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007)
- An Nawawi, *Shahih Muslim Syarhul Iman Muhyiddin an Nawawi al-Minhaj Syarhul Shahih Muslim*, Juz II, (Bairut-Libanon Dar El-Marifah, 1997)
- Sayuti Thalib, *Hukum kewarisan Islam Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016)
- Teji Supriadi, *reinterpretasi kewarisan Islam bagi perempuan*, (Jurnal sosiorelegi, Vol 14, No. 2, Edisi September 2016)
- Teji Supriadi, *reinterpretasi kewarisan Islam bagi perempuan*, (Sosiorelgi: Vol, 14. No. 2, Edisi September 2016)
- Mhammad Hasbi Ash Shiddiey. *Fiqh Mawarist*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001)
- Tengku Muhammad Hasbi, *Pedoman Haji*, Jakarta: Rajawali Press, 1997
- Ti Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa, 2006
- Ti Redaksi Fokus Media, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Fokus Media, 2014)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Umar Syihab, *Hukum Kewarisan Islam dan Pelaksanaannya di Wajo* (Disertasi doctor Universitas Hasanuddin, Ujung Pandang, 1998)
- Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqhu al-Islami Wa Adillatuh*, (Bairut: Dar-al-Fikri, 2002)
- Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Warisan di Indonesia*, (Bandung: Sumur Bandung, 2006)
- Yahya Harahap, *Kedudukan, Kewenangan dan Acara Peradilan Agama, UU Nomor 7 Tahun 1989*, (Jakarta: Pustaka Kartini, 1993)
- Yasin Ahmad Ibrahim Dardakah, *al-Miirats fi al-Syari'ati al-Islamiyyah* (tt,tp)
- Yasin Ahmad Ibrahim Dardakah, *al-Mirāts fi al-Syarī'ati al-Islamiyyah*, Dar Kutubu al-'Ilmiyah, 1997
- Zamal Abidin Ahmad, *Riwayat Hidup Ibnu Rusyd (Avveroes) filosof Islam terbesar di Barat*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1975)



UIN SUSKA RIAU

2. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Curriculum Vitae

Data Personal

Nama Lengkap : Muhammad Ichsan
 NIM : 31695104852
 Prodi : Hukum Keluarga (al-Ahwal al-Syakhsiyyah)
 Tempat/Tgl. Lahir : Keutapang, 05 November 1986, Aceh
 Agama : Islam
 Status (Menikah/Lajang) : Menikah
 Nama Ayah : Abdurrahman
 Nama Ibu : Wardah
 Nama Istri : Erna Dewi
 Nama Anak : Arissa Zhufairah
 Zahid al-Kausar
 Kewarganegaraan : Indonesia
 Alamat : Perumahan Ufairah, Teropong, Kab. Kampar
 Telepon/ Hp : 085359877308
 Email : ichsanezbet86@gmail.com

Pendidikan Formal

1. Tamatan (SD)/Thn : SD Gle Lam. Paloh. Aceh pidie (1994-1999)
2. Tamatan (MTs)/Thn : MTsS MUQ Pagar Air, Aceh Besar (2000-2002)
3. Tamatan (MAN)/Thn : MAS MUQ Pagar Air (2002-2004)
4. Tamatan (S1)/Thn : Al-Azhar (2004-2011)
5. Tamatan (S2)/Thn : Ar Raniry, Banda Aceh (2012- 2015)



6. Studi S3

: S3 Hukum Keluarga (*Ahwal Al Syakhsiyah*) Universitas
Islam Negri Sultan Syarif Kasim Pekanbaru (2016-..)

Karya Ilmiah

Jurnal:

1. Waktu pembagian harta warisan dalam masyarakat Aceh Besar perspektif fiqh
2. Pernikahan fasid dan konsekwesinya terhadap kewarisan anak studi komperatif
3. Kewarisan anak angkat anak menurut tinjauan *maqasid al-syari'ah* (kajian komperatif ulama klasik dan kompilasi hukum Islam (KHI)

Pengalaman kerja

1. Dosen Tetap STAI Al-Hilal. Aceh
2. Direktur Ma'had Tahfiz Manarul Ilmi, Tungkop Darussalam, Aceh Besar,
3. Pimpinan Baitul Qur'an, Keudah, Aceh Besar
4. Pengajar tahfiz pompa Al-Mujtahadah, pekanbaru
5. Pengajar pompa al-Ihsan (IBS), Riau
6. Anggota litbang Baitul Qur'an, Riau

Demikianlah daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sungguh-sungguhnya,
tanpa ada pemalsuan informasi yang disampaikan.

Tertanda

Muhammad Ichsan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang menyalin, mengutip, atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan harus mencantumkan bentuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

UIN SUSKA RIAU

KARTU KONTROL KONSULTASI

BIMBINGAN TESIS / DISERTASI MAHASISWA

NAMA

M. HUSN

NIM

8169555883

PROGRAM STUDI

HK (Hukum Keluarga)

KONSENTRASI

PEMBIMBING I / PROMOTOR

Prof. Dr. Alaidin Kato

PEMBIMBING II / CO PROMOTOR

Dr. Helmi Bagri, MA






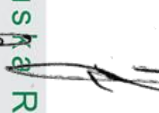
JUDUL TESIS/DISERTASI

Tinjau Syariah dan Re

konvensional sebagai dasar hukum dalam pelaksanaan hukum peradilan adat melayu.

PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

UIN SUSKA RIAU

NO.	Tanggal Konsultasi	Materi Pembimbing / Promotor *	Paraf Pembimbing/ Promotor	Keterangan
1.	6/2/18	Penzarahan SK Promotor		
2.	15/4/18	Bimbingan Bab I		
3.	23/6/18	Bimbingan Bab II dan Bab III		
4.	25/7/18	Bimbingan Bab IV dan Bab V		
5.	23/9/18	Revisi Penyerahan / perbitan		
6.	26/12/18	Acc untuk tesis - Hak Cipta UIN Suska Riau		

Catatan :







Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Pekerjaan tidak boleh dipinjam atau disalin seluruhnya tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk keperluan penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan artikel atau esai.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
- Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.




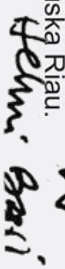
UIN SUSKA RIAU

NO.	Tanggal Konsultasi	Materi Pembimbing / Promotor *	Paraf Pembimbing/ Co Promotor	Keterangan
1.	7/1/18	Penzarahan SK as. Promotor		
2.	15/2/18	Bimbingan Bab I		
3.	13/4/18	Bimbingan Bab II		
4.	17/6/18	Bimbingan bab III		
5.	18/9/18	Bimbingan Bab IV dan V		
6.	24/12/18	Penyerahan Tesis State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau		

Catatan :

*Coret yang tidak perlu

Pekanbaru, 20....


Promotor

Ko-Promotor

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UNIVERSITAS ISLAMIAH
SULTAN SYARIF KASIM
RIAU

Halaman ini mengundangi Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2006 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyatakan bahwa setiap orang mempunyai hak untuk memperoleh pendidikan yang layak. Oleh karena itu, UIN Suska Riau sebagai lembaga pendidikan Islam yang berkeadilan, memberikan kesempatan kepada setiap orang untuk memperoleh pendidikan yang layak. Oleh karena itu, UIN Suska Riau sebagai lembaga pendidikan Islam yang berkeadilan, memberikan kesempatan kepada setiap orang untuk memperoleh pendidikan yang layak.



SULTAN SYARIF KASIM

UIN SUSKA RIAU

SERTIFIKAT

ARABIC PROFICIENCY TEST

DIBERIKAN KEPADA

M. Ichsan

Nomor ID : 31695104853
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tanggal Lahir : 05 November 1986

بيان النتائج لاختبار اللغة العربية لمعرفة الكفاءة اللغوية

الاستماع : 57
القراءة : 58
القواعد : 50
النتيجة : 550

Berlaku Hingga : 29 Oktober 2019



Arabic Proficiency Test® Certificate Provided by
Language Development Center of State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau.
The scores and information presented in this score report are approved.
Address : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28128 PO BOX 1004 HP. 0852 7144 0823
Email : info@pusat-bahasa.info Website : pusat-bahasa.info

Drs. H. Kalayo Hasibuan, M. Ed-TESOL
The Head of Language Development Center

CERTIFICATE OF ACHIEVEMENT

This is to certify that

Name : M. Ichsan

ID Number : 31695104853

Date of Birth : November 5, 1986

Sex : Male

Test Form : Paper Based Test

Achieved the following scores on the

English Proficiency Test

Listening Comprehension : 43

Structure & Written Expressions : 55

Reading Comprehension : 52

Overall Score : 500

Expire Date : October 15, 2019



English Proficiency Test® Certificate Provided by
Language Development Center of State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau.
The scores and information presented in this score report are approved.
Address : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28128 PO BOX 1004
HP: 0852 7144 0823 Fax: (0761) 858832
Email : info@pusat-bahasa.info Website : pusat-bahasa.info



The Head of Language Development Center


Drs. H. Kalayo Hasibuan, M. Ed-TESOL
NIP. 196510281997031001